

**EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN SARANA
PELAYANAN MASYARAKAT DI WILAYAH
PERLUASAN KOTA SUKABUMI**

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Studi Magister Teknik Pembangunan Kota

Oleh :

TEJO CONDRU NUGROHO
L4D 000 134



**MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2002**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka.

Semarang, Agustus 2002



TEJO CONDRU NUGROHO
NIM L4D 000 134

**EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN SARANA
PELAYANAN MASYARAKAT DI WILAYAH
PERLUASAN KOTA SUKABUMI**

Tesis diajukan kepada
Program Studi Magister Teknik Pembangunan Kota
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

Oleh :

TEJO CONDRU NUGROHO
L4D 000 134

Diajukan pada Sidang Ujian Tesis
Tanggal 23 Agustus 2002

Dinyatakan Lulus
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Magister Teknik

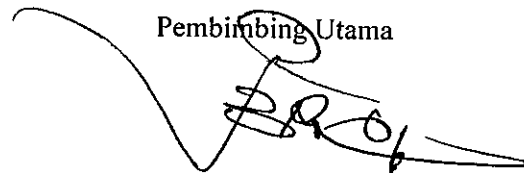
Semarang, Agustus 2002

Pembimbing Pendamping



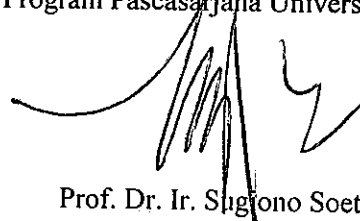
Samsul Ma'rif, SP,MT

Pembimbing Utama



PM. Brotosunaryo, SE, MSP

Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Teknik Pembangunan Kota
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Ir. Sugiono Soetomo, DEA

ABSTRAK

Tingkat pertumbuhan penduduk perkotaan yang mencapai 4% pertahun atau hampir dua kali lipat pertumbuhan penduduk nasional selama dasawarsa terakhir, akan memacu pertumbuhan perkotaan yang dicirikan dengan meningkatnya urbanisasi, kepadatan penduduk yang semakin tinggi dan penambahan permintaan akan pelayanan perkotaan, salah satunya adalah penyediaan fasilitas pelayanan masyarakat sebagai pemenuhan kebutuhan dasar (*basic needs*). Kota Sukabumi karena keterbatasan sumber daya lahan mengakibatkan tuntutan akan pelayanan masyarakat kota tidak dapat terpenuhi secara optimal yang menimbulkan permasalahan perkotaan, antara lain terpusatnya berbagai kegiatan di kawasan tertentu dan berbauarnya fungsi sekunder dan primer yang mengakibatkan terjadinya kemacetan lalu lintas. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut serta mewujudkan Visi Kota Sukabumi, pada tahun 1995 diundangkan kebijakan perluasan Kota Sukabumi (1.215 Ha menjadi 4.803,231 Ha) berdasarkan PP. No. 3/1995. Dengan tujuan (1) Pemerataan konsentrasi aktivitas penduduk untuk mengurangi terpusatnya berbagai kegiatan di kawasan pusat kota, (2) Penambahan lahan untuk menyediakan kebutuhan akan ruang kota, (3) Terjadinya integrasi sehingga akan mengurangi komuter masyarakat ke pusat kota (4) Penumbuhan aktivitas-aktivitas baru di kawasan pinggiran (*marginal*) Kota Sukabumi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan sarana pelayanan masyarakat dan merumuskan hasil evaluasi tersebut sebagai strategi pembangunan sarana pelayanan masyarakat. Analisis yang dipergunakan adalah (1) Analisis scoring untuk melakukan penilaian kinerja pembangunan, (2) Analisis indeks sentralitas untuk mengetahui hierarki pusat-pusat pelayanan dan kelengkapan sarana pelayanan masyarakat dan (3) Analisis wilayah keputusan berkaitan (AWKB) untuk merumuskan strategi pembangunan sarana pelayanan masyarakat. Adapun aspek-aspek yang diamati dalam studi ini meliputi (1) Aspek ketersediaan sarana pelayanan (2) Aspek kondisi sarana pelayanan (3) Aspek lokasi dan sebaran sarana pelayanan (4) Aspek arah dan frekuensi pergerakan masyarakat ke sarana pelayanan. Dengan wilayah penelitian meliputi 18 kelurahan di wilayah perluasan Kota Sukabumi dan objek penelitian mencakup lima sarana pelayanan masyarakat yang terdiri dari (1) Sarana perdagangan, (2) Sarana pendidikan, (3) Sarana kesehatan, (4) Sarana rekreasi dan (5) Sarana peribadatan.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa setelah tujuh tahun sejak diundangkannya PP. No. 3/1995, kinerja pembangunan sarana pelayanan masyarakat di wilayah Kota Sukabumi dilihat dari tujuan PP. No. 3/1995 serta visi Kota Sukabumi dapat dinilai secara keseluruhan belum tercapai dengan optimal (33,8%), yang didukung dengan temuan studi sebagai berikut (1) Ketersediaan sarana pelayanan yang dinilai sudah memadai, yaitu sarana perdagangan (*warung dan toko*), sarana kesehatan (*puskesmas*), sarana rekreasi (*tempat olah raga*) dan sarana peribadatan (*masjid dan musholla*), (2) Kondisi sarana pelayanan masyarakat di wilayah perluasan Kota Sukabumi dinilai cukup artinya jumlah sarana pelayanan masih perlu penambahan, tidak perlu perbaikan dan lokasinya sudah tepat, (3) Jarak rata-rata sarana dinilai sedang (600 sampai dengan 1.200 meter, 10 - 20 menit berjalan kaki), dengan tingkat sebaran sarana pelayanan masyarakat belum merata, sarana yang sudah merata adalah sarana peribadatan (*masjid dan musholla*). (4) Adanya perluasan dan pembangunan sarana pelayanan telah dapat mengurangi pergerakan masyarakat di wilayah perluasan ke pusat kota dan Kota Sukabumi lama sebesar 3,70% (*tempat bekerja*), 6,43% (*pendidikan*), 46,97% (*perdagangan*), 33,33% (*kesehatan*) dan 5,65% (*rekreasi dan hiburan*).

Dari temuan studi, rekomendasi tindakan sebagai upaya peningkatan kinerja pembangunan sarana pelayanan masyarakat adalah pemerataan pembangunan sarana pelayanan masyarakat (*prioritas pada pusat pelayanan kecamatan yaitu Kelurahan Baros, Kelurahan Cisarua dan Kelurahan Cipanengah*) dengan menggunakan strategi pembangunan dari hasil analisis AWKB yang didukung dengan kebijakan Pemerintah Kota Sukabumi untuk percepatan pembangunan sarana pelayanan masyarakat di pusat-pusat kecamatan.

**PERFORMANCE EVALUATION OF
COMMUNITY FACILITIES DEVELOPMENT
IN SUKABUMI EXPANDED AREA**

ABSTRACT THESIS

**Submitted to Graduate Program in Urban Development Engineering
in Partial Fulfillment of the Requirement Degree of Master Engineering
at University of Diponegoro**

**TEJO CONDRO NUGROHO
L4D 000 134**

MENTOR

PM. BROTONUNARYO, SE, MSP

CO-MENTOR

SAMSUL MA'RIF, SP, MT.



**MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN KOTA
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG, 2002**

ABSTRACT

Rate of urban population that reach 4% per year or twice more than national population for last decade, will influent on the rapidly growth of cities number such as urbanization, population density and highly demand of urban public facilities, one of the facilities is for fulfilling the basic needs. Due to the limitation of the area resources, Sukabumi City can not optimally fulfilling urban public facilities, and it causing urban problems in which many activities that focused just on the certain area and mixing primary and secondary function, it causing traffic jam. To cope with these problems and to create Sukabumi vision, in 1995 Sukabumi City expanded the area from 1.215 Ha to 4.803,231 Ha based on PP. No.3/1995. The purposes of this policy are (1) to reduce centralized activities in the center business district, (2) to provide the urban space by add the area, (3) to perform the local integrity by reducing urban movement from expanded area to the center business district and old Sukabumi City, (4) to perform new activities in the phery-phery are.

The aims of this research are performance evaluation of the community facilities development and formulate it as the community facilities development strategy. It's propose many analyze program such as (1) scoring analyze, for evaluation development community facilities, (2) centralization index analyze, for obtaining service center hierarchy and administration of community facilities, and (3) interconnected decision area analyze (AWKB), for formulating the development strategy of community facilities. Meanwhile, some of the aspects that should be observe in this study are (1) Availability aspect of the community facilities. (2) Condition aspect of community facilities. (3) Spreading of community facilities and location aspect. (4) Direction aspect and the frequency of urban movement to the community facilities. Scope of the area in this research is covering 18 district in Sukabumi City and five objects of the research that consist (1) trade off facility, (2) education facility, (3) healthy facility, (4) recreation and entertainment facility and (5) praying facility.

Based on the research result, it was known that for seven years after PP. No.3/1995 declaration, viewed from the purpose of PP.No.3/1995 and Sukabumi Vision, the development community facilities in Sukabumi city was judged not yet optimally reachable (35,8%). This finding supported by (1) community facilities have been provided properly, it indicated by trade off facilities (shop and small shop), healthy facilities (medical center), recreation facilities (sport area) and praying facilities (mosque and langgar/musholla), (2) Condition of community facilities in Sukabumi City was judged quite enough, it means there is no renovation and location should not be changed but the numbers of community facilities still need some addition. (3) Rate of distance is worthwhile (600-1.200 meters, 10-20 minute on foot), meanwhile the rate of community facilities spreading is not smooth, except praying facility (mosque). (4) The extension and the development of community facilities have been minimizing the urban movement to the center and old Sukabumi City for amount 3,70%(work place), 6,43% (education), 46,87% (trade off), 33,33% (healthy), and 5,65% (recreation and entertainment).

Based on this finding, some of the recommendations as the effort to enhance the development act for the community facilities are distribution of community facilities development (priority center service of District Baros, District Cisarua and District Cipanengah) by implementing development strategy resulted from interconnected decision area analyze (AWKB) and supported by Sukabumi Government policy in term of speeding up community facilities development in the center service of districts area.

*“Yen Siro Dibeciki Marang Ing Liyan
Tulisen Ning Watu, Ben Ora Ilang
Yen Siro Gawe Kabecikan Ing Liyan
Tulisen Ning Pasir, Ben Cepet Ilang”*

(Tejo, Agustus 2002)

Karya Ini Penulis Persembahkan Kepada:

*Ayahanda dan Ibunda Almarhum
Tersayang, Papa dan Mama Tersayang,
Istriku Joice Soraya dan Anakku
Muhammad Chandra Al Rakha Tercinta
yang Selalu Mendo'akan dan Menantikan
Keberhasilanku*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah dan karunia-Nya kepada penyusun sehingga penyusunan laporan Tesis ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu.

Kami menyadari bahwa di dalam penyelesaian Tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan yang datang dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini, Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu sehingga dapat terselesaikannya laporan Tesis ini, terutama kepada :

1. Ibu Walikota Sukabumi Hj. Dra. Molly Mulyahati Jubaedi, MSc yang telah memberikan kesempatan untuk melanjutkan studi.
2. Bapak H. Mokh Muslikh Abdussyukur, SH, MM, MBA sekeluarga yang telah memberikan dukungan, perhatian dan semangat baik moril maupun materil selama studi.
3. Bapak Prof. DR. Ir. Soegiono Soetomo, CES, DEA selaku Ketua Program Magister Teknik Pembangunan Kota UNDIP.
4. Bapak PM. Brotosunaryo, SE, MSP selaku pembimbing utama yang telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan bimbingan di sela-sela kesibukan tugas dan kegiatan beliau yang cukup padat.
5. Bapak Samsul Ma'rif, SP, MT selaku pembimbing pendamping yang telah berkenan meluangkan waktu di sela-sela kesibukan beliau mengajar dan melakukan aktivitas lainnya.
6. Ibu Hj. Ir. Nanny Yuliasuti, MSP selaku pembahas, yang telah memberikan masukan dan saran yang sangat berguna bagi penyempurnaan laporan Tesis.
7. Bapak Ir. Djoko Suwandono, MSP selaku penguji, yang telah memberikan saran dan koreksi dalam penyempurnaan laporan Tesis ini.
8. Teman-teman CBUIM angkatan IV, terutama Alan Tandiyar dan Gunawan Adi sebagai teman *se-perjuangan* yang telah memberikan kritik, masukan dan informasi yang berharga serta gelak tawanya selama ini.
9. Seluruh staff MTPK-UNDIP (Mbak Maslakah, Mas Janu, Mbak Dien, Mbak Ratih, Mbak Linda dan Mas Prie) dan semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan ataupun kritik dan saran yang sangat berharga bagi penyelesaian laporan Tesis ini, karena terbatasnya tempat yang tersedia maka tidak dapat disebutkan satu persatu dalam laporan.

Semoga segala bimbingan, dukungan, kritik, saran, dorongan dan perhatian yang telah Bapak/Ibu/Teman-teman berikan dapat diterima sebagai amal ibadah di sisi Allah SWT. Amien.

Semarang, Agustus 2002
Penulis,

Tejo Condro Nugroho

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR PETA	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISTILAH	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Permasalahan	7
1.3. Tujuan dan Sasaran Studi	8
1.4. Manfaat Penelitian	9
1.5. Ruang Lingkup Studi.....	10
1.5.1 Ruang Lingkup Substansial.....	10
1.5.2. Ruang Lingkup Spatial.....	13
1.6. Kerangka Pemikiran	16
1.7. Pendekatan Studi dan Metode Penelitian	19
1.7.1 Pendekatan Studi	19
1.7.2 Metode Penelitian.....	20
1.8. Sistematika Penulisan	33
BAB II PERKEMBANGAN KOTA DAN PEMBANGUNAN SARANA PELAYANAN MASYARAKAT	35
2.1. Pertumbuhan dan Perkembangan Kota.....	36
2.2. Neighborhood Unit	40
2.2.1. Pengertian Neighborhood Unit.....	40
2.2.2. Prinsip Jarak Tempuh dalam Neighborhood Unit	43
2.3. Pembangunan Sarana Pelayanan Masyarakat Dalam Rangka Pengembangan Kota.....	44
2.3.1. Pengertian Sarana Pelayanan	45
2.3.2. Faktor-faktor Penentu Kebutuhan Sarana Pelayanan.....	48
2.4. Pusat dan Sub Pusat Kegiatan Pelayanan Perkotaan	51
2.5. Strategi Pengembangan Wilayah.....	53
2.5.1. Pendekatan Wilayah Secara Nodal.....	53
2.5.2. Pengembangan Konsep Pusat-Pusat Pertumbuhan	55
2.5.3. Pilihan Strategis.....	56

2.6. Kriteria Evaluasi Kinerja Sarana Pelayanan Masyarakat di Wilayah Perluasan Kota Sukabumi.....	57
2.7. Rangkuman Kajian Teori.....	62
BAB III DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN.....	65
3.1. Gambaran Umum Kota Sukabumi.....	65
3.1.1. Demografi/Kependudukan.....	65
3.1.2. Kondisi Ekonomi.....	68
3.1.3. Pola Jaringan Transportasi.....	70
3.1.4. Pola Penggunaan Lahan.....	70
3.1.5. Pembangunan Sarana Pelayanan Umum Perkotaan di Kota Sukabumi.....	72
3.2. Deskripsi Wilayah Perluasan Kota Sukabumi.....	74
3.2.1. Wilayah Perluasan Kota Sukabumi (PPNo.3/1995).....	74
3.2.2. Sebaran dan Kepadatan Penduduk.....	76
3.3. Ketersediaan Sarana Pelayanan Masyarakat di Wilayah Perluasan.....	78
3.4.1. Sarana Perdagangan.....	79
3.4.2. Sarana Kesehatan.....	80
3.4.3. Sarana Pendidikan.....	81
3.4.4. Sarana Peribadatan dan Rekreasi.....	81
BAB IV EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN SARANA PELAYANAN MASYARAKAT DI WILAYAH PERLUASAN KOTA SUKABUMI.....	83
4.1. Penilaian Terhadap Arah dan Frekuensi Pergerakan Masyarakat ke Berbagai Sarana Pelayanan Masyarakat.....	83
4.1.1. Arah Pergerakan Masyarakat di Wilayah Perluasan ke Sarana Pelayanan Masyarakat.....	83
4.1.2. Frekuensi Pergerakan Masyarakat ke Pusat Kota dan Wilayah Kota Sukabumi Lama.....	95
4.2. Penilaian Terhadap Kondisi Sarana Pelayanan Masyarakat.....	96
4.3. Penilaian Terhadap Sebaran dan Jarak Sarana Pelayanan Masyarakat di Wilayah Perluasan Kota Sukabumi.....	97
4.3.1. Sebaran Sarana Pelayanan Masyarakat.....	97
4.3.2. Jarak Rata-Rata Sarana Pelayanan Masyarakat.....	101
4.4. Penilaian Terhadap Ketersediaan (<i>supply</i>) dan Kebutuhan (<i>demand</i>) Sarana Pelayanan Masyarakat.....	115
4.4.1. Penilaian Ketersediaan Sarana Pelayanan Masyarakat....	116
4.4.2. Kebutuhan Ruang dan Sarana Pelayanan Masyarakat.....	125
4.5. Penilaian Terhadap Pelaku Pembangunan.....	130
4.6. Penilaian Kinerja Pembangunan Sarana Pelayanan Masyarakat di Wilayah Perluasan Kota Sukabumi.....	131
4.7. Pendekatan Wilayah Nodal dengan Metode Indeks Sentralitas	132
4.8. Analisis Wilayah Keputusan Berkaitan (AWKB) sebagai Pilihan Strategis Pembangunan Sarana Pelayanan Masyarakat di Wilayah Perluasan Kota Sukabumi.....	136

4.8.1. Pengidentifikasian Wilayah Keputusan.....	137
4.8.2. Penetapan Pilihan Program Pengembangan di Wilayah Perluasan Kota Sukabumi.....	140
4.8.3. Penetapan Keterkaitan Program Pengembangan.....	141
4.8.4. Pilihan Strategis di Wilayah Perluasan Kota Sukabumi .	149
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	156
5.1. Kesimpulan dan Temuan Studi.....	156
5.2. Rekomendasi	158
5.3. Saran Studi Lebih Lanjut.....	159
DAFTAR PUSTAKA.....	161
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
LAMPIRAN A : Desain Penelitian	
LAMPIRAN B : Analisis Data	

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 : Kriteria Penilaian dan Pembobotan untuk Data Primer.....	25
Tabel I.2 : Kriteria Penilaian dan Pembobotan untuk Data Sekunder	26
Tabel II.1 : Besaran dan Ukuran Neighborhood Unit	42
Tabel II.2 : Standar Jarak Tempuh ke Sarana.....	44
Tabel II.3 : Standar Perencanaan Sarana Pelayanan Masyarakat di Kawasan Permukiman Kota	50
Tabel III.1 : Kepadatan Penduduk, Tahun 2001	68
Tabel III.2 : Laju Pertumbuhan PDRB Kecamatan atas Dasar Harga Konstan 1993 Tahun 1995-2001	69
Tabel III.3 : Penggunaan Lahan di Wilayah Kota Sukabumi	71
Tabel III.4 : Jumlah Penduduk di Wilayah Perluasan Tahun 2001	77
Tabel III.5 : Jarak Kelurahan, Pusat Kota dan Sub Pusat Kecamatan	78
Tabel III.6 : Jumlah Sarana Perdagangan di Wilayah Perluasan	80
Tabel III.7 : Jumlah Sarana Kesehatan di Wilayah Perluasan	80
Tabel III.8 : Jumlah Sarana Pendidikan di Wilayah Perluasan.....	81
Tabel III.9 : Jumlah Sarana Peribadatan dan Rekreasi di Wilayah Perluasan	82
Tabel IV.1 : Arah dan Pergerakan Penduduk ke Sarana Tempat Bekerja	84
Tabel IV.2 : Arah dan Pergerakan Penduduk ke Sarana Pendidikan.....	86
Tabel IV.3 : Arah dan Pergerakan Penduduk ke Sarana Perbelanjaan	87
Tabel IV.4 : Arah dan Pergerakan Penduduk ke Sarana Kesehatan	89
Tabel IV.5 : Arah dan Pergerakan Penduduk ke Sarana Rekreasi	91
Tabel IV.6 : Arah dan Pergerakan Penduduk ke Sarana Ibadah.....	93
Tabel IV.7 : Resume Arah Pergerakan ke Sarana Pelayanan Masyarakat.....	94
Tabel IV.8 : Frekuensi Pergerakan Penduduk ke Sarana.....	95
Tabel IV.9 : Kondisi Sarana Pelayanan Masyarakat.....	96
Tabel IV.10: Penilaian Sebaran Sarana di Wilayah Perluasan	101
Tabel IV.11: Penilaian Jarak Rata-Rata Sarana Pelayanan Masyarakat	115
Tabel IV.12: Penilaian Ketersediaan Sarana Pelayanan Masyarakat	125
Tabel IV.13: Kebutuhan Ruang dan Sarana Pelayanan Masyarakat	129
Tabel IV.14: Penilaian Terhadap Pelaku Pembangunan.....	130
Tabel IV.15: Penilaian Terhadap Kinerja Pembangunan Sarana Pelayanan Masyarakat di Wilayah Perluasan Kota Sukabumi	132
Tabel IV.16: Klasifikasi Hierarki Pelayanan berdasarkan Indeks Sentralitas .	135
Tabel IV.17: Wilayah Keputusan di Wilayah Perluasan	137
Tabel IV.16: Penetapan Pilihan Layah Program Pembangunan di Wilayah Perluasan Kota Sukabumi.....	141

DAFTAR GAMBAR

Gambar

1.1	: Kerangka Pemikiran Evaluasi Kinerja Pembangunan Sarana Pelayanan Masyarakat di Wilayah Perluasan	18
1.2	: Diagram Sampel	23
1.3	: Alur Proses Analisis Data	32
3.1	: Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian	66
3.2	: Sebaran Penduduk Kota Sukabumi	67
3.3	: Laju Pertumbuhan PDRB Kecamatan Atas Dasar Harga Konstan 1993 Tahun 1995-2001	69
3.4	: Penggunaan Lahan di Wilayah Perluasan Tahun 2002	72
3.5	: Sebaran Penduduk di Wilayah Perluasan	78
4.1	: Resume Arah Pergerakan Masyarakat ke Sarana Pelayanan...	94
4.2	: Wilayah-Wilayah Keputusan.....	138
4.3	: Wilayah-Wilayah Fokus Permasalahan	140
4.4	: Wilayah Fokus Permasalahan I (P1 dan P2).....	142
4.5	: Subwilayah Fokus Permasalahan I (P3 dan P4)	143
4.6	: Subwilayah Fokus Permasalahan II (P5 dan P6).....	144
4.7	: Subwilayah Fokus Permasalahan III (P7 dan P8).....	144
4.8	: Subwilayah Fokus Permasalahan I (P9 dan P10)	145
4.9	: Subwilayah Fokus Permasalahan II (P11 dan P13).....	146
4.10	: Subwilayah Fokus Permasalahan III (P14 dan P15).....	147
4.11	: Subwilayah Fokus Permasalahan IV (P16 dan P17)	148

DAFTAR PETA

Peta I.01	: Lokasi Penelitian	15
Peta III.01	: Wilayah Administrasi	66
Peta III.02	: Kepadatan Penduduk	67
Peta III.03	: Penggunaan Lahan	71
Peta III.04	: Jaringan Jalan.....	72
Peta III.05	: Sebaran Sarana Perdagangan	79
Peta III.06	: Sebaran Sarana Pendidikan.....	81
Peta III.07	: Sebaran Sarana Kesehatan.....	82
Peta IV.01	: Sebaran Kebutuhan Sarana Perdagangan	127
Peta IV.02	: Sebaran Kebutuhan Sarana Pendidikan	129
Peta IV.03	: Sebaran Kebutuhan Sarana Kesehatan	131
Peta IV.04	: Sebaran Kebutuhan Sarana Rekreasi dan Hiburan	132
Peta IV.05	: Indeks Sentralitas.....	133
Peta IV.06	: Strategi Pembangunan Sarana Pelayanan Masyarakat di Wilayah Perluasan Kota Sukabumi Berdasarkan AWKB	155

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN A : DESAIN PENELITIAN

A.1 Tahapan Pelaksanaan Penelitian	Lamp. A.1
A.2 Kebutuhan Data.....	Lamp. A.2
A.3 Sebaran Sampel di Setiap Kelurahan	Lamp. A.3
A.4 Klasifikasi Rentang Nilai	Lamp. A.4

LAMPIRAN B : ANALISIS

B.1 Jawaban Kuesioner.....	Lamp. B.1
B.2 Analisis Arah Pergerakan.....	Lamp. B.2
B.3 Analisis Frekuensi	Lamp. B.3
B.4 Analisis Sebaran Sarana.....	Lamp. B.4
B.5 Analisis Jarak Rata-Rata dan Kondisi Sarana	Lamp. B.5
B.6 Analisis Komparasi <i>Demmand</i> dan <i>Supplay</i>	Lamp. B.6
B.7 Analisis Terhadap Pelaku Pembangunan	Lamp. B.7
B.8 Analisis <i>Indeks Sentralitas</i>	Lamp. B.8
B.9 Kuesioner	Lamp. B.9

DAFTAR ISTILAH

A. Bentuk Huruf

- 1) **Tebal** : Kata-kata yang penting (penegasan);
- 2) **Biasa** : Arti atau padanan kata;
- 3) *Miring* : Penggunaan istilah asing.

B. Singkatan Kata

- 1) Kel : Kelurahan
- 2) Kec : Kecamatan
- 3) Pemda : Pemerintah Daerah
- 4) Ket : Keterangan
- 5) No : Nomor
- 6) AWKB : Analisis Wilayah Keputusan Berkaitan

Akronim : Singkatan yang berupa gabungan huruf awal, gabungan suku kata ataupun gabungan kombinasi huruf dan suku kata dari deret kata yang diberlakukan sebagai kata.

- 1) Sarper : Sarana Perdagangan
- 2) Sarpend : Sarana Pendidikan
- 3) Sarkes : Sarana Kesehatan
- 4) Sarrek : Sarana Rekreasi
- 5) Sarrib : Sarana Peribadatan

C. Lambang-Lambang

- () : Dipakai sebagai penanda alternatif atau bagian dari perkataan atau bagian dari kalimat yang diapit merupakan penjelasan terhadap perkataan atau kalimat tersebut.
- > : Lebih besar/banyak dari pada
- < : Lebih kecil/sedikit dari pada
- ± : Kira-kira
- / : atau (*mis---* pertumbuhan/pertambahan), tanda pembagi (*mis---* jiwa/ha)
- : Tanda penghubung antar dua kalimat.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tingkat pertumbuhan penduduk perkotaan yang mencapai 4% pertahun atau hampir dua kali lipat pertumbuhan penduduk nasional, merupakan persoalan yang berat bagi sumber daya keuangan, sumber daya manusia dan manajemen pembangunan kota. Diperkirakan pada tahun 2018 sebanyak $\pm 50\%$ dari penduduk Indonesia tinggal di perkotaan. Peningkatan penduduk tersebut dicirikan dengan semakin meningkatnya urbanisasi, kepadatan penduduk yang semakin tinggi, berkembangnya daerah perkotaan dan penambahan permintaan akan perumahan dan pelayanan perkotaan (Budhi Tjahyati, 1997). Kondisi ini akan mengakibatkan meningkatnya tuntutan akan berbagai pelayanan perkotaan, dan salah satunya adalah penyediaan fasilitas pelayanan masyarakat sebagai pemenuhan kebutuhan dasar (*basic needs*) masyarakat kota.

Gejala yang timbul akibat pertumbuhan dan perkembangan kota yaitu meluasnya kawasan terbangun (*built up-area*) yang cenderung semakin melebar dan berkembang ke berbagai arah serta perkembangannya tidak terkendali (*daya sentripetal*). Gejala lainnya yang terlihat antara lain adalah pembangunan yang intensif, terutama di kawasan pusat kota (*daya sentrifugal*). Desakan penggunaan lahan perkotaan untuk berbagai keperluan pembangunan makin sulit dirasakan dari hari kehari. Akibatnya diberbagai kota besar maupun kecil timbul permasalahan seperti bercampurnya fungsi dan kegiatan kota di kawasan tertentu, terpusatnya berbagai kegiatan di dalam kota sampai pada sulitnya pengadaan ruang kota bagi berbagai keperluan kegiatan penduduknya, sehingga

pembangunan dan perkembangan kota yang terjadi semakin melebar dan melewati batas-batas administratif kota.

Melihat perkotaan sebagai suatu kumpulan aktivitas dalam suatu ruang (lahan) yang terus timbul seiring dengan berkembangnya dinamika masyarakat kota, maka kota juga dapat di pandang sebagai suatu sistem. Perkotaan sebagai sistem dari berbagai jenis kegiatan (aktifitas) yang ada di dalamnya serta adanya keterkaitan antara berbagai elemen pembentuk kota. Elemen pembentuk kota dimaksud dapat berupa kawasan fungsional kota dengan sarana penunjangnya serta jaringan prasarana yang mendukungnya. Keterkaitan yang erat antara satu elemen pembentuk kota dengan elemen yang lainnya akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan dari kota yang bersangkutan.

Penyediaan sarana pelayanan masyarakat merupakan salah satu permasalahan perkotaan, bahkan dapat dikatakan sebagai masalah nasional (Branch,1996). Sarana pelayanan masyarakat yang merupakan kelengkapan permukiman, disamping prasarana dan utilitas umum, perlu disediakan pada suatu unit lingkungan dan pusat-pusat pelayanan yang berskala lebih besar sesuai *hierarki* pelayanannya (DPU,1986). Permasalahan umum yang sering dijumpai adalah cenderung diabaikannya bangunan sarana pelayanan masyarakat pada permukiman yang berada di pusat kota, yang disulap menjadi bangunan atau gedung yang memiliki nilai ekonomis, sedangkan pada kawasan permukiman baru sarana pelayanan masyarakat yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, cenderung tertunda penyediaanya (Budihardjo, 1997). Sementara itu pada kawasan pusat kota cenderung terjadi aglomerasi sarana pelayanan masyarakat yang kelompok penggunaanya berada di pinggiran kota, selalu terjadi ketimpangan tingkat pelayanan sarana pelayanan masyarakat sejalan dengan fenomena dikotomi spasial kota. Hal ini

mengakibatkan *inefisiensi* pelayanan kota karena jarak sarana pelayanan masyarakat tertentu terhadap kelompok penggunanya relatif jauh.

Tujuan penyediaan sarana pelayanan masyarakat adalah untuk memberikan pelayanan kesejahteraan pada masyarakat terutama anggota masyarakat yang terbatas mobilitasnya seperti anak-anak, wanita dan para lanjut usia. Ketersediaan sarana pelayanan masyarakat dalam suatu unit lingkungan merupakan wujud efektivitas pelayanan kota, sarana pelayanan masyarakat pada suatu lingkungan hunian sangat berperan dalam terbentuknya ikatan sosial yang disebut *neighborhood link* (Budihardjo, 1997), karenanya kelayakan sarana pelayanan masyarakat dalam suatu unit lingkungan merupakan komponen dasar peningkatan kualitas hidup di wilayah perkotaan.

Sukabumi sebagai salah satu kota menengah di Indonesia mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. Sehubungan dengan aktivitas-aktivitas yang berlangsung secara intensif di pusat kota, serta adanya keterbatasan-keterbatasan sumber daya lahan, menyebabkan Kota Sukabumi semakin padat penduduknya, bahkan telah melampaui kepadatan ideal suatu daerah perkotaan yaitu mencapai 99 jiwa/ha (PP. No.3 Tahun 1995), yang mengakibatkan tuntutan akan sarana pelayanan masyarakat kota tidak dapat terpenuhi secara optimal karena keterbatasan sumber daya lahan tersebut.

Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan kota yang terjadi di Kota Sukabumi, terutama yang berada di jalur jalan-jalan utama kota mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang sangat pesat. Berbagai jenis kegiatan baru terutama perdagangan dan jasa banyak bermunculan. Sebagai akibatnya di kawasan pusat kota terjadi pemusatan (*aglomerasi*) berbagai kegiatan yang satu dengan yang lain dalam

menjalankan aktifitasnya sering berbenturan. Juga terjadi pembauran fungsi-fungsi kota sehingga pada kawasan-kawasan tertentu sudah tidak jelas lagi fungsi dan peruntukkannya. Pembangunan sarana dan prasarana kota di wilayah Kota Sukabumi tetap terus diusahakan, seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat Kota Sukabumi.

Akibat dari desakan yang terus menerus dari penduduk kota (bertambahnya jumlah penduduk kota) sedangkan sumber daya lahan terbatas, mengakibatkan tuntutan akan pelayanan masyarakat kota tidak dapat terpenuhi secara optimal serta menimbulkan berbagai persoalan yang terlihat sebagai permasalahan perkotaan Sukabumi. Permasalahan tersebut antara lain yaitu terpusatnya berbagai kegiatan di kawasan pusat kota, berbaurnya fungsi sekunder dan primer yang kesemuanya mengakibatkan terjadinya kemacetan lalu lintas, banyaknya penduduk kota yang pindah ke desa-desa pinggiran di luar batas kota sebagai akibat kurang tersedianya lahan perkotaan, kurangnya sarana dan prasarana kota yang sangat dibutuhkan oleh penduduk Kota Sukabumi dan semakin mendesaknya kebutuhan ruang kota untuk berbagai keperluan pembangunan (RUTRK Sukabumi 1989-2004).

Dikaitkan dengan pertumbuhan dan perkembangan Kota Sukabumi yang pesat, sedangkan jumlah sumber daya lahan yang terbatas, maka pada tahun 1995 ada kebijakan pengadaan perluasan di Kota Sukabumi, untuk mewujudkan visi dan misi Kota Sukabumi sebagai pusat pelayanan jasa terpadu dibidang perdagangan, kesehatan dan pendidikan sebagaimana tercantum dalam Perda. No.18 Tahun 2000 tentang Propeda Kota Sukabumi tahun 2000-2004 dan RUTRK Sukabumi 1989-2004, yang termuat dalam pengembangan sub wilayah kota lama dan sub pengembangan wilayah perluasan Kota Sukabumi. Sejak tahun 1995 telah terjadi perluasan wilayah di Kota Sukabumi,

yang semula luasnya 1.215 Ha menjadi 4.803,231 Ha berdasarkan PP. No.3 Tahun 1995. Perluasan wilayah dimaksud yaitu dengan memasukkan sebagian dari wilayah Kabupaten Sukabumi yang meliputi sebagian Kecamatan Sukabumi yang terdiri dari lima desa dan sebagian Kecamatan Baros yang terdiri dari 13 desa.

Diadakannya perluasan wilayah atau pemekaran Kota Sukabumi pada dasarnya ada empat maksud dan tujuan yang tersirat dalam PP. No.3 Tahun 1995. Keempat maksud dan tujuan tersebut antara lain adalah :

- 1) Pemerataan konsentrasi aktivitas-aktivitas penduduk, sehingga mengurangi beban dan terpusatnya berbagai kegiatan di kawasan pusat kota.
- 2) Penambahan lahan untuk menyediakan kebutuhan akan ruang kota untuk berbagai proses pembangunan dan kebutuhan masyarakat Kota Sukabumi.
- 3) Terjadinya integrasi antara wilayah Kota Sukabumi dengan kawasan pinggiran (*marginal*) Kota Sukabumi, sehingga akan dapat mengurangi pergerakan masyarakat (komuter) ke pusat kota.
- 4) Penumbuhan aktivitas-aktivitas baru di kawasan pinggiran (*marginal*) Kota Sukabumi, dengan membangun sarana pelayanan masyarakat untuk memenuhi dan melayani kebutuhan penduduk di wilayah perluasan itu sendiri dan wilayah sekitarnya.

Hal terpenting dalam pengembangan wilayah perluasan Kota Sukabumi adalah pengadaan perencanaan dan pembangunan sarana pelayanan masyarakat sebagai bagian penting dari sarana umum perkotaan yang secara langsung keberadaannya melayani kebutuhan masyarakat perkotaan. Berdasarkan buku Petunjuk Perencanaan Kawasan Perumahan Kota sesuai dengan Kepmen. PU.

Nomor: 378/KPTS/1987 disebutkan bahwa sarana pelayanan masyarakat dalam hal ini adalah sarana lingkungan, yaitu kelengkapan lingkungan yang berupa:

- 1) Sarana Hunian
- 2) Sarana Pendidikan
- 3) Sarana Kesehatan
- 4) Sarana Perbelanjaan/Niaga
- 5) Sarana Pemerintahan/Pelayanan Umum
- 6) Sarana Rekreasi/Kebudayaan
- 7) Sarana Olah raga/Lapangan terbuka

Apabila dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi (LPE) dan PDRB perkapita kecamatan di wilayah perluasan (Kecamatan Baros) menunjukkan peningkatan yang relatif kecil, yaitu pada tahun 1996 mengalami kenaikan sebesar 1,73%, pada tahun 1997 naik sebesar 1,65%, pada tahun 1998 karena adanya krisis moneter mengalami penurunan sebesar (20,80%), pada tahun 1999 dan 2000 mengalami kenaikan konstan kembali yaitu sebesar 1,78% dan 1,30% (BPS, 1996-2001). Keadaan tersebut menunjukkan --kurang konsistennya pengelolaan sumber daya alam dan kurangnya pembangunan sarana pelayanan masyarakat yang ada di wilayah perluasan, ini dapat dilihat antara lain dari pembangunan pasar lokal/lingkungan, sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2001 jumlah pasar lokal/lingkungan yang ada di wilayah perluasan Kota Sukabumi dari segi kuantitas tidak mengalami perubahan--, hal ini dapat diartikan bahwa tidak ada penambahan jumlah sarana perdagangan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Sukabumi, walaupun laju pertumbuhan penduduk di wilayah perluasan Kota Sukabumi mengalami peningkatan yang paling tinggi di Kota Sukabumi.

Memperhatikan pada temuan tersebut di atas, kiranya menarik untuk dilakukan *evaluasi* yang diarahkan pada --evaluasi kinerja pembangunan sarana pelayanan

masyarakat di wilayah perluasan Kota Sukabumi sejak diundangkannya PP No.3 tahun 1995--. Dalam evaluasi ini sarana yang diteliti merupakan jenis sarana yang masuk dalam kategori sarana pelayanan masyarakat yaitu --jenis sarana yang langsung dirasakan manfaat keberadaannya untuk melayani kebutuhan dasar (*basic needs*) sehari-hari masyarakat kota--.

1.2.Rumusan Permasalahan

Kelengkapan fasilitas sarana umum perkotaan di wilayah Kota Sukabumi lama dirasakan sudah cukup baik, namun akibat adanya penambahan penduduk yang cukup tinggi serta lahan kota yang dirasakan sempit maka, salah satu akibatnya adalah terjadinya pemusatan berbagai kegiatan dan fungsi Kota di wilayah tertentu terutama dikawasan pusat kota (*CBD*). Juga terjadi percampuran antara fungsi primer dan sekunder yang mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan dan terganggunya berbagai kegiatan yang ada. Akibat dari hal ini, dirasakan perlunya kebutuhan akan sarana dan prasarana baru bagi penduduk Kota Sukabumi yang terus berkembang, sehingga pada tahun 1995 ada kebijakan pengadaan perluasan wilayah Kota Sukabumi, dengan dikeluarkannya PP. No.3 Tahun 1995. Jika kita melihat proses pembangunan sarana pelayanan masyarakat di wilayah perluasan Kota Sukabumi, maka tidak dapat lepas dari struktur kota dan penataan fungsi-fungsi kota di kawasan kota lama. Secara umum, struktur kota di wilayah kota lama berpusat pada pada kawasan pusat kota yang mempunyai berbagai kegiatan utama perkotaan terutama fungsi pemerintahan, perdagangan dan jasa serta fungsi pendidikan dan rekreasi.

Seperti telah disampaikan pada subbab 1.1, pada satu sisi perluasan wilayah Kota Sukabumi dimaksudkan untuk pemerataan aktivitas-aktivitas masyarakat kota dan

untuk mewujudkan *visi* Kota Sukabumi sebagai pusat perdagangan dan pelayanan jasa terpadu dibidang pendidikan dan kesehatan, namun di sisi lain pembangunan sarana pelayanan masyarakat di wilayah perluasan belum optimal, salah satunya dapat diidentifikasi dengan jumlah pasar lokal dari tahun 1995 sampai dengan tahun 2001 yang tidak mengalami perubahan (*stagnant*)

Berdasarkan pada latar belakang dan uraian tersebut di atas maka rumusan masalah (*research question*) yang dapat diangkat dari studi ini adalah ***Bagaimanakah kinerja pembangunan sarana pelayanan masyarakat di wilayah perluasan Kota Sukabumi ?*** Dalam melakukan evaluasi ini, hanya pembangunan sarana pelayanan masyarakat yang berpijak pada perluasan Kota Sukabumi seperti diatur dalam PP. No.3 Tahun 1995 yang diundangkan pada tanggal 6 Februari 1995, dan sarana pelayanan masyarakat yang dimaksud dalam studi ini adalah sarana pelayanan masyarakat yang berfungsi sebagai penunjang untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sehari-hari yang terdiri dari :

- 1) Sarana perdagangan
- 2) Sarana pendidikan
- 3) Sarana kesehatan
- 4) Sarana peribadatan
- 5) Sarana rekreasi.

1.3. Tujuan dan Sasaran Studi

Berdasarkan pada latar belakang dan perumusan masalah sebagaimana diuraikan di atas, maka studi ini bertujuan untuk --melakukan evaluasi pembangunan sarana pelayanan masyarakat di wilayah perluasan Kota Sukabumi dilihat dari empat tujuan dan

maksud diadakannya perluasan kota sukabumi seperti yang tersirat dalam PP. No.3 Tahun 1995 serta visi Kota Sukabumi sebagai pusat perdagangan dan pelayanan jasa terpadu di bidang pendidikan dan kesehatan--.

Evaluasi kinerja pembangunan sarana pelayanan masyarakat akan dapat dicapai, apabila sasaran-sasaran studi yang akan dilakukan meliputi :

- 1) Mengidentifikasi jenis-jenis sarana pelayanan masyarakat yang dibangun oleh pemerintah kota dan/atau masyarakat.
- 2) Mengidentifikasi aspek-aspek penelitian yang akan diamati.
- 3) Melakukan penilaian kinerja pembangunan sarana pelayanan masyarakat yang ada di wilayah perluasan Kota Sukabumi berdasarkan aspek-aspek tersebut.
- 4) Melakukan komparasi antara kebutuhan (*demand*) dengan ketersediaan (*supplay*) sarana pelayanan masyarakat di wilayah perluasan Kota Sukabumi.
- 5) Mengidentifikasi tingkat pelayanan dan kelengkapan sarana pelayanan masyarakat di wilayah perluasan Kota Sukabumi.
- 6) Merumuskan hasil evaluasi dalam bentuk rencana strategi pembangunan sarana pelayanan masyarakat di wilayah perluasan Kota Sukabumi.

1.4. Manfaat Penelitian

Dari maksud dan tujuan penelitian yang ditetapkan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat (kegunaan) kepada :

- 1) Pemerintah Kota Sukabumi sebagai masukkan dalam tahapan perencanaan dan pengembangan di wilayah perluasan Kota Sukabumi.
- 2) Masyarakat kota yang akan terlibat langsung dalam pembangunan sarana umum perkotaan khususnya di wilayah perluasan Kota Sukabumi.

- 3) Sektor swasta yang akan mengadakan pembangunan sarana pelayanan masyarakat di wilayah perluasan Kota Sukabumi.

Pada akhirnya hasil yang diharapkan dalam studi ini yang berkaitan dengan Pendidikan Teknik Pembangunan Kota adalah :

- 1) Mengadakan penilaian terhadap keberhasilan konsep pemekaran kota/ perluasan wilayah kota terutama untuk kota-kota yang cukup besar/ sedang.
- 2) Dapat memberikan manfaat pada ilmu pengetahuan untuk bahan pertimbangan dan masukan bagi pengembangan wilayah perluasan kota lainnya, maupun pembentukan kota-kota baru sebagai implementasi dari UU. No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

1.5. Ruang Lingkup Studi

Berdasarkan pada tujuan, sasaran dan manfaat yang ingin di capai, maka ruang lingkup yang akan dibahas dalam studi ini dapat dijelaskan menjadi dua, yaitu ruang lingkup *substansial* dan ruang lingkup *spasial* :

1.5.1. Ruang Lingkup *Substansial*

Yang dimaksud dengan keberhasilan pencapaian tujuan pemekaran dan perluasan Kota Sukabumi pada tahun 1995, mencakup empat hal yang tersirat dalam PP. No. 3 Tahun 1995 yaitu :

- 1) Pemerataan konsentrasi aktivitas-aktivitas penduduk, sehingga mengurangi beban dan terpusatnya berbagai kegiatan di kawasan pusat kota.
- 2) Penambahan lahan untuk menyediakan kebutuhan akan ruang kota untuk berbagai proses pembangunan dan kebutuhan masyarakat Kota Sukabumi.

- 3) Terjadinya integrasi antara wilayah Kota Sukabumi dengan kawasan pinggiran Kota Sukabumi, sehingga akan dapat mengurangi pergerakan masyarakat (komuter) ke pusat kota dan Kota Sukabumi lama.
- 4) Penumbuhan aktivitas-aktivitas baru di kawasan pinggiran Kota Sukabumi, dengan membangun sarana pelayanan masyarakat untuk memenuhi dan melayani kebutuhan penduduk di wilayah perluasan itu sendiri dan wilayah sekitarnya.

Dengan maksud untuk memperjelas dan mempersempit permasalahan yang akan dibahas, maka perlu untuk membatasi permasalahan dengan aspek-aspek yang diteliti sebagai berikut :

- 1). Aspek ketersediaan sarana pelayanan masyarakat yang ada di wilayah perluasan Kota Sukabumi, komponen-komponen sarana pelayanan masyarakat yang dilihat adalah :
 - Jumlah sarana pelayanan masyarakat di wilayah perluasan Kota Sukabumi;
 - Jenis sarana pelayanan masyarakat di wilayah perluasan Kota Sukabumi.
- 2). Aspek kondisi sarana pelayanan masyarakat di wilayah perluasan Kota Sukabumi.
- 3). Aspek lokasi dan sebaran sarana pelayanan masyarakat di wilayah perluasan Kota Sukabumi, variabel yang dilihat adalah :
 - Sebaran sarana pelayanan masyarakat di wilayah perluasan Kota Sukabumi;
 - Jarak jangkauan ke sarana pelayanan masyarakat di wilayah perluasan kota.
- 4). Aspek arah dan frekuensi pergerakan masyarakat ke sarana pelayanan masyarakat, variabel yang dilihat adalah :
 - Arah pergerakan masyarakat di wilayah perluasan kota;

- Frekuensi pergerakan ke sarana pelayanan masyarakat yang ada di pusat kota dan di wilayah perluasan Kota Sukabumi.

Sedangkan objek pengamatan dalam penelitian ini mencakup lima sarana pelayanan masyarakat, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- 1). Visi dan misi Kota Sukabumi dalam Perda No.18 tahun 2000 tentang Propeda Kota Sukabumi tahun 2000-2004, sebagai pusat pelayanan jasa di bidang perdagangan, pendidikan dan kesehatan.
- 2). Pola Dasar Pembangunan Daerah dan RTRW Propinsi Jawa Barat tahun 1994-1999, bahwa Kota Sukabumi telah diarahkan sebagai wilayah penunjang tengah, dengan fungsi-fungsinya antara lain :
 - Fungsi Perumahan / Permukiman
 - Fungsi Pemerintahan
 - Fungsi Perdagangan dan Jasa
 - Fungsi Koleksi dan Distribusi Lokal
 - Fungsi Pariwisata.

Dari pertimbangan tersebut di atas, maka obyek yang akan diteliti dalam studi ini adalah sarana pelayanan masyarakat, yang terdiri dari :

- 1). Sarana Perdagangan, meliputi :
 - Sub terminal
 - Warung/toko
 - Pasar lingkungan/lokal
- 2). Sarana Pendidikan, meliputi :
 - TK
 - SD/MI
 - SLTP/SLTA
- 3). Sarana Kesehatan, meliputi :
 - Puskesmas

- Balai pengobatan/klinik
 - BKIA
- 4). Sarana Rekreasi, meliputi :
- Tempat olah raga
 - Taman bermain
- 5). Sarana Peribadatan, meliputi :
- Musholla/Langgar
 - Masjid

Adapun kelima sarana tersebut di atas adalah jenis sarana yang masuk dalam kategori --sarana pelayanan masyarakat yaitu jenis sarana yang langsung melayani dan dirasakan manfaat keberadaannya untuk melayani kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat kota--.

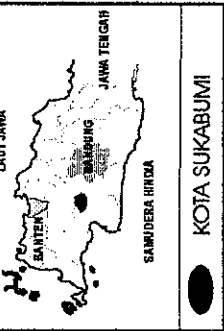
1.5.2. Ruang Lingkup *Spatial*

Untuk melihat dan mengadakan evaluasi (penilaian) kinerja terhadap pembangunan sarana pelayanan masyarakat di wilayah perluasan Kota Sukabumi, maka ada 18 kelurahan yang masuk dalam wilayah perluasan. Penyebaran 18 Kelurahan yang menjadi perluasan Kota Sukabumi tersebut terbanyak 14 kelurahan berada di sebelah Selatan kota, sebagian berada di sebelah Barat sebanyak dua kelurahan dan dua kelurahan di sebelah Timur.

Dalam Penelitian ini wilayah perluasan Kota Sukabumi yang menjadi areal penelitian diprioritaskan kepada wilayah yang menjadi kawasan permukiman baru atau kawasan perumahan baru dan untuk melakukan strategi pembangunan sarana pelayanan masyarakat dengan skala unit yang paling kecil untuk batas administrasi. Dengan melihat prioritas tersebut maka areal studi meliputi keseluruhan kelurahan yang berada di wilayah perluasan Kota Sukabumi, yaitu mencakup 18 kelurahan antara lain :

1. Kelurahan Babakan
2. Kelurahan Baros
3. Kelurahan Cibeureum Hilir
4. Kelurahan Cikundul
5. Kelurahan Cipanengah
6. Kelurahan Cisarua
7. Kelurahan Dayeuh Luhur
8. Kelurahan Jaya Mekar
9. Kelurahan Jaya Raksa
10. Kelurahan Karang Tengah
11. Kelurahan Lembur Situ
12. Kelurahan Limus Nunggal
13. Kelurahan Sindang Palay
14. Kelurahan Sindang Sari
15. Kelurahan Situ Mekar
16. Kelurahan Subang Jaya
17. Kelurahan Sudajaya Hilir
18. Kelurahan Sukakarya

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang ruang lingkup *spatial* yang diuraikan di atas, maka untuk wilayah Kota Sukabumi lama akan dibedakan dalam dua wilayah yaitu (1) Pusat Kota Sukabumi, meliputi Kelurahan Gunung Parang, Kelurahan Tipar dan Kelurahan Cikole dan (2) wilayah Kota Sukabumi lama dalam hal ini adalah kelurahan selain yang masuk dalam wilayah pusat kota. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada gambar Peta I.01 di bawah ini :



KOTA SUKABUMI



TESIS

**EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN SARANA
PELAYANAN MASYARAKAT DI WILAYAH PERLUASAN**

GAMBAR

PETA LOKASI PENELITIAN

- Batas Administrasi
- Batas Kecamatan
- Jalan Arteri Primer
- Batas Kelurahan
- Jalan Kereta Api
- Renc. J.L. Lingkar Selatan
- Lokasi Penelitian
- Pusat Kota Sukabumi



SKALA

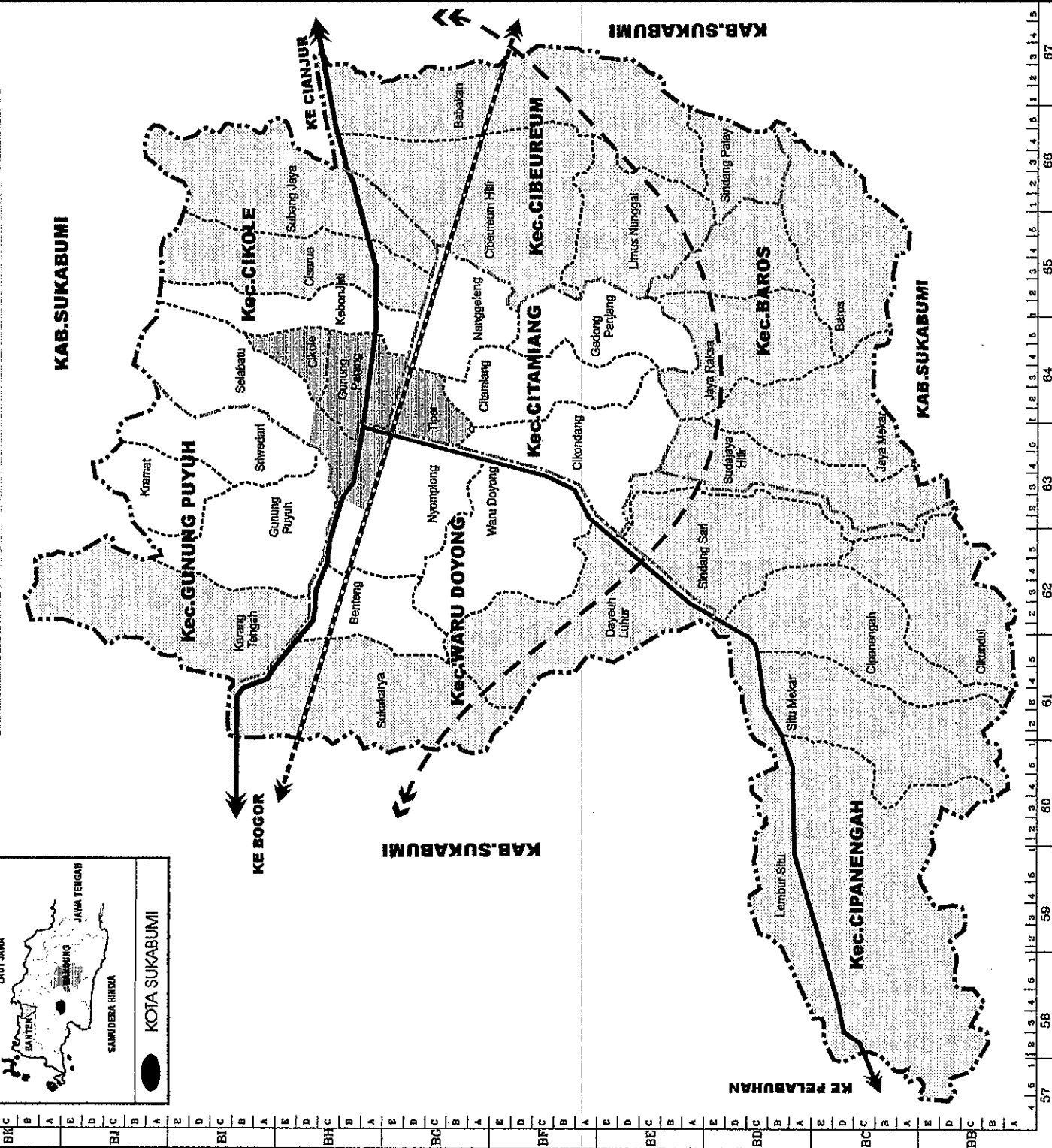
1:55.000

No. GAMBAR

L.01

SUMBER

HASIL ANALISA DATA 2002



1.6. Kerangka Pemikiran

Sebelum mengadakan studi mengenai evaluasi kinerja pembangunan sarana pelayanan masyarakat di wilayah perluasan Kota Sukabumi, maka sebelumnya perlu diketahui proses terjadinya pertumbuhan dan perkembangan kota, sebagai latar belakang pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi di kota-kota besar di Indonesia, demikian pula dengan Kota Sukabumi juga mengalami hal yang sama. Faktor internal seperti tingginya laju pertumbuhan penduduk Kota Sukabumi serta tingkat kepadatan yang tinggi yaitu 99 jiwa/hektar, demikian pula dengan tingginya tingkat urbanisasi yang masuk ke wilayah Kota Sukabumi terutama komuter dari wilayah pinggiran.

Visi dan misi Kota Sukabumi sebagai pusat pelayanan jasa terpadu di bidang perdagangan, pendidikan dan kesehatan sebagaimana ditetapkan dalam Perda. No.18 Tahun 2000 tentang Propeda Kota Sukabumi Tahun 2000-2004 serta adanya pengadaaan perluasan wilayah Kota Sukabumi Tahun 1995 berdasarkan PP. No.3 Tahun 1995, ini di latar belakang oleh pertumbuhan dan perkembangan Kota Sukabumi yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Jawa Barat yang telah diarahkan sebagai wilayah penunjang tengah, dengan fungsi-fungsinya antara lain :

- 1) Fungsi Perumahan/Permukiman
- 2) Fungsi Pemerintahan
- 3) Fungsi Perdagangan dan Jasa
- 4) Fungsi Koleksi dan Distribusi Lokal
- 5) Fungsi Pariwisata.

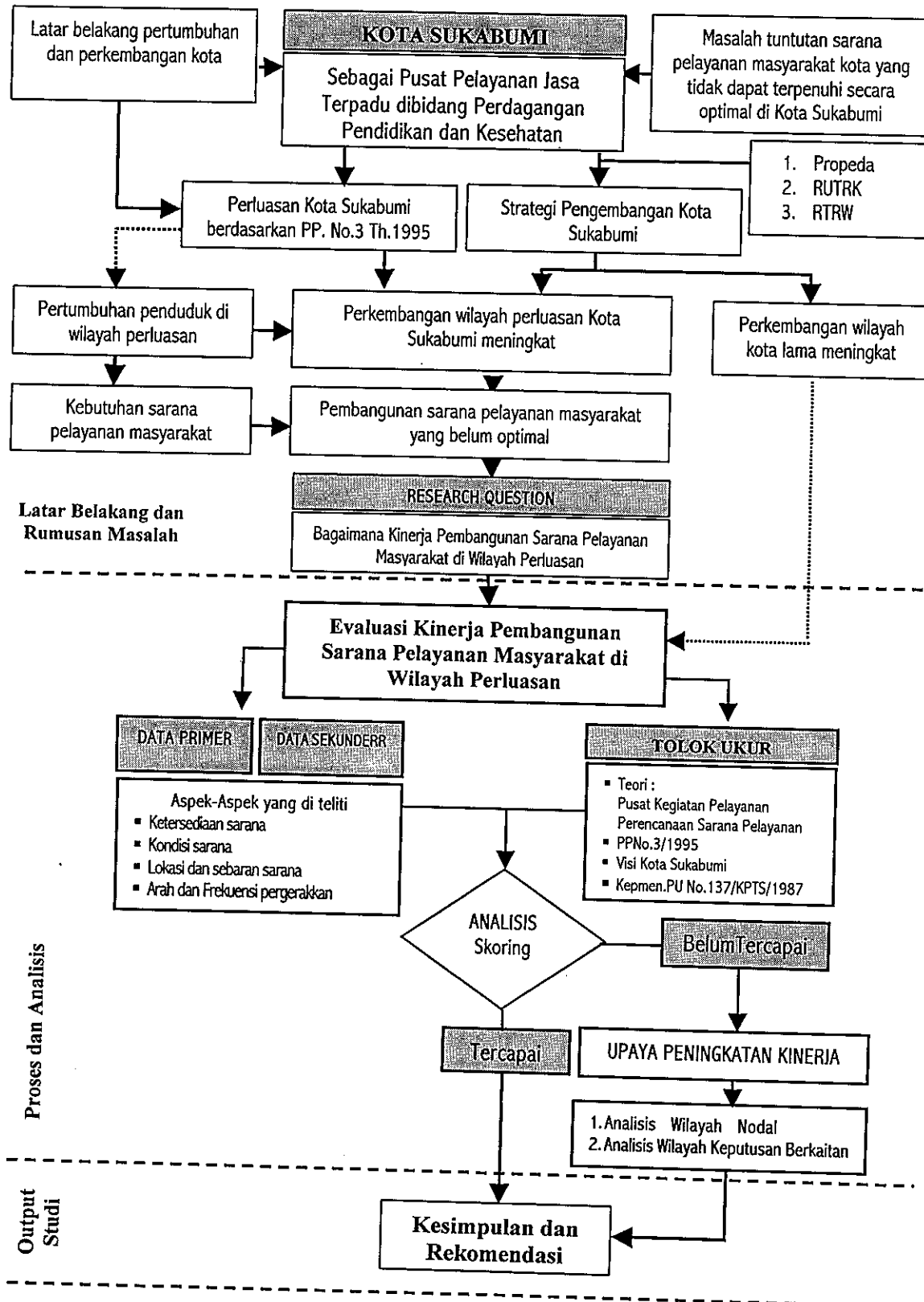
Prioritas pengembangan Kota Sukabumi mencakup dua pengembangan wilayah kota yaitu (1) Pengembangan wilayah kota lama dan (2) Pengembangan wilayah perluasan tahun 1995 berdasarkan PP. No.3 Tahun 1995. Bertitik tolak dari maksud dan tujuan diadakannya perluasan Kota Sukabumi seperti disebut di atas, maka untuk

mengadakan evaluasi terhadap pembangunan dan kondisi sarana pelayanan masyarakat pada wilayah perluasan, ada beberapa aspek yang diamati/diteliti dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Aspek ketersediaan sarana pelayanan masyarakat yang ada di wilayah perluasan Kota Sukabumi.
- 2) Aspek kondisi sarana pelayanan masyarakat di wilayah perluasan Kota Sukabumi.
- 3) Aspek lokasi dan sebaran sarana pelayanan masyarakat di wilayah perluasan Kota Sukabumi.
- 4) Aspek arah dan frekuensi pergerakan masyarakat ke sarana pelayanan masyarakat.

Untuk dapat memberikan gambaran yang lebih jelas, mengenai kerangka pemikiran evaluasi kinerja pembangunan sarana pelayanan masyarakat di atas, dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1
KERANGKA PEMIKIRAN EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN SARANA PELAYANAN MASYARAKAT DI WILAYAH PERLUASAN



1.7. Pendekatan Studi dan Metode Penelitian

1.7.1. Pendekatan Studi

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang mengevaluasi pembangunan sarana pelayanan masyarakat di wilayah perluasan Kota Sukabumi dilihat dari tujuan diadakannya perluasan wilayah Kota Sukabumi yang tersirat didalam PP. No.3 Tahun 1995 dan Visi Kota Sukabumi sebagai pusat pelayanan jasa terpadu di bidang perdagangan, pendidikan dan kesehatan. Penelitian ini merupakan penelitian *deskriptif analitis*. Dalam hal ini, pengertian *deskriptif*--tidak hanya sekedar menemukan data atau fakta dan kemudian menyajikannya dalam bentuk mentah, kemudian penafsirannya diserahkan kepada pembaca yang berminat, melainkan juga melakukan analisis serta menyajikan data dan fakta yang sudah terolah beserta penafsirannya--.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka untuk mengolah data dan penafsirannya akan dilakukan melalui beberapa pendekatan, yaitu :

- 1) Pendekatan keruangan (*spatial approach*), yaitu dengan memperhatikan penyebaran penggunaan ruang (*land use*) yang telah ada dan penyediaan ruang (lahan) yang akan digunakan untuk berbagai sarana pelayanan masyarakat di wilayah perluasan Kota Sukabumi.
- 2) Pendekatan komparatif (*comparatif approach*) dipergunakan untuk melakukan komparatif dengan membandingkan antara standar sarana pelayanan masyarakat dengan kondisi eksisting sarana pelayanan masyarakat di wilayah perluasan Kota Sukabumi.
- 3) Pendekatan pilihan strategis sebagai suatu dasar dalam upaya pengambilan keputusan penyelesaian masalah berdasarkan saling keterkaitan, keterkendalian, dampak yang ditimbulkan dan derajat kepentingan.

- 4) Pendekatan kebijakan publik, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendukung kebijakan atau membantu pengambil kebijakan memecahkan masalah sosial dengan jalan menyediakan rekomendasi yang berorientasi pada tindakan.

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Peralatan yang berupa peta, yang meliputi peta administrasi Kota Sukabumi, peta wilayah perluasan, penggunaan lahan, lokasi dan sebaran sarana pelayanan masyarakat di wilayah perluasan. Peta-peta tersebut digunakan dalam kajian awal wilayah penelitian dan penentuan lokasi dalam pengambilan sampel lapangan.
- 2) Kuesioner sebagai alat yang digunakan dalam pengambilan sampel untuk mendapatkan data primer.
- 3) Alat pemrosesan analisis kuantitatif dengan menggunakan komputer.

1.7.2. Metode Penelitian

1.7.2.1. Kebutuhan Data

- 1). Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya/ responden dengan melakukan wawancara langsung. Dalam wawancara langsung tersebut digunakan daftar pertanyaan (kuesioner) yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. Data-data yang ditanyakan berkaitan langsung dengan keadaan umum atau kondisi sarana, motivasi responden, jarak jangkauan responden ke sarana, lokasi dan jumlah sarana yang ada di wilayah perluasan serta arah pergerakan .
- 2). Data sekunder yaitu data yang bukan diusahakan sendiri dalam pengumpulannya, diperoleh dari instansi terkait, yang meliputi data jumlah pembangunan sarana pelayanan masyarakat, jumlah penduduk dalam area pelayanan dan data lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

Untuk lebih jelasnya mengenai kebutuhan data baik primer maupun sekunder, maka dapat dilihat pada **lampiran A.2**.

1.7.2.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui :

- 1) Dengan menggunakan kuesioner yang diajukan kepada responden, yaitu pengumpulan data yang menggunakan daftar pertanyaan yang sifatnya tertutup dan terbuka. Artinya jawaban kuesioner telah tersedia dan responden tinggal memilih beberapa alternatif yang telah disediakan, sedang pertanyaan terbuka untuk memperoleh penjelasan dari pilihan jawaban. Teknik ini digunakan dengan alasan untuk mempermudah dan mempercepat serta untuk menghemat tenaga dan waktu dalam mengumpulkan data primer dari responden.
- 2) Dokumentasi, yaitu teknik untuk mendapatkan data sekunder dengan cara mempelajari dan mencatat arsip-arsip atau data-data yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti sebagai bahan analisis data, misalnya jumlah penduduk, jumlah rumah tangga serta peraturan perundang-undangan yang dapat diperoleh dari dinas atau instansi terkait.

1.7.2.3. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang di maksud adalah berupa pengolahan data primer yang diperoleh langsung dari responden melalui kuesioner. Dalam proses pengolahan data ini meliputi kegiatan :

- 1) *Editing*, data yang masuk (*raw data*) diperiksa dan diteliti untuk menjaga kalau ada kesalahan dalam pengisian oleh jawaban responden, sehingga akan diperoleh

data yang valid, reliable dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dari beberapa pertanyaan akan diberi bobot/nilai yang telah ditentukan.

- 2) *Koding*, bertujuan untuk mengklasifikasikan jawaban-jawaban responden menurut jenisnya.
- 3) *Tabulating*, Jawaban-jawaban yang serupa dikelompokkan dengan cara yang teliti dan teratur, kemudian dihitung dan dijumlahkan banyaknya peristiwa, gejala maupun items yang masuk dalam kategori.
- 4) Penyajian data yaitu data kualitatif yang disajikan dalam bentuk titik, garis dan angka yang ditujukan untuk memperlihatkan tampilan proses studi langsung pada gambaran wilayah studi dalam bentuk peta, tabel dan gambar.

1.7.2.4. Teknik Sampling

Dalam menentukan teknik pengambilan sampel yang akan digunakan dalam suatu penelitian, ada tiga hal yang harus diperhatikan yaitu tenaga, biaya dan waktu. Dalam suatu penelitian biasanya populasi yang diteliti banyak jumlahnya, sehingga kita tidak mungkin mampu meneliti semuanya. Untuk itu diperlukan penarikan beberapa sampel atau contoh dari populasi tersebut. Sampel merupakan contoh atau wakil dari suatu populasi yang cukup besar jumlahnya, yaitu satu bagian dari keseluruhan yang dipilih dan representatif sifatnya.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penduduk di daerah perluasan Kota Sukabumi dan sebagai unit analisis adalah rumah tangga yang ada di wilayah perluasan. Adapun sebagai responden dalam penelitian ini adalah kepala rumah tangga. Untuk menentukan jumlah sampel menurut Nasution (1995:101), pada prinsipnya tidak ada peraturan yang tegas secara mutlak menentukan berapa persen

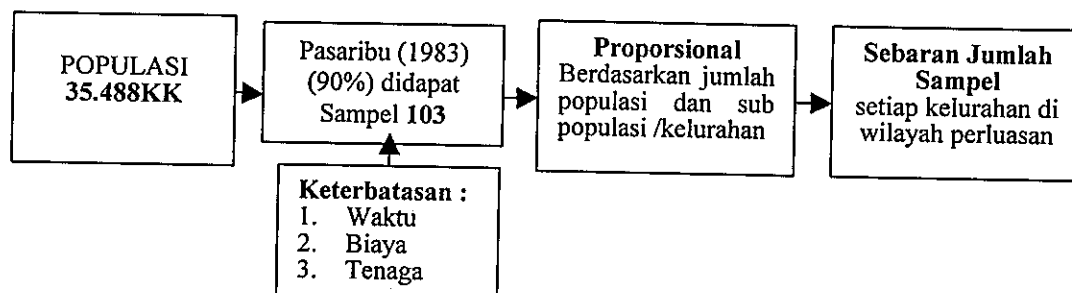
sampel tersebut harus diambil dari suatu populasi. Dalam penelitian ini teknik sampling yang dipergunakan adalah *simple random sampling* yaitu pengambilan sampel sederhana secara acak tanpa memperhatikan strata dengan asumsi populasi adalah homogen. Jumlah sampel yang diambil dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut (Pasaribu:1983) :

$$n = \frac{N}{Nd^2 + 1}$$

Keterangan :
n : Jumlah Sampel
N : Jumlah Populasi
d : Derajat kepercayaan (level of significant).....(1)

Dengan jumlah populasi sebesar 35.448 KK dan derajat kepercayaan (*significant*) 90%, maka --sampel yang diperoleh adalah sebesar 103 responden--. Untuk menjaga obyektifitas dan validitas data, maka dalam penelitian ini 18 kelurahan yang ada di wilayah perluasan Kota Sukabumi secara keseluruhan akan dijadikan sebagai obyek penelitian, jumlah sampel yang akan disebarkan disetiap kelurahan diambil secara proposional dari jumlah populasi dan sub populasi (kelurahan), sehingga didapatkan untuk penyebaran jumlah sampel sebagaimana dalam lampiran A.3. Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 1.2 di bawah.

Gambar 1.2
**TEKNIK SAMPLING DAN SEBARAN SAMPEL
 DI WILAYAH PERLUASAN KOTA SUKABUMI**



Sumber : Hasil Analisis, 2002

1.7.2.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisa yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah secara deskriptif analisa kualitatif yang didukung data analisa kuantitatif, dari data kuantitatif yang telah diperoleh berupa skore atau nilai sebagai data primer kemudian dianalisa dan disajikan dalam tabulasi, dalam analisa data penelitian ini maka data akan dikelompokkan dalam tabel frekuensi dan tabulasi untuk dilakukan penilaian. Dalam melakukan analisa kuantitatif ini ada beberapa pendekatan yang digunakan, antara lain :

1). Pendekatan *value* and *weight* dengan menggunakan metode analisis skoring

Analisis skoring digunakan untuk memberikan penilaian terhadap indikator-indikator setiap variabel sehingga dapat diketahui masing-masing parameter yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk mempermudah pelaksanaan penilaian terhadap parameter-parameter dari --ketersediaan sarana pelayanan masyarakat, kondisi sarana pelayanan masyarakat, sebaran dan lokasi sarana pelayanan masyarakat serta arah dan frekuensi pergerakan-- maka digunakan skala penilaian untuk masing-masing parameter tersebut.

Dalam penilaian ini, masing-masing parameter tersebut mempunyai ukuran yang sama sehingga penilaiannya dapat dilakukan dengan menjumlahkan angka dari masing-masing parameter tersebut. Cara ini disebut dengan *judgment of similarity* (Rankin, 1983:6). Dengan cara ini, ukuran masing-masing parameter tersebut dinyatakan dalam obyek psikologi yang bentuknya dapat berupa segala sesuatu yang berkaitan dengan rasa yang menghasilkan pengaruh kognitif misalnya rasa puas dan tidak puas, baik dengan tidak baik dan lain sebagainya.

Skala penilaian untuk masing-masing parameter harus simetris dengan kondisi netral (*moderate*). Dalam penelitian ini pemberian skoring dilakukan secara bertingkat

yang dibedakan berdasarkan kontribusi sifat kriteria masing-masing faktor, semakin tinggi pengaruhnya terhadap faktor maka semakin besar nilainya/skore. Agar dapat dipakai sebagai data yang mudah untuk dianalisa dan disimpulkan sesuai dengan masalah yang dikemukakan, maka penyebaran nilai-nilai tersebut perlu diringkas dalam suatu distribusi frekuensi dengan tidak mengurangi obyektivitas hasil penelitian, yaitu dengan suatu daftar yang --membagi data yang ada ke dalam lima kategori --, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel I.1 berikut.

Tabel I.1
KRITERIA PENILAIAN DAN PEMBOBOTAN UNTUK DATA PRIMER

NO	VARIABEL	PARAMETER	BOBOT	SKOR				
				A	B	C	D	E
1.	Arah pergerakan sebelum perluasan	Di pusat Kota Sukabumi	5	5	4	3	2	1
		Di wilayah Kota Sukabumi lama.	4					
		Di wilayah perluasan Kota Sukabumi	3					
		Di luar Kota Sukabumi termasuk dalam Kabupaten Sukabumi	2					
		Di luar Kota dan Kabupaten Sukabumi	1					
2	Arah pergerakan sesudah perluasan	Di wilayah perluasan Kota Sukabumi	5	5	4	3	2	1
		Di wilayah Kota Sukabumi lama	4					
		Di pusat Kota Sukabumi	3					
		Di luar Kota Sukabumi termasuk dalam Kabupaten Sukabumi	2					
		Di luar Kota dan Kabupaten Sukabumi	1					
3.	Jarak Jangkau ke Sarana	Dekat sekali (< 300 m, < 5 menit)	5	5	4	3	2	1
		Dekat (300-600 m, 5 - 10 menit)	4					
		Sedang (601-1500 m, 11 - 20 menit)	3					
		Jauh (1,5 km -3 km, 21 - 40 menit)	2					
		Jauh sekali (>3 km, > 40 menit)	1					
4.	Lokasi sarana sebelum perluasan	Di lingkungan sekitar tempat tinggal (RT/RW)	1	1	2	3	4	5
		Di lingkungan kelurahan setempat	2					
		Di luar lingkungan tempat tinggal di kecamatan yang sama.	3					
		Di wilayah Kota Sukabumi lama	4					
		Di pusat Kota Sukabumi	5					
5.	Lokasi sarana sesudah perluasan	Di lingkungan sekitar tempat tinggal (RT/RW)	5	5	4	3	2	1
		Di lingkungan kelurahan setempat	4					
		Di luar lingkungan tempat tinggal di kecamatan yang sama.	3					
		Di wilayah Kota Sukabumi lama	2					
		Di pusat Kota Sukabumi	1					
6.	Frekuensi ke pusat kota	Sangat sering (1-3 kali sehari)	1	1	2	3	4	5
		Sering (1 kali sehari)	2					
		Cukup sering (2-3 kali seminggu)	3					
		Kurang (1 kali seminggu)	4					
		Jarang (2-3 kali sebulan)	5					

Lanjutan Tabel I.1

NO	VARIABEL	PARAMETER	BOBOT	SKOR				
				A	B	C	D	E
7.	Kondisi sarana pelayanan masyarakat	Sangat baik, apabila fasilitas ditiap permukiman sangat memadai, tidak perlu perbaikan dan letaknya sudah tepat.	5	5	4	3	2	1
		Baik, apabila fasilitas ditiap permukiman memadai, tidak perlu perbaikan dan letaknya sudah tepat.	4					
		Cukup, apabila fasilitas ditiap permukiman kurang, tidak perlu perbaikan dan letaknya tidak tepat.	3					
		Kurang baik, apabila fasilitas ditiap permukiman kurang, perlu perbaikan serta letaknya tidak tepat.	2					
		Buruk, apabila fasilitas ditiap permukiman sangat kurang, perlu perbaikan serta letaknya tidak tepat.	1					

Sumber : Hasil Analisis Data, 2002

Tabel I.2
KRITERIA PENILAIAN DAN PEMBOBOTAN
UNTUK DATA SEKUNDER

NO	VARIABEL	PARAMETER	BOBOT	SKOR				
				A	B	C	D	E
1.	Ketersediaan sarana pelayanan	Sangat memadai, apabila rasio permintaan terhadap kondisi eksisting bernilai > 1	5	5	4	3	2	1
		Memadai, apabila rasio permintaan terhadap kondisi eksisting bernilai $0,76 - 1$	4					
		Cukup, apabila rasio permintaan terhadap kondisi eksisting bernilai $0,51 - 0,75$	3					
		Kurang, apabila rasio permintaan terhadap kondisi eksisting bernilai $0,25 - 0,50$	2					
		Sangat kurang, apabila rasio permintaan terhadap kondisi eksisting bernilai $< 0,25$	1					
2.	Lokasi sarana pelayanan masyarakat	Sangat Dekat, apabila letaknya masih dalam lingkungan permukiman (RT/RW) dan kelurahan.	5	5	4	3	2	1
		Dekat, apabila letaknya masih dalam lingkungan satu kelurahan.	4					
		Sedang, apabila letaknya masih dalam lingkungan satu kecamatan yang sama.	3					
		Jauh, apabila letaknya di luar kecamatan masih dalam wilayah perluasan.	2					
		Sangat Jauh, apabila letaknya di wilayah Kota sukabumi lama	1					

Sumber : Hasil Analisis Data, 2002

Dengan sistem tersebut di atas pada hasil akhir penilaian dapat diketahui nilai sebagai hasil penjumlahan. Untuk memudahkan memberikan ukuran penilaian maka faktor utama kinerja pembangunan sarana pelayanan masyarakat diklasifikasikan ke

dalam rentang nilai. Dalam hal ini yang menjadi besaran nilai faktor utama adalah nilai score yang sudah dikonversikan ke dalam rentang besaran nilai berdasarkan pengklasifikasian nilai untuk menganalisis --ketersediaan sarana pelayanan masyarakat, kondisi sarana pelayanan masyarakat, lokasi dan sebaran sarana pelayanan masyarakat serta arah dan frekuensi pergerakan masyarakat ke sarana pelayanan--, sehingga akan diketahui kinerja dari masing-masing sarana pelayanan masyarakat, dengan rumus sebagai berikut (Sugiyono : 1999) :

$I = \frac{\Delta \delta}{n}$	<p>Dimana</p> <p>I : Panjang rentang nilai</p> <p>$\Delta \delta$: Selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum</p> <p>n : Jumlah klasifikasi</p> <p>.....(2)</p>
-------------------------------	---

2) Pendekatan wilayah Nodal dengan menggunakan metode indeks sentralitas

Metode indeks sentralitas pertama kali diperkenalkan oleh Grove dan Huzer (1964), untuk mengetahui keterpusatan suatu tempat. Metode ini didasarkan pada keterbatasan sejumlah data yang meliputi keadaan alam maupun jumlah pelayanan dan fasilitas yang ada dicalon lokasi permukiman. Total nilai atau bobot fungsi-fungsi ini disebut sebagai score sentralitas yang mencerminkan indeks lokasi.

Analisa terhadap ketersediaan sarana pelayanan masyarakat dimaksudkan untuk mengetahui tingkat pelayanan permukiman dalam hal ini kelurahan. Indeks sentralitas dipakai untuk menilai jumlah unit setiap jenis sarana pelayanan masyarakat disuatu kelurahan dibandingkan dengan kelurahan lain. Dimaksudkan sebagai ketersediaan berbagai fasilitas pelayanan kebutuhan merupakan nilai keterpusatan fasilitas tersebut merupakan indikator yang dapat menunjukkan kemampuan pelayanan suatu permukiman, sehingga --semakin tinggi nilai keterpusatan suatu sarana pelayanan maka

semakin tinggi kemampuan pelayanan--. Adapun prosedur perhitungan indeks sentralitas adalah sebagai berikut (Rodinelli, 1985) :

- 1) Membuat urutan kelurahan berdasarkan jumlah penduduk pada sebelah kiri tabel.
- 2) Membuat ukuran sarana pelayanan masyarakat berdasarkan kepentingannya.
- 3) Mengisi kolom-kolom baris dan kolom berdasarkan fasilitas yang ada sehingga akan membentuk matriks baris dan kolom.
- 4) Menjumlahkan tiap kolom dan baris yang ada pada matriks tersebut.
- 5) Menggunakan asumsi untuk jumlah dari seluruh pelayanan merupakan nilai sentralitas gabungan. Dalam hal ini digunakan asumsi angka 100 karena jumlah unit sarana pelayanan masyarakat yang ada hanya mencapai angka 100. Selanjutnya menggunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui bobot masing-masing atribut sarana pelayanan masyarakat. Setelah dilakukan perhitungan dengan indeks sentralitas selanjutnya.
- 6) Menambahkan dua baris dan satu kolom pada matriks tersebut, fungsinya untuk :
 - a) Baris pertama untuk nilai sentralitas gabungan
 - b) Baris kedua untuk nilai sentralitas fasilitas ($c=t/T$)
 - c) Kolom untuk nilai keterpusatan fasilitas
- 7) Menyusun kelurahan yang ada berdasarkan nilai keterpusatan fasilitas, semakin tinggi jumlahnya maka kelurahan tersebut *hierarki*-nya semakin tinggi atau berada pada urutan paling atas.

Dalam studi ini diperhitungkan sentralitas didasarkan pada kedekatan yang dikemukakan oleh Marshall, dengan rumus sebagai berikut (Rodinelli, 185) :

$$C = \frac{t}{T}$$

Dimana :

- C : Bobot dari atribut fungsional
- t : Nilai sentralitas gabungan
- T : Jumlah total atribut fasilitas

.....(3)

- 3) Pendekatan pilihan strategis dengan metode analisis wilayah keputusan berkaitan (*analysis of interconnected decision area*).

Pilihan startegis atau *strategic choice* dikembangkan berdasarkan pengalaman di Kota Coventry, Inggris. Penelitian pengembangan sebagai suatu teknik analisis dimulai sejak dekade 60-an. Analisis penentuan pilihan strategis merupakan suatu kegiatan yang rasional yang sifatnya berkesinambungan (*continuous*). Oleh karena itu penentuan pilihan strategis ini dilakukan dengan suatu rangkaian kegiatan berproses yang disebut sebagai proses pilihan strategis, dalam pengambilan keputusan terhadap masalah tersebut secara cepat (*scanning analisis*) sebagai suatu analisis dan eksplorasi pendahuluan. Essensi pilihan strategis diarahkan untuk memperoleh pertimbangan pembuatan keputusan, perumusan pola kebijaksanaan dan perencanaan kota yang berupa tindakan. Pada hakikatnya pilihan strategis didasarkan kepada (Sudjarto, 2001:7) :

- 1) Saling keterkaitan dari masalah yang harus diputuskan yang dicirikan sebagai strategi, dan adanya ketidak pastian sebagai sumber dari berbagai kesukaran-kesukaran untuk menetapkan suatu keputusan.
- 2) Keterkendalian pilihan memberikan arti tidak sekedar menentukan rentang dari alternatif pemecahan masalah, tetapi suatu pilihan yang lebih luas yang akan mengimbangi kebutuhan mendesak dengan yang memerlukan waktu penelaahan lebih lama, antara sesuatu yang pasti dengan yang tidak pasti.
- 3) Berdampak, memberikan arti suatu dinamika pengambilan keputusan dimana pemecahan masalah mendesak dikaitkan dengan usaha pemecahan masalah serta dampak yang lebih luas.
- 4) Derajat kepentingan, di dalam penentuan keputusan dalam kenyataannya akan dipengaruhi oleh unsur-unsur penentu yaitu unsur pembuat kebijakan

(Pemerintah Daerah dan DPRD), masyarakat yang berkepentingan dan perencanaan kota.

Salah satu bentuk analisis pilihan strategis adalah Analisis Wilayah Keputusan Berkaitan (AWKB). Secara konseptual AWKB ini didasari oleh dua unsur pokok yaitu ditetapkannya --wilayah-wilayah keputusan (*decision areas*) dan keterkaitan (*interconnected area*)--. Wilayah keputusan adalah suatu lingkup keputusan (kelurahan-kelurahan) yang mengandung seperangkat pilihan alternatif pemecahan masalah (sarana pelayanan masyarakat) yang akan menjadi pertimbangan pembuat keputusan. Keterkaitan keputusan diartikan sebagai suatu kenyataan bahwa bagi setiap keputusan yang diambil di suatu wilayah perencanaan akan terkait kepada berbagai keputusan yang diambil di wilayah perencanaan lainnya (kelurahan sekitarnya).

Tahapan proses teknis AWKB dalam perencanaan pengembangan suatu wilayah kota dijelaskan (Sujarto, 2001:30) sebagai berikut :

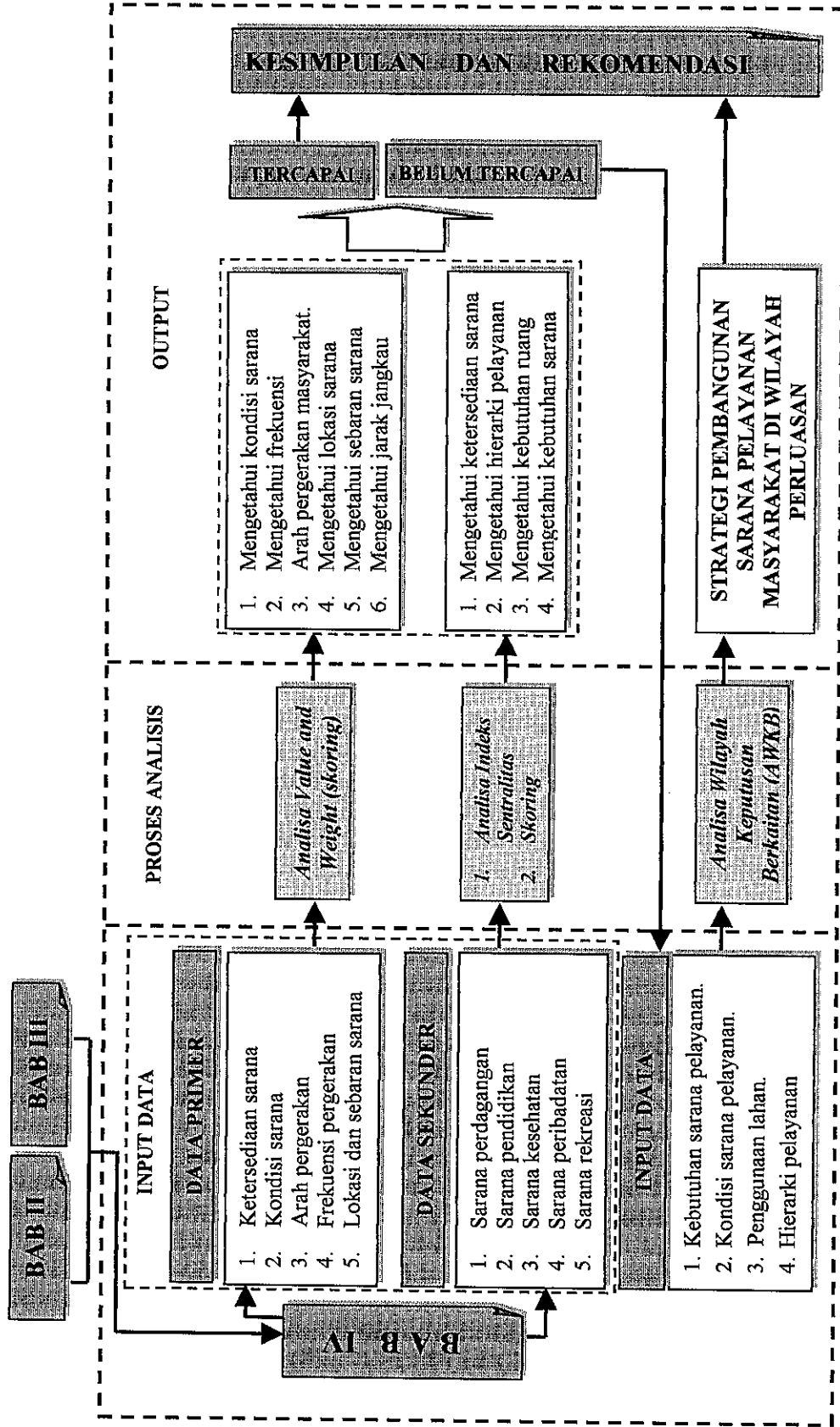
- 1) Mengidentifikasi kebijakan penetapan kegiatan kota berdasarkan perumusan pada rencana pembangunan kota (RTRW dan RDTRK), hasilnya adalah identifikasi wilayah-wilayah keputusan (*decision areas*).
- 2) Mengidentifikasi berbagai pilihan layak dari setiap wilayah keputusan tersebut di atas, hasilnya adalah identifikasi berbagai cara penyelesaian masalah berdasarkan wilayah keputusan.
- 3) Mengidentifikasi pilihan-pilihan layak, dalam setiap wilayah keputusan di atas yang tidak berkesesuaian (*incompatible*) satu dengan yang lainnya.
- 4) Menetapkan semua pasangan pilihan yang berkesesuaian (*compatible*) yaitu yang dapat dikombinasikan tanpa akan menimbulkan konflik kepentingan,

konflik kesesuaian lahan, konflik penggunaan lahan, fungsional kegiatan, kemacetan/persaingan fungsional yang tidak sehat.

- 5) Menetapkan cara dan urutan penyelesaian masalah dan alokasi ruang dengan berdasarkan kepada hasil penetapan pasangan pilihan layak pemecahan masalah atau pengembangan yang berkesesuaian sebagaimana yang ditetapkan pada analisis dalam langkah keempat di atas.

Secara terinci untuk analisis data di atas dapat dilihat pada Gambar 1.2 Alur Proses Analisa Data di bawah ini.

Gambar 1.2
ALUR PROSES ANALISA DATA



Sumber : Hasil Analisa Data, 2002

1.8. Sistematika Penulisan

Tesis ini disajikan dalam lima bab, yang terbagi atas Bab Pendahuluan, Kajian Teori, Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Analisis Data dan Bab Penutup dengan penekanan kepada hal-hal sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab Pendahuluan ini dituliskan latar belakang mengapa penulis berketetapan untuk mengambil penelitian evaluasi kinerja pembangunan sarana pelayanan masyarakat sebagai objek penelitian dalam penyusunan Tesis. Dari latar belakang ini kemudian dirumuskan permasalahan yang akan diteliti secara mendalam, tujuan dan sasaran, ruang lingkup penelitian baik substansi maupun spatial, pendekatan studi dan metode penelitian serta sistematika penulisan Tesis.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab Kajian Pustaka berisi teori-teori yang diharapkan bisa dipakai untuk memecahkan permasalahan yang ada (menjawab secara teoritis atas permasalahan yang ada). Diakhir Bab II dibuatkan ringkasan teorinya, sehingga menjadi lebih jelas dan variabel-variabel apa saja yang mendukungnya.

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Berisi uraian/penjelasan singkat tentang lokasi penelitian yaitu gambaran umum Kota Sukabumi yang mencakup kondisi fisik daerah, pemanfaatan lahan, jumlah penduduk dan sebaran penduduk. Gambaran umum wilayah perluasan berdasarkan PP. No.3 Tahun 1995 yang mencakup jumlah dan sebaran penduduk, jumlah ketersediaan sarana pelayanan masyarakat di wilayah perluasan Kota Sukabumi.

BAB IV EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN SARANA PELAYANAN MASYARAKAT DI WILAYAH PERLUASAN.

Bab empat ini akan melakukan penilaian kinerja pembangunan sarana pelayanan masyarakat di wilayah perluasan Kota Sukabumi berdasarkan aspek-aspek yang telah ditentukan, melakukan komparasi antara kebutuhan dengan ketersediaan sarana pelayanan masyarakat serta menilai tingkat pelayanan dan kelengkapan sarana pelayanan masyarakat, kemudian dari hasil penilaian itu akan digunakan untuk melakukan analisis wilayah keputusan berkaitan (AWKB).

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dalam Bab IV ini, dikemukakan tentang temuan-temuan hasil penelitian sebagai hasil dari evaluasi kinerja pembangunan sarana pelayanan masyarakat yang akan digunakan sebagai rekomendasi kepada Pemerintah Daerah Kota Sukabumi untuk pengembangan wilayah perluasan.

BAB II

PERKEMBANGAN KOTA DAN PEMBANGUNAN SARANA PELAYANAN MASYARAKAT

Pertumbuhan kota yang cepat, secara langsung berdampak pada pembangunan infrastruktur dasar dan pelayanan publik. Berbagai sarana dan prasarana yang dibangun baik oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat terasa masih kurang dengan jumlah penduduk yang sekarang. Terutama dapat dilihat pada kurangnya pelayanan air bersih, sistem sanitasi yang baik, pengelolaan sampah, pengelolaan limbah, penyediaan rumah dan sistem transportasi yang baik untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan kota, serta sebab lain yang meminta perhatian bagi pemerintah dan masyarakat sendiri yakni turunnya kualitas pemukiman dan lingkungan. Hal-hal tersebut di atas menyebabkan timbulnya permasalahan di perkotaan terutama bagi negara-negara yang sedang berkembang.

Upaya untuk memberikan pelayanan yang baik dan menjangkau seluruh kelompok masyarakat kota yang bersifat heterogen sebenarnya adalah tugas pemerintah, namun karena keterbatasan baik terbatasnya personel, peralatan dan biaya menyebabkan pelayanan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari kurang optimal.

Pertumbuhan penduduk dan perkembangan kegiatan perkotaan (sosial-ekonomi) juga merupakan salah satu petunjuk untuk menjelaskan hubungan pertumbuhan kota dengan peningkatan kebutuhan fasilitas. Perkembangan kegiatan perkotaan dalam hubungannya dengan peningkatan kebutuhan fasilitas akan terlihat pada kebutuhan yang

diperlukan oleh penduduk kota tersebut, biasanya kebutuhan kota meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk.

Seperti diketahui, kegiatan yang paling dominan di perkotaan adalah kegiatan perdagangan, pemerintahan, perindustrian dan transportasi. Perkembangan kegiatan di perkotaan akan menunjukkan trend yang meningkat dari tahun ketahun. Penyebaran kegiatan industri di perkotaan biasanya terletak di sepanjang jalan utama kota dan di bagian pinggiran kota. Perkembangan sektor perdagangan formal suatu kota, secara fisik dapat dilihat dengan berkembangnya bangunan perdagangan atau pertokoan baik secara horisontal maupun vertikal seperti pusat-pusat perbelanjaan, pasar modern, toko serba ada dan kantor-kantor dagang. Sedangkan untuk bangunan pelayanan umum yang berkembang adalah bangunan tempat berlangsungnya kegiatan pelayanan umum (kecuali bangunan perdagangan) seperti gedung pemerintahan, hotel, bank, asuransi, langgar/ musholla, masjid dan sekolah.

2.1. Pertumbuhan dan Perkembangan Kota

Kota memiliki pengertian yang beragam tergantung pada sudut pandang dan bidang kajian yang dilakukan. Namun secara umum beberapa unsur yang terdapat pada pengertian kota adalah kawasan pemukiman dengan jumlah dan kepadatan penduduk yang relatif tinggi, memiliki luas areal terbatas, pada umumnya bersifat non agraris. Tempat sekelompok orang-orang dalam jumlah tertentu dan bertempat tinggal bersama dalam suatu wilayah geografis tertentu cenderung berpola hubungan rasional, ekonomis dan *individualistis* (Kamus Tata Ruang, 1997:52).

Perkembangan dan pertumbuhan kota berjalan sangat dinamis, menurut Branch (1995:37) beberapa unsur yang mempengaruhi perkembangan kota antara lain adalah :

- 1) Keadaan geografis, yaitu pengaruh letak geografis terhadap perkembangan fisik dan fungsi yang diemban oleh kota. Kota pantai misalnya akan berkembang secara fisik pada bagian daratan yang berbatasan dengan laut dengan perkembangan awal di sekitar pelabuhan. Oleh karenanya kota demikian memiliki fungsi sebagai kota perdagangan dan jasa serta sebagai simpul distribusi jalur transportasi pergerakan manusia dan barang.
- 2) Tapak (*site*) merujuk pada topografi kota. Sebuah kota akan berkembang dengan memperhitungkan kondisi kontur permukaan bumi. Dengan demikian pembangunan sarana dan prasarana kota akan menyesuaikan dengan topografinya agar bermanfaat secara optimal.
- 3) Fungsi yang diemban kota, yaitu aktivitas utama atau yang paling menonjol yang dijalankan oleh kota tersebut. Kota yang memiliki banyak fungsi, seperti fungsi ekonomi dan kebudayaan, akan lebih cepat perkembangannya daripada kota berfungsi tunggal.
- 4) Sejarah dan kebudayaan yang melatarbelakangi terbentuknya kota juga berpengaruh terhadap perkembangan kota, karena sejarah dan kebudayaan mempengaruhi karakteristik fisik dan masyarakat kota.
- 5) Unsur-unsur umum, yaitu unsur-unsur yang turut mempengaruhi perkembangan kota, seperti bentuk pemerintahan dan organisasi administratif, jaringan transportasi, energi, pelayanan sosial serta pelayanan lainnya.

Sedangkan pertumbuhan kota lebih cenderung dianalisis dari pertumbuhan penduduk perkotaan. Kesemua unsur tersebut saling berkaitan dan saling mempengaruhi, serta dalam tampilan fisik tercermin dari bentukan fisik perkotaan yang mengemban fungsi-fungsi tertentu. Dimensi perkembangan dan pertumbuhan kota dapat ditinjau dari

pengaruh pertumbuhan penduduk perkotaan terhadap perkembangan kota. Konsep ini melihat peningkatan jumlah penduduk perkotaan dan pengaruh yang ditimbulkannya sebagai suatu proses yang disebut urbanisasi.

Urbanisasi dan permasalahan yang ditimbulkannya senantiasa menjadi pusat perhatian dalam setiap diskusi tentang perkembangan dan pertumbuhan kota-kota di dunia ketiga. Konsep urbanisasi dapat dipahami dalam berberapa pengertian. Urbanisasi dapat diartikan sebagai proses pengkotaan, baik dalam perspektif sosial, yaitu tingkah laku penduduknya, maupun dalam perspektif wilayahnya, yaitu meluasnya kawasan terbangun dengan ciri perkotaan (Khairuddin, 1992:211). Konsep urbanisasi dalam pengertian seperti ini merupakan suatu proses yang digerakkan oleh perubahan-perubahan struktural dalam masyarakat, sehingga daerah-daerah yang dulu merupakan daerah pedesaan dengan struktur mata pencaharian bersifat agraris lambat laun memperoleh sifat kehidupan kota. Sedangkan konsep lain dari urbanisasi ialah adanya perpindahan penduduk dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan.

Menurut Bintarto (1983:21) urbanisasi ditinjau dari konsep keruangan (*spatial*) dan ekologis sebagai suatu gejala geografis. Konsep ini didasarkan adanya gerakan atau perpindahan penduduk dalam suatu wilayah atau perpindahan penduduk keluar suatu wilayah tertentu. Gerakan atau perpindahan penduduk yang terjadi tersebut disebabkan adanya salah satu komponen dari ekosistemnya yang kurang atau tidak berfungsi secara baik, sehingga terjadi ketimpangan dalam ekosistem setempat, serta terjadinya adaptasi ekologis yang baru bagi penduduk yang pindah dari daerah asalnya ke daerah yang baru (perkotaan).

Dari pengertian tersebut di atas dapat digambarkan bahwa urbanisasi merupakan perpindahan penduduk dari desa ke kota dengan tujuan mencari pekerjaan (migran

potensial). Migran tersebut di desanya mempunyai interaksi dengan lingkungan fisik dan sosial atau lingkungan manusia yang kemudian menjalin interaksi baru dengan lingkungan tujuannya. Kedua unsur tersebut menyediakan berbagai kemungkinan cara hidup bagi para migran potensial tergantung pada tingkat kemampuan masing-masing. Hal ini dipengaruhi faktor indogen dan eksogenya. Dari proses sosial, ekonomi, psikologi dan kultur, muncul dua macam migran potensial yang masing-masing memiliki energi potensial dan energi kinetik. Migran dengan energi potensial dipengaruhi oleh pihak luar sedangkan migran dengan energi kinetik dipengaruhi oleh dirinya sendiri.

Sejalan dengan konsep tersebut di atas, pengertian urbanisasi menurut geografer De Brujine (Daldjoeni, 1992:41) dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- 1) Perkembangan prosentase penduduk yang bertempat tinggal di perkotaan, baik secara modial, nasional maupun regional.
- 2) Bertambahnya penduduk yang bermata pencaharian non agraris di pedesaan.
- 3) Tumbuhnya suatu pemukiman menjadi kota.
- 4) Mekarnya atau meluasnya struktur artefaktial morfologis suatu kota ke kota sekelilingnya.

Selain itu urbanisasi juga telah menimbulkan berbagai akibat baik yang dirasakan oleh daerah penerima (tujuan) maupun daerah yang ditinggalkan (daerah asal). Sebagian ahli memandang urbanisasi memberikan dampak positif bagi pertumbuhan dan perkembangan kota, tetapi tidak sedikit juga yang beranggapan bahwa urbanisasi menimbulkan dampak negatif bagi perkembangan kota. Bagi mereka yang memandang urbanisasi dapat membawa dampak positif bagi perkembangan kota mengatakan antara lain (Khairuddin, 1992:213-214):

- 1) Bahwa urbanisasi merupakan faktor penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

- 2) Urbanisasi merupakan suatu cara untuk menyerap pengetahuan dan kemajuan-kemajuan yang ada di kota.
- 3) Urbanisasi yang menyebabkan terjadinya perkembangan kota, selanjutnya memberikan resonansi perkembangan bagi daerah-daerah pedesaan sekitarnya.

Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan oleh urbanisasi diyakini mungkin lebih banyak. Dampak negatif ini tidak hanya melanda daerah perkotaan, tetapi juga pedesaan. Urbanisasi dalam pengertian perpindahan penduduk ke arah perkotaan, di kota dapat menimbulkan masalah urbanisasi berlebihan (*over urbanization*), yaitu kelebihan penduduk sehingga melebihi daya tampung kota (Khairuddin, 1992:214). Daya tampung di sini tidak hanya diartikan sebagai ketersediaan lahan tempat beraktifitas, tetapi juga kemampuan kota untuk menyerap mereka dalam lingkaran aktifitas perkotaan, kemampuan penyediaan tempat tinggal dan kemampuan kota memberikan pelayanan dan penyediaan sarana/prasarana. Permasalahan ini akan berkembang pada sektor-sektor kehidupan lainnya, seperti perumahan, kesehatan, pencemaran lingkungan, pengangguran, kemiskinan, kriminalitas, dan sebagainya, sehingga menimbulkan persoalan-persoalan yang bertambah rumit dan saling terkait satu sama lain.

2.2. Neighborhood Unit

2.2.1. Pengertian Neighborhood Unit

Kajian tentang pusat pelayanan berkaitan dengan daerah pelayanannya, salah satu daerah pelayanan terkecil dikenal dengan *neighborhood unit*. *Neighborhood unit* didefinisikan sebagai satu unit wilayah pemukiman dengan unit-unit huniannya dilengkapi dengan sejumlah sarana (fasilitas) yang diperlukan bagi penduduk wilayah tersebut. Dalam *neighborhood unit* terdapat batasan-batasan yang diberikan guna memberikan ciri khusus (karakteristik), baik dari segi batasan fisik, jaringan sosial,

penggunaan lahan yang terkonsentrasi dari fasilitas sampai kepada ikatan simbolisme dan emosional atau ikatan sosial kemasyarakatan dari para penghuninya (Gollany, 1984:181).

Perencanaan modern dari *neighborhood unit* adalah dengan melihat sejarah konsep *neighborhood unit* tersebut, dimana terdapat beberapa aspek penting untuk dijadikan pedoman dalam perencanaannya. Penentuan ciri khas/karakteristik dari suatu *neighborhood unit* ini dapat dicapai dengan mengadakan kombinasi dari ciri-ciri dasar unit-unit hunian. Ciri khas yang dapat diangkat dalam perencanaan *neighborhood unit* diantaranya :

- 1) *Personal sense of communal unity* Atau rasa keterkaitan antar personal (individu/pribadi) dalam kesatuan sosial masyarakat.
- 2) *Personal identity of communal unity* atau penentuan ciri/identitas pribadi dalam kesatuan sosial kemasyarakatan.

Kedua hal tersebut di atas dapat digunakan untuk merencanakan organisasi dan pengaturan sosial kemasyarakatan (*community*) baik untuk mengatur berbagai aktivitas pribadi maupun aktivitas bersama atau kelompok. Identitas pribadi dan rasa turut memiliki (*sense of belonging*) dari unit-unit hunian dibentuk akan membawa pengaruh terhadap tingkat perhatian (*concern*) dari berbagai persoalan yang timbul di wilayah hunian sehingga terbentuk suatu ikatan emosional maupun simbolistik.

Selain hal tersebut di atas aspek penting dalam perencanaan *neighborhood unit* adalah skala jarak tempuh dengan jalan kaki (*walking distance scale*) yang memberikan efisiensi dan efektivitas penyebaran dan penempatan dari suatu sarana (fasilitas) yang didirikan (Gollany, 1984: 188). Ada beberapa yang menjadi prinsip atau kaidah dalam penentuan perencanaan pembentukan *neighborhood unit* yang lebih baik yaitu :

- 1) Prinsip *social integrity*, terjadinya kesatuan ikatan sosial kemasyarakatan.

- 2) Prinsip *social identity*, terjadinya ciri khas serta tumbuhnya identitas sosial kemasyarakatan.
- 3) Prinsip *social governance*, terjadinya pengaturan dan pengelolaan (swakelola dalam pengaturan unit hunian)
- 4) Prinsip *sharing system*, terjadinya tukar menukar pelayanan untuk memenuhi berbagai kebutuhan dari pusat-pusat pelayanan yang ada di lingkungannya.
- 5) Prinsip *self containment*, terjadinya pemenuhan kebutuhan sehari-hari bagi warga huniannya oleh pusat pelayanan yang ada di lingkungannya.

Hal lain yang penting untuk diperhatikan dalam prinsip *self containment* dan *self sufficient* dari pusat-pusat pelayanan masyarakat yang ada di *neighborhood unit*, tidaklah diartikan bahwa pusat pelayanan masyarakat/tempat sentral dapat melayani seluruh kebutuhan bagi warga huniannya, tetapi diartikan sebagai adanya kemudahan dalam arti tersedianya fasilitas untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari serta mudah dalam jarak jangkauan ke fasilitas (*the sufficient on dailly basic needs of residence*). Pada Tabel II.1 berikut memperlihatkan ukuran dari unit-unit hunian dengan jumlah penduduk pendukungnya.

Tabel II.1
**BESARAN DAN UKURAN DARI NEIGHBORHOOD UNIT
 SERTA RADIUS LAYANAN PUSAT SENTRALNYA**

No	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk	Kebutuhan Lahan	Radius Pelayanan
1.	2.500 Jiwa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 11,1 jiwa/are (3 kk /are) ▪ 18,5 jiwa/are (5 kk /are) ▪ 25,9 jiwa/are (7 kk /are) ▪ 33,3 jiwa/are (9 kk /are) ▪ 40,7 jiwa/are (11 kk /are) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 0,352 mill² ▪ 0,211 mill² ▪ 0,151 mill² ▪ 0,117 mill² ▪ 0,096 mill² 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 0,112 mill ▪ 0,067 mill ▪ 0,048 mill ▪ 0,037 mill ▪ 0,031 mill

Lanjutan Tabel II.1

No	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk	Kebutuhan Lahan	Radius Pelayanan
2	4.000 Jiwa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 11,1 jiwa/are (3 kk /are) ▪ 18,5 jiwa/are (5 kk /are) ▪ 25,9 jiwa/are (7 kk/are) ▪ 33,3 jiwa/are (9 kk /are) ▪ 40,7 jiwa/are (11 kk /are) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 0,563 mill² ▪ 0,338 mill² ▪ 0,241 mill² ▪ 0,188 mill² ▪ 0,154 mill² 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 0,176 mill ▪ 0,108 mill ▪ 0,077 mill ▪ 0,060 mill ▪ 0,045 mill
3.	6.500 Jiwa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 11,1 jiwa/are (3 kk/are) ▪ 18,5 jiwa/are (5 kk/are) ▪ 25,9 jiwa/are (7 kk/are) ▪ 33,3 jiwa/are (9 kk/are) ▪ 40,7 jiwa/are (11 kk/are) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 0,914 mill² ▪ 0,548 mill² ▪ 0,392 mill² ▪ 0,305 mill² ▪ 0,249 mill² 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 0,291 mill ▪ 0,174 mill ▪ 0,125 mill ▪ 0,097 mill ▪ 0,079 mill
4.	8.000 Jiwa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 11,1 jiwa/are (3 kk/are) ▪ 18,5 jiwa/are (5 kk/are) ▪ 25,9 jiwa/are (7 kk/are) ▪ 33,3 jiwa/are (9 kk/are) ▪ 40,7 jiwa/are (11 kk/are) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1,126 mill² ▪ 0,676 mill² ▪ 0,483 mill² ▪ 0,375 mill² ▪ 0,307 mill² 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 0,360 mill ▪ 0,220 mill ▪ 0,150 mill ▪ 0,120 mill ▪ 0,100 mill
5	10.000 Jiwa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 11,1 jiwa/are (3 kk/are) ▪ 18,5 jiwa/are (5 kk/are) ▪ 25,9 jiwa/are (7 kk/are) ▪ 33,3 jiwa/are (9 kk/are) ▪ 40,7 jiwa/are (11 kk/are) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1,401 mill² ▪ 0,843 mill² ▪ 0,602 mill² ▪ 0,468 mill² ▪ 0,383 mill² 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 0,446 mill ▪ 0,268 mill ▪ 0,191 mill ▪ 0,149 mill ▪ 0,121 mill

Sumber : New Town Planning, Gedeon Golanny, tabel 17-1 halaman 194.

Catatan : 1 mill = 1.61 km

2.2.1. Prinsip Jarak Tempuh dalam Neighborhood Unit .

Salah satu prinsip dalam merencanakan sebaran dan lokasi fasilitas pelayanan masyarakat di kawasan hunian atau perumahan yaitu memperhatikan jarak dan waktu tempuh antara lokasi tempat tinggal dengan sarana yang dituju. Adapun jarak dan waktu tempuh dari tempat tinggal penduduk ke sarana pelayanan masyarakat dihitung berdasarkan kepada skala jarak dan waktu tempuh seseorang berjalan kaki (*walking*)

distance scale). Dalam Johara. T.J (1999:161) disebutkan bahwa standar jarak tempuh sarana dilihat dari lamanya berjalan kaki dari tempat tinggal ke sarana pelayanan.

Tabel III.2
STANDAR JARAK TEMPUH
KE BERBAGAI SARANA PELAYANAN MASYARAKAT

NO	JENIS SARANA	JARAK TEMPUH
1.	Pasar Lokal	750 m atau 10 menit
2.	TK	500 m atau 5 menit
3.	SD	750 m atau 10 menit
4.	SMP	1.500 m 20 menit
5.	SMA	20 – 30 menit
6.	Tempat bermain	750 m atau 10 menit
7.	Rekreasi/Olah Raga	1.500 m atau 20 menit
8.	Taman	30 – 60 menit

Sumber : Chapin, 1972

Catatan : Standar jalan kaki manusia 3,5 – 4 km/jam

2.3. Pembangunan Sarana Pelayanan Masyarakat

Pengembangan wilayah perkotaan didorong oleh adanya ketersediaan dan kelengkapan prasarana kota di kawasan tertentu. Namun dalam perkembangannya pembangunan sarana kota dapat berkembang seiring dengan pertumbuhan dari wilayah kota tertentu yang akan dikembangkan. Dalam Undang-Undang Tata Ruang Nomor 16 tahun 1992 ada tiga aspek yang berkaitan dengan pengembangan tata ruang Perkotaan, yaitu :

- 1) Aspek perencanaan
- 2) Aspek pelaksanaan dan pembangunan
- 3) Aspek pengendalian tata ruang.

Salah satu bagian dari penelitian pembangunan kota adalah melihat keterkaitan (*connectivity*) antara aktivitas dan fungsi kota dengan masyarakat di dalamnya. Aspek penting dalam pembangunan perkotaan di sini antaranya adalah penyediaan sarana dan prasarana perkotaan yang dibutuhkan masyarakat kota bersangkutan. Selain itu

perencanaan dan pembangunan sarana dan prasarana kota, dalam penelitian ini khususnya fasilitas pelayanan masyarakat sangat dipengaruhi oleh *demand* dari masyarakatnya. Pada tahapan perencanaan dan penyusunan program penyediaan fasilitas pelayanan masyarakat didasarkan atau mengacu pada perkembangan penduduk dimasa depan serta adanya prioritas pendukung pembangunan untuk sarana dan prasarana yang cukup mendesak keberadaannya.

Pembangunan fasilitas pelayanan masyarakat yang terkait dengan kebijaksanaan pengembangan wilayah perluasan kota-kota di Indonesia lebih diarahkan pada pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*) dimana pihak penyedia sarana pelayanan masyarakat, terutama untuk tahap awal dilakukan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. Untuk kawasan tertentu seperti kawasan perumahan baru, penyediaan sarana perkotaan sudah semakin meningkat sampai kepada kebutuhan akan kualitas (mutu) yang lebih baik lagi. Sehingga selain dari perencanaan dan penyusunan program, pembangunan fasilitas pelayanan masyarakat akan lebih dapat berhasil guna dengan melihat harapan dari pengguna fasilitas tersebut yaitu masyarakat sekitar fasilitas yang di bangun.

2.3.1. Pengertian Sarana Pelayanan

Sarana adalah fasilitas untuk melancarkan pelaksanaan suatu fungsi. Dalam konteks perkotaan penyelenggaraan pelayanan sosial kota memerlukan penyediaan fasilitas sosial, sehingga setiap penduduk kota mudah mendapatkan pelayanan sosial dan meningkatkan kesejahteraannya. Menurut Djoko Sujarto (1989:170), sarana (fasilitas) dapat diartikan sebagai suatu aktivitas ataupun materi yang berfungsi melayani kebutuhan individu di dalam suatu lingkungan kehidupan.

Secara sistematis aktivitas maupun materi tersebut dapat dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu fasilitas sosial dan fasilitas fisik. Fasilitas sosial dapat diartikan sebagai aktivitas atau sarana pelayanan yang dapat melayani kebutuhan masyarakat yang bersifat dapat memberikan kepuasan sosial, mental dan spiritual diantaranya adalah sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana perdagangan, sarana rekreasi dan olah raga serta pemakaman umum. Sedangkan fasilitas fisik adalah aktivitas atau sarana yang dapat melayani masyarakat akan kebutuhan fisik, yaitu prasarana umum termasuk air minum, sanitasi lingkungan, sistem drainase, gas, listrik, jalan raya serta sarana perumahan.

Pembagian jenis fasilitas umum perkotaan (*urban public facilities*) atau jenis sarana pelayanan masyarakat, menurut Djoko Sujarto (1982) antara lain adalah :

a. Sarana kelembagaan, meliputi :

- Kantor Pemerintah
- Lembaga Hankam
- Perkantoran
- Balai Kota

b. Sarana pelayanan kesejahteraan, meliputi :

- Peribadatan
- Kesehatan
- Pendidikan
- Keamanan/kantor polisi

c. Sarana pelayanan ekonomi, meliputi :

- Warung/kios
- Toko
- Pasar Lingkungan
- Pusat Perbelanjaan
- Pusat perdagangan
- Pusat Pergudangan

d. Sarana rekreasi, meliputi :

- Tempat bermain/taman kota
- Balai pertemuan
- Gedung Kesenian/Bioskop

- Tempat Olah raga
- Pusat Kebudayaan
- Museum

e. Sarana perangkutan/transportasi, meliputi :

- Terminal
- Sub terminal
- Perparkiran.

Semua pelayanan masyarakat tersebut di atas mempunyai fungsi, ukuran, radius pelayanan dan kapasitas pelayanan yang berbeda-beda tergantung besar kecilnya serta luasnya fungsi dan peranan suatu lingkungan tertentu. Dalam hal ini akan terdapat pengertian tingkatan (*hierarki*) dari pusat-pusat pelayanan masyarakat tersebut. Semakin besar fungsi dan peranan suatu lingkungan tertentu di dalam pelayanan masyarakat semakin besar pula peranan dan fungsi dari pusat-pusat pelayanannya baik dari segi ukuran kuantitas maupun kualitasnya.

Secara keseluruhan Claire (1973), mendefinisikan fasilitas umum (*community facilities*) meliputi :

- 1) Berbagai bangunan atau gedung-gedung untuk kegiatan administrasi, pendidikan, peribadatan, budaya, kesehatan, keamanan, rekreasi dan pelayanan hidup lainnya.
- 2) Utilitas dan pekerjaan umum yang menyediakan air, energi, pengontrol suhu, penerangan, komunikasi, treatment air limbah, pengendalian banjir, pengelolaan sampah dan transportasi.
- 3) Lahan-lahan publik untuk menampung berbagai bangunan dan fasilitas pekerjaan umum serta untuk penyediaan ruang terbuka seperti taman, playgroup, mall, penghijauan dan keindahan.

2.3.2. Faktor-faktor Penentu Kebutuhan Sarana Pelayanan Masyarakat

Sejumlah faktor yang mempengaruhi kebutuhan fasilitas antara lain kondisi fisik, struktur umum, ukuran, perekonomian, kepadatan, kondisi sosial politik dan keinginan masyarakat, tetapi kebutuhan nyata (*real needs*) fasilitas diperhitungkan berdasarkan karakteristik kelompok masyarakat yang akan dilayaninya. Dengan memperhatikan karakteristik kelompok masyarakat pengguna akan dapat diperkirakan jangkauan pelayanan fasilitas tersebut.

Dalam perencanaan pembangunan sarana pelayanan masyarakat perkotaan, jumlah dan besaran suatu sarana ditentukan oleh standar minimum untuk sarana pelayanan tersebut dapat beroperasi. Banyaknya instansi yang harus dilibatkan dalam penentuan standard fasilitas yang baku. Semakin berkembangnya jenis-jenis fasilitas kota yang berhubungan dengan pertimbangan biaya, menuntut pola perancangannya yang tidak hanya memperhitungkan kebutuhan yang akan datang, tetapi juga kemungkinan perubahan standarisasi (Claire, 1973).

Di Indonesia, proses perencanaan pembangunan pelayanan sarana pelayanan masyarakat yang merupakan bagian substansi dalam perencanaan tata ruang kota, mengacu pada Pedoman Perencanaan Permukiman Kota yang diterbitkan oleh Departemen Pekerjaan Umum berdasarkan Kepmen PU. No.137/KPTS/1987. Dalam buku Petunjuk Perencanaan Kawasan Perumahan Kota (DPU, SKBL-2351/1987), perencanaan tata ruang kota memerlukan tiga kelompok informasi, yaitu

- 1) Informasi kependudukan, meliputi jumlah, kondisi dan sifat-sifatnya.
- 2) Informasi kondisi fisik, meliputi fisik alam dan bangunan-bangunan.
- 3) Informasi sosial ekonomi dan budaya, meliputi pola hidup dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan masyarakat.

Data statistik penduduk merupakan bahan utama perencanaan sebuah kota, data tersebut meliputi :

- 1) Jumlah penduduk untuk menentukan klasifikasi kota, luas kebutuhan ruang kota, serta besar dan jenis fasilitas dan pelayanan.
- 2) Struktur penduduk menurut umur dan jenis kelamin, untuk mengetahui perkembangan dan kebutuhan pelayanan.
- 3) Struktur penduduk menurut pekerjaan, untuk menentukan penyediaan lapangan pekerjaan, distribusi tenaga kerja dan penyediaan fasilitas yang bersifat meningkatkan kemampuan kerja.
- 4) Penyebaran penduduk untuk menentukan pola dan zoning kota, tipe lingkungan serta kebutuhan fasilitas transportasi dan komunikasi.

Selain data statistik penduduk diperlukan pula identifikasi kepadatan penduduk (*density*), pertumbuhan dan perkembangan penduduk. Pertumbuhan dan perkembangan penduduk yang dipengaruhi tingkat kelahiran, tingkat kematian, tingkat kesehatan dan keluar masuknya penduduk akan menentukan :

- 1) Pertumbuhan dan perkembangan kota.
- 2) Pola pengaturan dan kemungkinan perluasan kota.
- 3) Penyediaan lapangan pekerjaan, dan
- 4) Besaran jenis dan susunan fasilitas pelayanan masyarakat.

Dari segi pedoman dan peraturan serta standar tentang pembangunan fasilitas umum perkotaan ada beberapa yang dijadikan acuan, diantaranya Pedoman Perencanaan Lingkungan Pemukiman Kota (Departemen Pekerjaan Umum), Undang-Undang Bina Kota dan Undang-Undang Tata Ruang. Pada Tabel.II.3 berikut ini memperlihatkan standar perencanaan fasilitas pelayanan masyarakat di kawasan pemukiman perkotaan

yang mengacu pada Pedoman Perencanaan Permukiman Kota yang diterbitkan oleh Departemen Pekerjaan Umum berdasarkan Kepmen PU. Nomor : 137/KPTS/1987 dalam buku Petunjuk Perencanaan Kawasan Perumahan Kota (DPU, SKBL-2351/1987).

Tabel II.3
STANDAR PERENCANAAN SARANA PELAYANAN MASYARAKAT
DI KAWASAN PERMUKIMAN PERKOTAAN

No	Jenis Sarana	Penduduk Pendukung	Lokasi	Luas Bang/Tanah	Radius Pencapaian
1	PENDIDIKAN ▪ Taman Kanak-Kanak ▪ Sekolah Dasar (6Kls) ▪ SLTP (6Kls) ▪ SLTA (6 Kls)	▪ 1.000 ▪ 1.600 ▪ 4.800 ▪ 9.600	▪ Ditengah kelompok keluarga + taman ▪ --Ditto-- ▪ Dikelompokkan dengan taman +lapangan olah raga ▪ --Ditto--	Lb: 252 m2 Lt : 1.200m2 Lb: 600 m2 Lt : 3.600m2 Lb: 1.500m2 Lt : 1.200m2 Lb: 2.250m2 Lt : 5.000m2	▪ 500 m ▪ 1000 m ▪ 1000 m
2.	PERDAGANGAN ▪ Warung/kios ▪ Toko ▪ Pusat Perbelanjaan	▪ 250 ▪ 2.500 ▪ 30.000	▪ Di tengah kelompok keluarga(RT) ▪ Di pusat RW ▪ Di pusat lingkungan	▪ Lt : 100m2 ▪ Lt : 1.200m2 ▪ Lt:13.500m2	500 m
3.	REKREASI ▪ Taman bermain ▪ Taman bermain ▪ Tmpt Olah Raga	▪ 250 ▪ 2.500 ▪ 30.000	▪ Di tengah kelompok perumahan. ▪ Di pusat kegiatan RW ▪ Di kelompokkan dengan kegiatan sekolah	▪ Lt : 250m2 ▪ Lt : 1.250m2 ▪ Lt : 9.000m2	▪ 200 m ▪ 500 m ▪ 1000 m
4.	KESEHATAN ▪ Balai Pengobatan ▪ BKIA / Rumah Bersalin ▪ Puskesmas	▪ 3.000 ▪ 10.000 ▪ 30.000	▪ Di tengah kelompok keluarga tidak menyeberang jalan. ▪ --Ditto-- ▪ Di pusat lingkungan mengelompok dengan pelayanan sosial.	▪ Lb: 180m2 Lt : 300m2 ▪ Lb: 800m2 Lt : 1.600m2 ▪ Lt : 1.200m2	▪ 1000 m ▪ 2000 m ▪ 1500 m
5.	PERIBADATAN ▪ Musholla/langgar ▪ Masjid /Gereja	▪ 2.500 ▪ 30.000	▪ Di pusat RW ▪ Di pusat lingkungan	▪ Lt : 300m2 ▪ Lt : 1.750m2	500 m
6.	TRANSPORTASI ▪ Sub terminal	▪ 30.000		Lt : 200m2	

Sumber : Pedoman Penyusunan Rencana Fasilitas Pelayanan Masyarakat Permukiman Kota, DEP.PU 1987

2.4. Pusat dan Sub Pusat Kegiatan Pelayanan.

Teori tempat pusat atau pusat pelayanan menurut Christaller didefinisikan sebagai satu kesatuan unit dasar pemukiman dengan dilengkapi pusat-pusat pelayanan di dalamnya. Unit pemukiman dimaksud adalah dapat berupa satu kota besar (*metropolis city*), kota-kota kecil (*cities*), wilayah kota atau satuan lingkungan hunian tertentu. Ciri dari pusat pelayanan (tempat sentral), menurut Cristaler pusat tersebut menyediakan pelayanan (barang dan jasa) untuk wilayah pemukiman itu sendiri dan daerah sekitarnya yang lebih besar. Christaller juga menganggap bahwa jumlah penduduk merupakan penentu dari tingkat pelayanan pusat sentral, selain itu juga fungsi dari pusat sentral itu menjadi penting, misalnya pusat sebagai pusat kegiatan perdagangan, pendidikan, pemerintahan maupun rekreasi. Ada hubungan yang sangat erat antara jumlah penduduk pendukung di suatu wilayah dengan tingkatan (*hierarki*) dari pusat pelayanan tempat sentral. Ada dua faktor yang berpengaruh terhadap jumlah, luas dan sebarannya serta *hierarki* dari pusat-pusat pelayanan di wilayah pemukiman yaitu :

1). Setiap pusat memiliki batas ambang penduduk yang dilayaninya (*population treshold*). Batas ambang penduduk adalah jumlah minimum penduduk yang dilayani suatu pusat tempat sentral atau pusat pelayanan masyarakat guna mendukung kelancaran atau kesinambungan *supplay* dan *demand* dari barang dan jasa yang disediakan.

2). Setiap pusat memiliki jangkauan pasar (*market range*).

Jangkauan pasar (*market range*) di sini adalah suatu jarak dimana seseorang dapat/bersedia untuk mengadakan perjalanan dalam mencapai fasilitas/sarana yang diperlukannya. Jarak jangkau untuk suatu sarana akan berbeda dengan jarak jangkau dari sarana yang lainnya tergantung pada jenis barang/jasa yang

dipasarkannya. Faktor jarak sebagai kriteria jangkauan pasar ini akan lebih akurat jika dialihkan pada ukuran waktu tempuh (*travel time*) dan biaya (*travel cost*).

Menurut Christaller bentuk yang paling optimum dan merata tanpa adanya bidang tumpang tindih antara pusat-pusat pelayanan adalah bentuk segi enam (*heksagonal*), keadaan ini akan terbukti dengan jelas di wilayah yang mempunyai 2 (dua) syarat :

- 1) Topografi yang seragam sehingga tidak ada bagian wilayah yang mendapat pengaruh dari lereng dan pengaruh alam lain dalam hubungan dengan jalur pengangkutan.
- 2) Kehidupan ekonomi homogen dan tidak memungkinkan adanya produksi primer.

Dalam keadaan yang mempunyai kedua syarat di atas ini akan berkembang tiga hal antara lain :

- 1) Ajang jasa (ajang niaga) akan berkembang wajar diseluruh wilayah dengan jarak dua jam berjalan kaki ($2 \times 3,5 \text{ km} = 7 \text{ km}$). Secara teori tiap pusat pelayanan melayani kawasan yang berbentuk lingkaran dengan radius 3,5 km, jadi pusat pelayanan akan terletak di pusat kawasan.
- 2) Kawasan-kawasan berbentuk lingkaran yang saling berbatasan, walaupun bentuk lingkaran adalah paling efisien akan mempunyai bagian-bagian yang bertumpang tindih atau bagian-bagian yang senjang / kosong, sehingga bentuk lingkaran itu tidak bisa digunakan untuk kawasan atau wilayah.
- 3) Dalam wilayah akan berkembang ajang niaga dalam pola *heksagonal*, yang paling banyak adalah dusun-dusun sebagai pusat perdagangan yang melayani penduduk pedesaan. Satu dusun dengan dusun lainnya akan mempunyai jarak 7

km, salah satu dusun akan tumbuh makin besar menjadi kampung, yang merupakan *hierarki* pusat perdagangan kedua.

Untuk menentukan struktur *heksagonal* ini ada tiga asas atau prinsip yang penting, yaitu :

- 1) Asas pasar (*the market and supply principle*), dimana setiap pusat dengan *hierarki* yang lebih tinggi akan melayani dua pusat dengan hierarki yang lebih rendah dan pusat itu sendiri.
- 2) Asas pengangkutan (*the transportation principle*), yaitu prinsip yang diterapkan dalam struktur *heksagonal* pada wilayah-wilayah dengan memandang biaya transportasi sebagai hal penting. Menurut asas pengangkutan letak tempat sentral yang paling menguntungkan adalah jika sebarannya terletak antara dua kota atau dua pusat dengan jalan penghubung hendaknya sependek dan selurus mungkin.
- 3) Asas administrasi pemerintahan (*the administration principle*), yaitu prinsip-prinsip yang berkaitan dengan penentuan batas administrasi suatu wilayah pelayanan dari pusat tempat sentral yang akan mempengaruhi arah pergerakan ke sarana yang dimaksud. Dalam prinsip ini terkandung sifat sosial politik dari pengaturan suatu wilayah berdasarkan batas administrasi yang telah ditentukan.

2.5. Strategi Pengembangan Wilayah

2.5.1. Pendekatan Wilayah Secara Nodal

Pendekatan nodal dibangun atas dasar interdependensi dan saling hubungan antar bagian-bagian wilayah. Pendefinisian daerah nodal akan membentuk suatu daerah geografik yang memperlihatkan koherensi fungsional tertentu dari satuan-satuan yang heterogen, seperti kota dan desa yang saling berkaitan apabila didefinisikan berdasarkan kriteria tertentu (Glasson, 1977).

Hubungan fungsional biasanya terlihat dalam bentuk arus dengan mempertimbangkan kriteria sosio-ekonomi, yang mampu menjelaskan hubungan pusat-pusat pelayanan utama dengan pusat-pusat pelayanan lokal di bawahnya. Aktivitas sosio-ekonomi masyarakat lokal dapat diterjemahkan dan didefinisikan dengan baik dalam keruangan, dan terkadang pula sulit didefinisikan. Interaksi sosial dalam bentuk masyarakat, kesatuan adat, dan lain-lain, merupakan bentuk homogenitas yang terjadi pada ruang wilayah. Hanya saja sangat sulit untuk mendefinisikan faktor-faktor pendukungnya secara spesifik. Akan tetapi, bagaimanapun bentuknya interaksi sosial akan berlangsung dan berdampak pada perkembangan ruang suatu wilayah.

Salah satu komponen penting dalam pendefinisian perwilayahan secara nodal atau fungsional adalah penduduk (sumber daya manusia). Penduduk dalam interaksinya memiliki kemampuan sebagai potensi aliran utama wilayah (*flow potential*). Sehingga besarnya populasi (penduduk) pada suatu titik pertumbuhan akan sangat mempengaruhi besar dan keterpusatan interaksi dalam ruang wilayahnya, bahkan akan sangat mempengaruhi aktivitas di titik pertumbuhan lainnya (Bintarto, 1979).

Interaksi fungsional yang berlangsung pada titik-titik pertumbuhan akan menimbulkan *multiplier effect* terhadap tatanan interaksi ruang pada suatu wilayah. Interaksi fungsional antar nodal atau titik-titik pertumbuhan wilayah dapat berlangsung secara vertikal berupa keterkaitan kegiatan produksi dengan wilayah pasar (*market*), maupun secara horizontal berupa keterkaitan ruang yang dibangun atas dasar komplementaritas antar kegiatan produksi yang berbeda (Daldjoeni, 1992). Hal ini disebabkan masing-masing unit nodal akan dibangun atas dasar keuntungan bersama melalui *aglomerasi*, sehingga eksternalitas wilayah yang ditunjukkan melalui pendekatan ini lebih ditekankan pada dampak aktivitas sosio-ekonomi masyarakat lokal secara positif

terhadap pemanfaatan ruang atau guna lahannya. Dengan demikian, sistem perwilayahan yang berorientasi pada perencanaan dan pengendalian aktivitas sosio-ekonomi akan mampu menggambarkan keterkaitan ruang secara fungsional dalam rangka *supply-demand* kebutuhan wilayah (Budihardjo dan Darmawan, 1992).

2.5.2. Pengembangan Konsep Pusat-Pusat Pertumbuhan.

Pembangunan bertahap dalam pembentukan sistem perwilayahan dapat memacu pertumbuhan wilayah lebih produktif, dapat diterjemahkan melalui pendekatan pertumbuhan, pemerataan dan lingkungan. Pendekatan ini sangat relevan untuk diterapkan pada pengembangan konsep dasar pusat pertumbuhan. Pengembangan konsep dasar pusat pertumbuhan dapat diterapkan pada wilayah yang didominasi oleh daerah terbelakang, yang lebih dikenal dengan *downward-transitional area*. Konsep ini dibangun atas dasar interdependensi antara daerah inti (*core region*) dan daerah terbelakang (*downward transitional area*) disekitarnya. Aliran pertumbuhan yang berawal daerah inti menuju daerah terbelakang diharapkan dapat berlangsung efektif, dengan memberikan kesempatan titik-titik pertumbuhan baru untuk menciptakan keterkaitan wilayah. Keterkaitan wilayah yang tercipta memperbesar peluang persebaran aliran penduduk, barang dan jasa menuju daerah tertinggal (Friedman, 1966).

Secara umum penerapan teori-teori pusat pertumbuhan tidak hanya berorientasi pada satu pusat pertumbuhan tunggal, akan tetapi mengembangkan beberapa pusat pertumbuhan sesuai dengan tingkatannya yang memiliki fungsi dan peran tersendiri dalam pengembangan wilayah, pada konteks yang lebih luas.

2.5.3. Pilihan Strategis

Pilihan Strategis yang akan dilakukan diangkat dari teknik pengambilan keputusan bagi para perencana dan pengelola kota yang pernah dikembangkan dalam *analysis of strategic choice*. *Analysis of strategic choice* sejak awal dekade 1960-an telah dikembangkan menjadi salah satu teknik di dalam proses perencanaan kota. Analisis ini sebenarnya dipergunakan sebagai salah satu cara untuk mengambil keputusan secara obyektif dan rasional yang dimulai pada saat dilaksanakan perencanaan untuk peremajaan secara besar-besaran Kota Coventry Inggris.

Analisis pilihan strategis mendasarkan kepada adanya kenyataan bahwa pengambilan keputusan di dalam perencanaan kota khususnya dilandasi oleh tiga (tiga) hal pokok (Sujarto, 2001:11), yaitu :

1. Keterkaitan dari permasalahan yang akan diputuskan.
2. Keterkaitan antara berbagai unsur pengambil keputusan yang merupakan watak utama dari suatu pertimbangan strategi.
3. Ketidak pastian, yaitu suatu faktor yang menjadi sumber kesulitan di dalam pengambilan keputusan.

Dengan demikian maka tipologi pilihan strategis juga akan mendasarkan kepada suatu analisis perilaku pembuat kebijakan, pengambil keputusan dan pelaku pembangunan. Hasil dari pilihan strategis ini akan merupakan seperangkat alat yang dipakai oleh pengambil keputusan baik secara individual maupun kolektif. Dasar teknik pilihan strategis pada hakikatnya tidak kompleks dan sangat luwes penggunaannya. Pilihan strategis dapat dipergunakan secara selektif dan secara khusus untuk suatu aspek spesifik dari permasalahan sesuai dengan derajat kepentingannya untuk memperoleh jawaban.

2.6. Kriteria Evaluasi Kinerja Sarana Pelayanan Masyarakat.

2.6.1. Evaluasi

Evaluasi merupakan persoalan fakta dan logika serta lebih penting dari yang paling penting, Michael Scriven (William, 1999:607). Istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Secara umum dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assesment*). Dalam arti yang lebih spesifik evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan pada kenyataannya mempunyai nilai, hal ini karena hasil tersebut memberi sumbangan pada tujuan atau sasaran, yang dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna, yang berarti bahwa masalah-masalah kebijakan dibuat jelas atau diatasi (William, 1999:608).

Menurut Bryant (1987:195) evaluasi adalah upaya untuk mendokumentasikan apa yang terjadi dan mengapa hal itu terjadi. Dengan penalaran ini, evaluasi merupakan upaya mengetahui apakah kaitan-kaitan itu memang sungguh-sungguh ada. Evaluasi yang baik bukan hanya menetapkan atau mengumpulkan informasi tentang keadaan sebelum dan sesudah pelaksanaan, melainkan juga menunjukkan dengan jelas faktor-faktor lain tidak atau kurang berpengaruh, dengan kata lain evaluasi harus mampu mengatasi penjelasan-penjelasan lainnya.

Menurut Patton dan Sawicki (1984: 302), kriteria yang paling sering digunakan untuk memberikan penilaian positif atau negatif pada suatu pembangunan ialah seberapa dekat hasil pembangunan itu dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, dan apakah pencapaian itu dilaksanakan secara efisien atau tidak, kriteria-kriteria lain yang tidak kalah penting adalah :

- 1) Berapa jauh pembangunan mampu mengembangkan lembaga-lembaga yang menyelenggarakan jasa dan pelayanan baru itu dari waktu-kewaktu.
- 2) Keefektifan pelaksanaan pembangunan dalam menjangkau kelompok-kelompok target yang jelas dan tertentu.
- 3) Banyaknya perubahan perilaku yang terjadi.
- 4) Apakah organisasi telah memetik pelajaran dari pengalaman pembangunan dan mengubah proses keputusannya agar sesuai dengan tugas pembangunan.

Juga dalam proses evaluasi rencana dan kebijakan perlu juga diperhatikan kepentingan umum (*public interest*). Dalam evaluasi perencanaan wilayah menurut Simonds (Johara,1999:298) perlu diadakan dulu pengujian apakah hal yang akan direncanakan dalam perencanaan wilayah itu serasi dengan keadaan wilayah dan mendatangkan kebaikan bagi seluruh wilayah tersebut pengujian itu dengan mengadakan tes secara sederhana sebagai berikut :

- 1) Apakah yang direncanakan itu serasi ?
- 2) Apakah hal yang direncanakan itu dapat dibangun tanpa melewati batas daya dukung (*carrying capacity*) dari lahan ?
- 3) Apakah yang direncanakan itu akan membawa pengaruh yang baik terhadap wilayah sekitar?
- 4) Apakah sarana pelayanan umum yang layak dapat disediakan ?

2.6.2. Kinerja

Salah satu hal yang di harapkan dari beroperasinya suatu fasilitas adalah kinerja yang tinggi. Kinerja adalah suatu tolok ukur tingkat pelayanan sarana/fasilitas terhadap penggunaannya, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia kinerja adalah kemampuan

sesuatu beroperasinya secara efisien. Pengertian kinerja secara terminologis merupakan terjemahan dari *performance*, kata kinerja tersusun dari dua kata yaitu kinetika yang berarti kemampuan atau prestasi dan kerja, oleh karena itu kinerja dapat diartikan dengan kemampuan kerja atau prestasi kerja (Webster dictionary).

Selain itu kinerja dapat diartikan pula sebagai suatu penampilan dari sesuatu yang sesuai dengan persyaratan sehingga memenuhi berbagai ketentuan dan peraturan atau menyelesaikan sesuatu yang sesuai dengan yang diharapkan. Sedangkan pengertian *kinerja* dalam permukiman kota adalah merupakan kemampuan atau prestasi atau kapasitas kerja struktur tata ruang untuk menjalankan aktivitas permukiman yang sesuai dengan kebijaksanaan yang ditentukan sebelumnya sehingga dapat memenuhi kebutuhan kehidupan masyarakat. (Sujarto, 1990:87).

2.6.3. Pembangunan Sarana Pelayanan Masyarakat

Sarana adalah fasilitas untuk melancarkan pelaksanaan suatu fungsi. Menurut Djoko Sujarto (1989:170), sarana (fasilitas) dapat diartikan sebagai suatu aktivitas ataupun materi yang berfungsi melayani kebutuhan individu di dalam suatu lingkungan kehidupan. Secara sistematis aktivitas maupun materi tersebut dapat dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu fasilitas sosial dan fasilitas fisik. Fasilitas sosial dapat diartikan sebagai aktivitas atau sarana pelayanan yang dapat melayani kebutuhan masyarakat yang bersifat dapat memberikan kepuasan sosial, mental dan spiritual diantaranya adalah sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana perdagangan, sarana rekreasi dan olah raga serta pemakaman umum. Sedangkan fasilitas fisik adalah aktivitas atau sarana yang dapat melayani masyarakat akan kebutuhan fisik, yaitu prasarana umum termasuk air minum, sanitasi lingkungan, sistem drainase, gas, listrik, jalan raya serta sarana perumahan.

Sedangkan sarana pelayanan masyarakat yang dimaksud dalam studi ini adalah sarana pelayanan masyarakat yang berfungsi sebagai penunjang untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya yang langsung melayani dan dirasakan manfaat keberadaannya dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar (*basic needs*) sehari-hari, yang terdiri dari :

- 1) Sarana Perdagangan;
- 2) Sarana Pendidikan ;
- 3) Sarana Kesehatan;
- 4) Sarana Rekreasi;
- 5) Sarana Peribadatan.

2.6.4. Wilayah Perluasan

Wilayah perluasan yang dimaksud khusus dalam penelitian ini adalah wilayah perluasan yang dimaksudkan dalam PP. No.3 Tahun 1995 tentang Perluasan Kota Sukabumi, yaitu dengan memasukkan sebagian dari wilayah Kabupaten Sukabumi yang meliputi sebagian Kecamatan Sukabumi yang terdiri dari lima desa, antara lain:

- 1) Desa Cisarua;
- 2) Desa Dayeuh Luhur;
- 3) Desa Karang Tengah;
- 4) Desa Subang Jaya;
- 5) Desa Sukakarya, dan

sebagian Kecamatan Baros yang terdiri dari 13 desa, antara lain :

- 1) Desa Babakan;
- 2) Desa Baros;
- 3) Desa Cibeureum Hilir;
- 4) Desa Cikundul;
- 5) Desa Cipanengah;
- 6) Desa Jaya Mekar;

- 7) Desa Jaya Raksa;
- 8) Desa Lembur Situ;
- 9) Desa Limusnunggal;
- 10) Desa Sindang Palay;
- 11) Desa Sindangsari;
- 12) Desa Situmekar;
- 13) Desa Sudajaya Hilir.

Adapun maksud dan tujuan diadakannya perluasan wilayah atau pemekaran Kota Sukabumi yang tersirat dalam PP. No.3 tahun 1995. Keempat maksud dan tujuan tersebut antara lain adalah :

- 1) Pemerataan konsentrasi aktivitas-aktivitas penduduk, sehingga mengurangi beban dan terpusatnya berbagai kegiatan di kawasan pusat kota.
- 2) Penambahan lahan untuk menyediakan kebutuhan akan ruang kota untuk berbagai proses pembangunan dan kebutuhan masyarakat Kota Sukabumi.
- 3) Terjadinya integrasi antara wilayah Kota Sukabumi dengan kawasan pinggiran (*marginal*) Kota Sukabumi, sehingga akan dapat mengurangi komuter masyarakat ke pusat kota.
- 4) Penumbuhan aktivitas-aktivitas baru di kawasan pinggiran (*marginal*) Kota Sukabumi, dengan membangun sarana pelayanan masyarakat untuk memenuhi dan melayani kebutuhan penduduk di wilayah perluasan itu sendiri dan wilayah sekitarnya.

Dari beberapa pengertian mengenai evaluasi, kinerja, sarana pelayanan masyarakat dan wilayah perluasan, maka dapat ditarik kesimpulan yang dimaksud dengan *evaluasi kinerja pembangunan sarana pelayanan masyarakat di wilayah perluasan* adalah :

"Produksi mengenai informasi nilai dari kemampuan (prestasi) hasil kerja struktur tata ruang untuk menjalankan aktivitas permukiman yang sesuai dengan persyaratan, ketentuan dan peraturan dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari (*basic needs*) dengan membangun sarana pelayanan masyarakat yang berfungsi sebagai penunjang dalam penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya yang terdiri dari sarana perdagangan, pendidikan, kesehatan, rekreasi dan peribadatan di wilayah perluasan Kota Sukabumi".

2.7. Rangkuman Teori

Dari uraian yang telah disampaikan pada subbab 2.1 sampai subbab 2.6 di depan, beberapa hal yang berkaitan erat untuk memperjelas dan memudahkan dalam mencari variabel-variabel penelitian yang akan dikembangkan lebih lanjut dalam masalah evaluasi kinerja sarana pelayanan masyarakat dan pilihan strategis dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Batasan-batasan yang diberikan guna memberikan ciri khusus (karakteristik) suatu *neighborhood unit* (Gollany, 1984:181), antara lain adalah :
 - a. Batasan fisik
 - b. Jaringan sosial
 - c. Penggunaan lahan yang terkonsentrasi dari fasilitas
 - d. Ikatan simbolisme dan emosional/ikatan sosial kemasyarakatan dari para penghuninya.
2. Aspek-aspek penting dalam perencanaan modern suatu *neighborhood unit*, antara lain adalah :
 - a. Prinsip *social integrity*, terjadinya kesatuan ikatan sosial kemasyarakatan.
 - b. Prinsip *social identity*, terjadinya ciri khas serta tumbuhnya identitas sosial kemasyarakatan.

- c. Prinsip *social governance*, terjadinya pengaturan dan pengelolaan (swakelola dalam pengaturan unit hunian)
 - d. Prinsip *sharing system*, terjadinya tukar menukar pelayanan untuk memenuhi berbagai kebutuhan dari pusat-pusat pelayanan yang ada di lingkungannya.
 - e. Prinsip *self containment*, terjadinya pemenuhan kebutuhan sehari-hari bagi warga huniannya oleh pusat pelayanan yang ada di lingkungannya.
 - f. *Walking distance scale* (sakala jarak tempuh dengan jalan kaki) untuk memberikan efisiensi dan efektivitas penyebaran dan penempatan dari suatu sarana (fasilitas) sehingga akan memberikan kemudahan tersedianya fasilitas serta mudah dalam jarak jangkauan ke fasilitas (Gollany, 1984:188).
3. Pembagian jenis fasilitas umum perkotaan (*urban public facilities*)/jenis sarana pelayanan masyarakat menurut Djoko Sujarto (1982), antara lain adalah:
- a. Sarana kelembagaan;
 - b. Sarana pelayanan kesejahteraan;
 - c. Sarana pelayanan ekonomi;
 - d. Sarana rekreasi dan,
 - e. Sarana perangkutan.
4. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan fasilitas pelayanan masyarakat antara lain adalah :
- a. Kondisi fisik atau keadaan geografi suatu wilayah;
 - b. Struktur umum;
 - c. Ukuran atau luas suatu wilayah;
 - d. Keadaan perekonomian;
 - e. Kepadatan penduduk;

- f. Kondisi sosial politik di wilayah tersebut dan,
 - g. Keinginan masyarakat.
5. Standar perencanaan sarana pelayanan masyarakat di kawasan permukiman kota berdasarkan Kepmen. PU. No.137/KPTS/1987, faktor-faktor yang menentukan dalam perencanaan sarana pelayanan masyarakat, antara lain adalah :
- a. Jenis sarana (fasilitas);
 - b. Penduduk pendukung;
 - c. Lokasi atau sebaran sarana;
 - d. Luas bangunan dan luas tanah/lahan;
 - e. Radius pencapaian / jarak jangkauan sarana.
6. Pilihan strategis pada hakikatnya berdasarkan empat hal pokok (Sujarto, 2001), yaitu :
- a. Saling keterkaitan dari masalah yang harus diputuskan yang dicirikan sebagai strategi, dan adanya ketidak pastian sebagai sumber dari berbagai kesukaran-kesukaran untuk menetapkan suatu keputusan.
 - b. Keterkendalian pilihan memberikan arti tidak sekedar menentukan rentang dari alternatif pemecahan masalah, tetapi suatu pilihan yang lebih luas yang bersifat mendesak antara sesuatu yang pasti dengan yang tidak pasti.
 - c. Berdampak, memberikan arti suatu dinamika pengambilan keputusan dimana pemecahan masalah mendesak dikaitkan dengan usaha pemecahan masalah serta dampak yang lebih luas.
 - d. Derajat kepentingan, didalam penentuan keputusan dalam kenyataannya akan dipengaruhi oleh unsur-unsur penentu yaitu unsur pembuat kebijakan (Pemerintah Daerah dan DPRD), masyarakat yang berkepentingan dan perencanaan kota.

BAB III DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

3.1. Gambaran Umum Kota Sukabumi

Kota Sukabumi terletak diantara dua ibukota, dengan jarak jangkau 90 km dari ibukota propinsi dan 120 km dari ibukota negara. Secara geografis Kota Sukabumi ini berada di bagian selatan-tengah Jawa Barat antara:

- $106^{\circ} 45' 50''$ BT – $106^{\circ} 45' 10''$ Bujur Timur
- $60^{\circ} 49' 25''$ LS – $6^{\circ} 50' 44''$ Lintang Selatan

Terletak di kaki Gunung Gede dan Gunung Pangrango sebelah Selatan dengan ketinggian 550 diatas permukaan air laut di sebelah Selatan dan 770 di atas permukaan air laut pada bagian Utara sedangkan bagian tengah rata-rata 650 diatas permukaan air laut, dengan suhu maksimal 19° C dan terendah 15° C. Oleh karena itu Kota Sukabumi mempunyai kekuatan pada iklim mikro yang relatif nyaman bagi manusia untuk tempat peristirahatan dan beraktivitas dalam berbagai aspek kehidupan terutama pendidikan, kesehatan dan jasa perdagangan.

Adapun luas wilayah Kota Sukabumi adalah 4.800,231 Ha (48 Km^2) yang terdiri dari 7 kecamatan 33 kelurahan (tahun 2000) setelah mengalami perluasan kota pada tahun 1995, sebelumnya luasnya hanya 1.215 ha. Untuk lebih jelasnya mengenai batas administrasi Kota Sukabumi dapat dilihat pada gambar Peta II 0.1

3.1.1 Demografi / Kependudukan

3.1.1.1 Komposisi Penduduk

Dengan letaknya yang strategis ditambah dengan iklim yang sejuk, maka Kota Sukabumi tumbuh menjadi pusat kegiatan ekonomi terutama perdagangan dan jasa yang



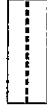




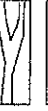



TESIS

**EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN SARANA
PELAYANAN MASYARAKAT DI WILAYAH PERLUJARAN**

GAMBAR

PETA WILAYAH ADMINISTRASI

-  Batas Administrasi
-  Batas Kecamatan
-  Batas Kelurahan
-  Jalan Kereta Api
-  Jalan Arteri Primer
-  Jalan Kolektor Primer
-  Jalan Arteri Sekunder
-  Sungai
-  Renc. Jl. Lingkar Selatan



SKALA

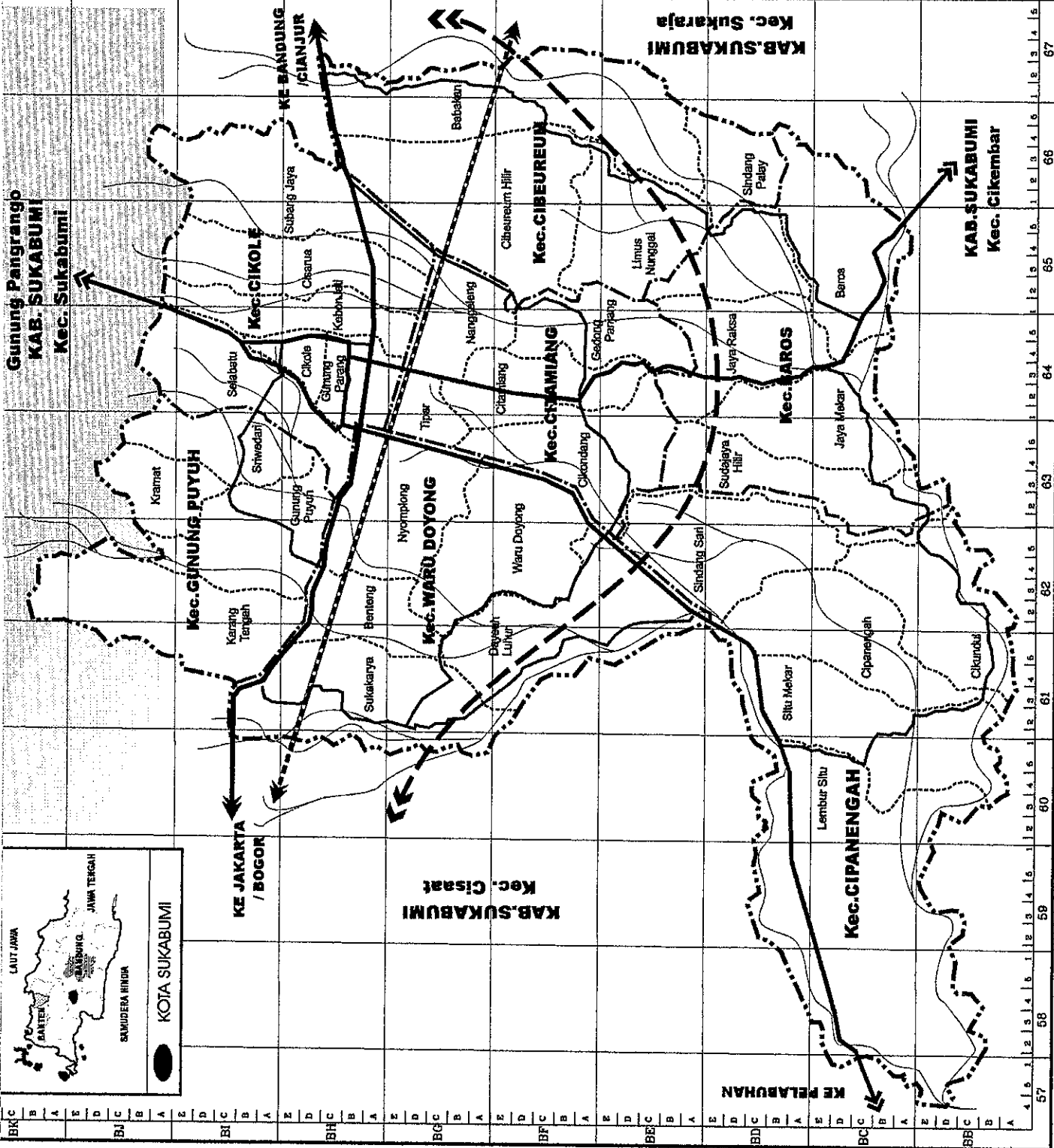
1 : 55.000

No. GAMBAR

III.01

SUMBER

BAPPEDA KOTA SUKABUMI



KOTA SUKABUMI

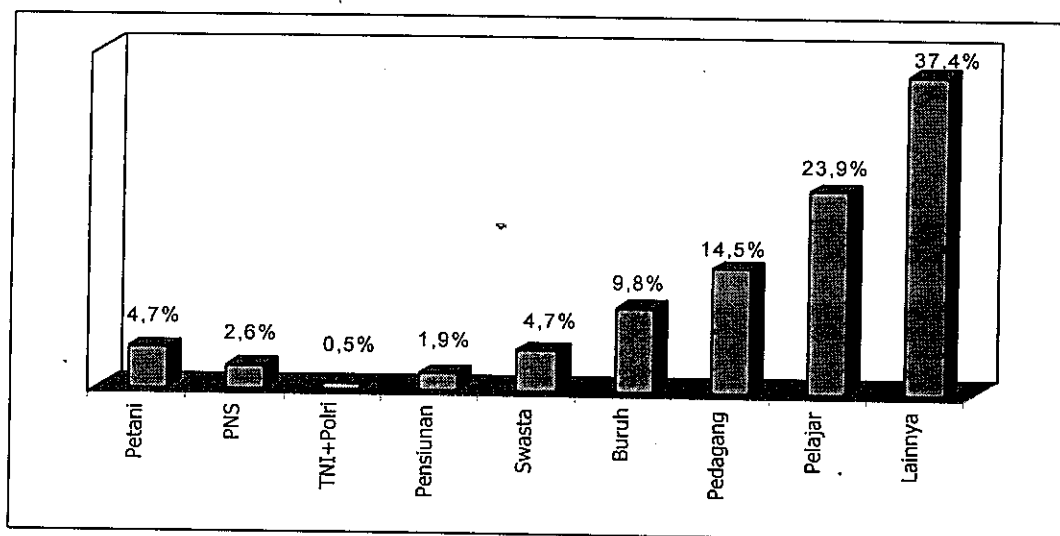
LAUT JAWA
SAWUDERA HINDIA
JAWA TENGAH
SUKABUMI

melayani masyarakat Kota Sukabumi, sebagian masyarakat Kabupaten Sukabumi dan masyarakat sebagian Kabupaten Cianjur. Sehingga daya tariknya pun dari waktu ke waktu terus meningkat, dan tidak bisa menghindari arus urbanisasi ke Kota Sukabumi.

Dengan adanya arus urbanisasi dan penambahan penduduk alami, jumlah penduduk Kota Sukabumi terus meningkat. Dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk 1,11 pertahun, jumlah penduduk Kota Sukabumi pada tahun 2001 telah mencapai 243.283 jiwa dan diperkirakan pada tahun 2005 akan mencapai ± 266.500 jiwa.

Kota Sukabumi mempunyai penduduk yang sangat heterogen. Sebagian besar penduduk ($\pm 57,3\%$) berumur produktif (15-54 tahun). Sementara gambaran komposisinya menurut jenis mata pencaharian adalah seperti pada Gambar 3.1

Gambar 3.1
**KOMPOSISI PENDUDUK KOTA SUKABUMI
 MENURUT MATA PENCAHARIAN TAHUN 2001**



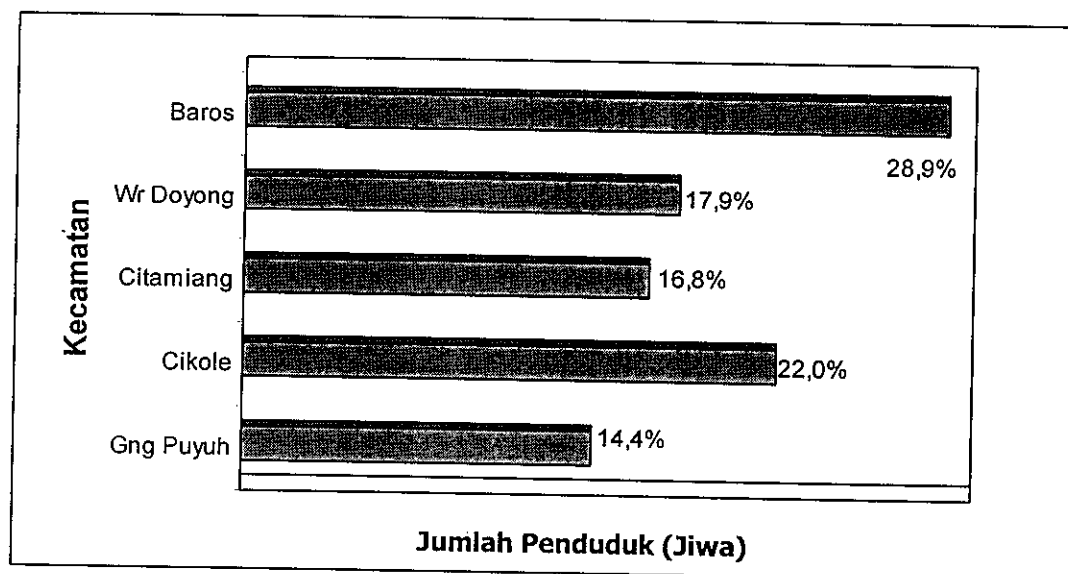
(Sumber : BPS Kota Sukabumi, 2001)

3.1.1.2 Sebaran dan Kepadatan Penduduk

Dari keseluruhan kecamatan yang ada, tercatat bahwa sebagian besar penduduk Kota Sukabumi tinggal di Kecamatan Baros (49 %), kemudian disusul Kecamatan Cikole (37,3%), dan seterusnya dapat dilihat pada Gambar 3.2

Kependudukan merupakan salah satu aspek yang penting, karena penduduk merupakan salah satu cerminan kemajuan dari suatu daerah. Dengan mengetahui komposisi dan perkembangan penduduk maka dapat menghitung berbagai kebutuhan pendukung penduduk, sehingga akan tercapai keselarasan kehidupan bagi penduduk dan kegiatannya. Jumlah penduduk Kota Sukabumi hasil registrasi penduduk pada tahun 1996 tercatat 239.052 jiwa dan tahun 2001 tercatat 243.183 jiwa. Dalam periode tersebut laju pertumbuhan penduduk rata-rata 1,11% per tahun. Kepadatan penduduk berdasarkan luas administrasi di Kota Sukabumi selama 1996-2001 mengalami sedikit peningkatan. Selama periode tersebut mempunyai kepadatan penduduk rata-rata 51 Jiwa/ha, sedangkan berdasarkan luas terbangun mempunyai kepadatan penduduk 138 jiwa/ha. Perincian kepadatan penduduk berdasarkan luas administrasi dan luas terbangun untuk tiap kecamatan dapat dilihat pada Tabel III.1 di bawah ini.

Gambar 3.2
SEBARAN PENDUDUK KOTA SUKABUMI TAHUN 2001



(Sumber : BPS Kota Sukabumi 2001)

Tabel III.1
**KEPADATAN PENDUDUK TAHUN 2001
 BERDASARKAN LUAS ADMINISTRASI DAN LUAS TERBANGUN**

NO	KECAMATAN	LUAS WILAYAH		JUMLAH		Kepadatan Rata-rata	
		ADM (km)	Terbangun (km)	Penduduk (Jiwa)	Laju Pertmb Pddk	ADM (Jiwa/km)	Terbgn (Jiwa/km)
1.	Gng.Puyuh	5,4958	3,0779	35.125	0,63	6.386	11.412
2.	Cikole	7,0828	4,7290	53.494	0,09	7.556	11.312
3.	Citamiang	4,0400	2,1505	40.771	0,72	10.092	18.959
4.	Warudoyong	7,5983	2,6754	43.592	0,92	5.736	16.294
5.	Baros	23,7854	6,2801	70.203	2,65	2.952	11.179
	JUMLAH	48,0023	18,9129	243.185	1.11	5.066	13.833

Sumber : BPS dan Bappeda Kota Sukabumi, 2002

3.1.2. Kondisi Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat tingkat perkembangan perekonomian disuatu daerah, diantaranya dengan melihat PDRB perkapita, PDRB menurut sektor kegiatan usaha, kontribusi sektor kegiatan usaha dan laju pertumbuhan PDRB. Dalam tahun 1998, PDRB Kota Sukabumi atas dasar harga berlaku telah mencapai Rp.851 milyar. Walaupun selama periode 1995-1997, perekonomian Kota Sukabumi mengalami peningkatan, tetapi tahun 1998 menunjukkan penurunan yang disebabkan adanya krisis ekonomi. Hal ini terlihat dari laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan, pada tahun 1998 mengalami kontraksi sebesar 17,15 %.

Tingkat pendapatan penduduk Kota Sukabumi dapat dilihat melalui pendekatan PDRB perkapita. Walaupun nilai tersebut bukan merupakan nilai riil akan tetapi dapat mendekati dalam memperkirakan secara makro rata-rata pendapatan yang diterima oleh penduduk, yang digunakan untuk melihat indikator tingkat kemakmuran suatu daerah. PDRB perkapita Kota Sukabumi berdasarkan harga konstan selama tahun 1995 sampai

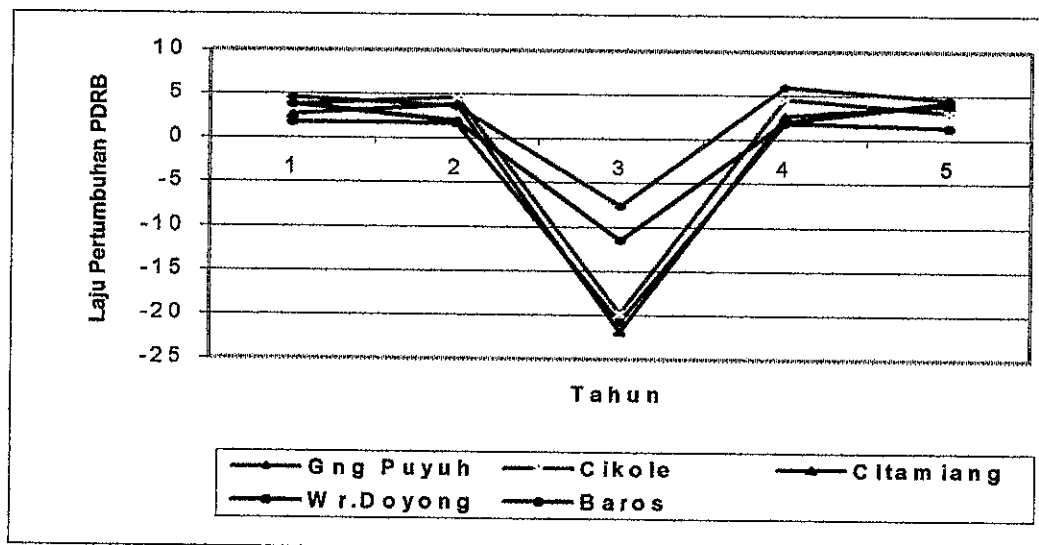
dengan 2001 mengalami peningkatan yang belum maksimal setiap tahunnya. Namun hal ini kurang mencerminkan adanya kenaikan daya beli masyarakat karena masih terkandung kenaikan harga (inflasi). Sedangkan untuk lebih mencerminkan ada tidaknya kenaikan daya beli masyarakat secara umum adalah PDRB perkapita berdasarkan harga konstan, yang mana nilainya menunjukkan gerakan yang cukup lambat dari tahun 1995 sampai dengan 1997, bahkan turun pada tahun 1998. Untuk lebih jelasnya PDRB perkapita dapat dilihat pada Tabel III.2 dan Gambar 3.5, di bawah ini.

Tabel III.2.
**LAJU PERTUMBUHAN PDRB KECAMATAN
 ATAS DASAR HARGA KONSTAN 1993 DI KOTA SUKABUMI 1995-2001**

NO	KECAMATAN	1996	1997	1998	1999	2000	2001
1.	Gng.Puyuh	4,48	3,56	(7,66)	5,88	4,44	4,6
2.	Cikole	3,68	4,55	(19,85)	4,48	2,99	4,4
3.	Citamiang	2,57	3,73	(21,88)	2,57	3,83	3,8
4.	Warudoyong	3,76	1,84	(11,54)	1,91	4,16	3,8
5.	Baros (wil.perluasan)	1,73	1,65	(20,80)	1,78	1,30	1,5
	SUKABUMI	3,24	3,07	(17,15)	3,20	3,34	3,6

Sumber : BPS Kota Sukabumi 1996-2001

Gambar 3.3
**LAJU PERTUMBUHAN PDRB KECAMATAN
 ATAS DASAR HARGA KONSTAN 1993 TAHUN 1995-2001**



Sumber : BPS Kota Sukabumi, 2001

3.1.3. Pola Jaringan Transportasi

Jaringan jalan sebagai sarana perhubungan dalam menunjang fungsi Kota Sukabumi, direncanakan untuk menciptakan keadaan optimasi struktur pergerakan orang maupun barang. Jaringan jalan dengan klasifikasi arteri primer direncanakan akan menghubungkan Kota Sukabumi dengan kota besar di Jawa Barat antara lain Jakarta melalui Bogor dan Bandung melalui Cianjur. Jaringan jalan arteri sekunder menghubungkan Kota Sukabumi dengan pusat-pusat kegiatan di wilayah pengaruh Kota Sukabumi.

Untuk lebih jelasnya mengenai pola jaringan transportasi di Kota Sukabumi dapat dilihat pada gambar Peta II.04

3.1.4. Pola Penggunaan Lahan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.3 tahun 1995 tentang Perluasan Wilayah Kotamadya Dati II Sukabumi, maka luas Kotamadya Sukabumi dari 1.215 Ha menjadi 4.800,231 Ha. Hal ini tentunya akan merubah tata guna lahan yang ada dalam penggunaan atas lahan terbangun dan belum terbangun. Dari keseluruhan luas kota, kawasan yang terbangun telah mencapai 1.891,29 ha (39,4%) dan yang belum terbangun luasnya adalah 2.908,932 ha(60,6%).

Dalam perkembangannya Kota Sukabumi diarahkan sebagai pusat pelayanan jasa perdagangan, pendidikan dan kesehatan baik bagi penduduk Kota Sukabumi dan daerah hinterlandnya. Perkembangan ini tentunya akan meningkatkan jumlah penduduk dan perumahan di Kota Sukabumi. Penambahan penggunaan lahan untuk perumahan dari 658,9 ha menjadi 1.634,09 ha, hal ini tentunya juga akan berpengaruh terhadap pembangunan sarana pelayanan masyarakat di wilayah perluasan sebagai pemenuhan kebutuhan sehari-hari (*basic needs*).












TESIS

**EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN SARANA
PELAYANAN MASYARAKAT DI WILAYAH PERLUASAN**

GAMBAR

PETA JARINGAN JALAN

-  Batas Administrasi
-  Batas Kecamatan
-  Jalan Arteri Primer
-  Jalan Arteri Sekunder
-  Jalan Kolektor Primer
-  Jalan Kolektor Sekunder
-  Jalan Lokal
-  Jalan Kereta Api
-  Renc. Lingkar Selatan

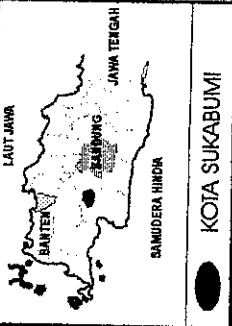
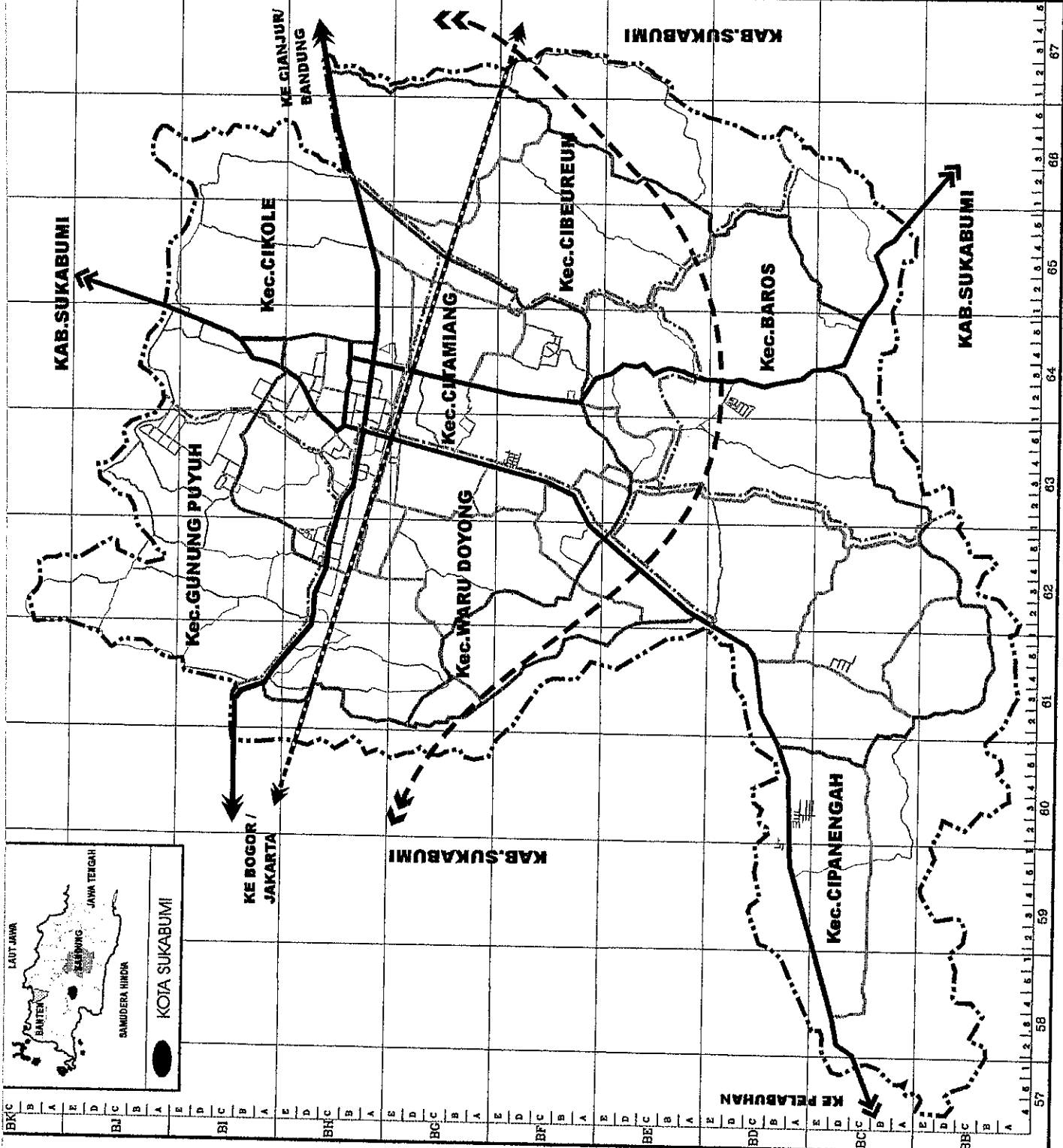


SKALA
1:55.000

No. GAMBAR
III. 04

SUMBER

BAPPEDA KOTA SUKABUMI



57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67
A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	A
B	C	D	E	A	B	C	D	E	A	B
C	D	E	A	B	C	D	E	A	B	C
D	E	A	B	C	D	E	A	B	C	D
E	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E

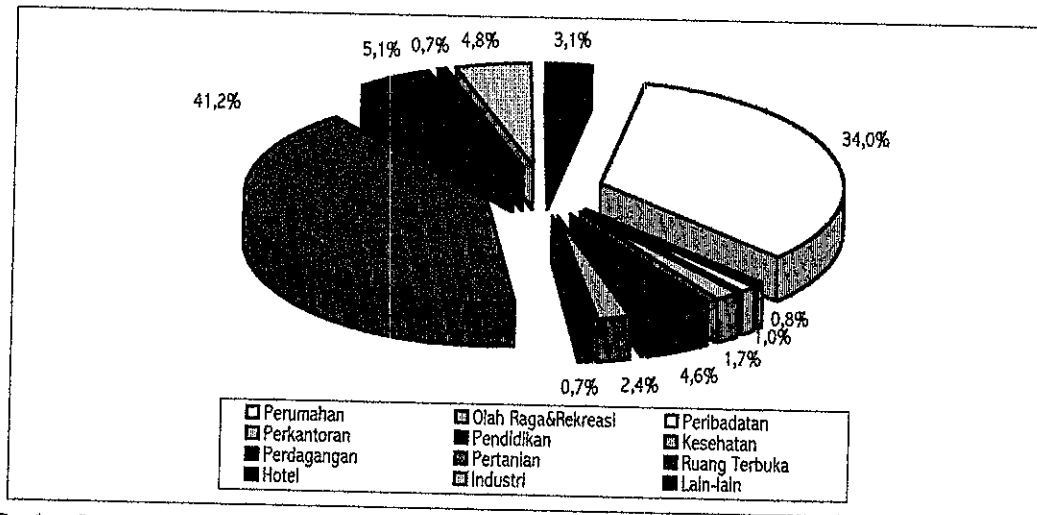
Kawasan belum terbangun didominasi oleh tanah pertanian yang terdapat di wilayah perluasan, sehingga tata guna lahan Kota Sukabumi merupakan percampuran antara tata guna tanah kota dan pedesaan. Perbedaan penggunaan lahan ini memberikan pengaruh baik terhadap pengembangannya. Konflik penggunaan lahan diharapkan tidak muncul dengan penerapan fungsi sesuai dengan peruntukannya. Untuk lebih jelasnya penggunaan lahan secara umum di Kota Sukabumi dapat dilihat pada Tabel III.3 dan Gambar 3.4 di bawah ini.

Tabel III.3
**RENCANA PENGGUNAAN LAHAN
 DI WILAYAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2002**

No	Penggunaan lahan	Jumlah	(%)
1	Perumahan	1.634,09	34,04
2	Olah Raga&Rekreasi	38,76	0,81
3	Peribadatan	48,35	1,01
4	Perkantoran	82,63	1,72
5	Pendidikan	218,69	4,56
6	Kesehatan	113,67	2,37
7	Perdagangan	31,50	0,66
8	Pertanian	1.975,69	41,16
9	Ruang Terbuka	243,50	5,07
10	Hotel	32,52	0,68
11	Industri	231,59	4,82
12	Lain-lain	149,24	3,11
	JUMLAH	4.800,23	100,00

Sumber : Bappeda Kota Sukabumi, 2002

Gambar 3.4
RENCANA PENGGUNAAN LAHAN
DI WILAYAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2002



Sumber : Bappeda Kota Sukabumi, 2002

3.1.5. Pembangunan Sarana Pelayanan Umum Perkotaan di Kota Sukabumi

Pertumbuhan dan perkembangan Kota Sukabumi membawa dampak dan pengaruh pada struktur tata ruang Kota Sukabumi. Desakan kebutuhan akan perumahan dan sarana perkotaan membawa perubahan terhadap tata guna dan pemanfaatan lahan perkotaan. Dalam perkembangannya Kota Sukabumi dihadapkan kepada berbagai permasalahan kota yang dirasakan mendesak untuk mendapatkan penanganan secepatnya. Dalam periode 1980-1990-an perkembangan kawasan pusat Kota Sukabumi mengalami peningkatan yang cukup pesat, dimana ditandai oleh munculnya berbagai aktivitas kota seperti pusat perdagangan dan perbelanjaan, pusat pendidikan, pusat hiburan dan rekreasi sampai akhir-akhir ini bermunculan sarana jasa dan perbankan.

Disisi lain perkembangan kawasan lainnya di Kota Sukabumi mengalami perkembangan dari berbagai aktivitas dan fungsi kota yang cenderung tidak terkendali. Dijalur-jalur utama kota banyak terjadi perubahan tata guna lahan dan peruntukkan yang













TESIS

**EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN SARANA
PELAYANAN MASYARAKAT DI WILAYAH PERLUASAN**

GAMBAR

PETA PENGGUNAAN LAHAN

-  Batas Administrasi
-  Permukiman
-  Perdagangan dan jasa
-  Pendidikan
-  Kesehatan
-  Olah Raga/Rekreasi
-  Pemerintahan/perkantoran
-  Pariwisata
-  Sub Terminal
-  Kawasan Hijau/Pertanian



SKALA

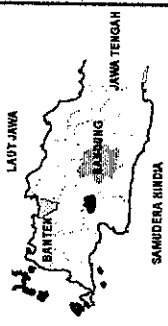
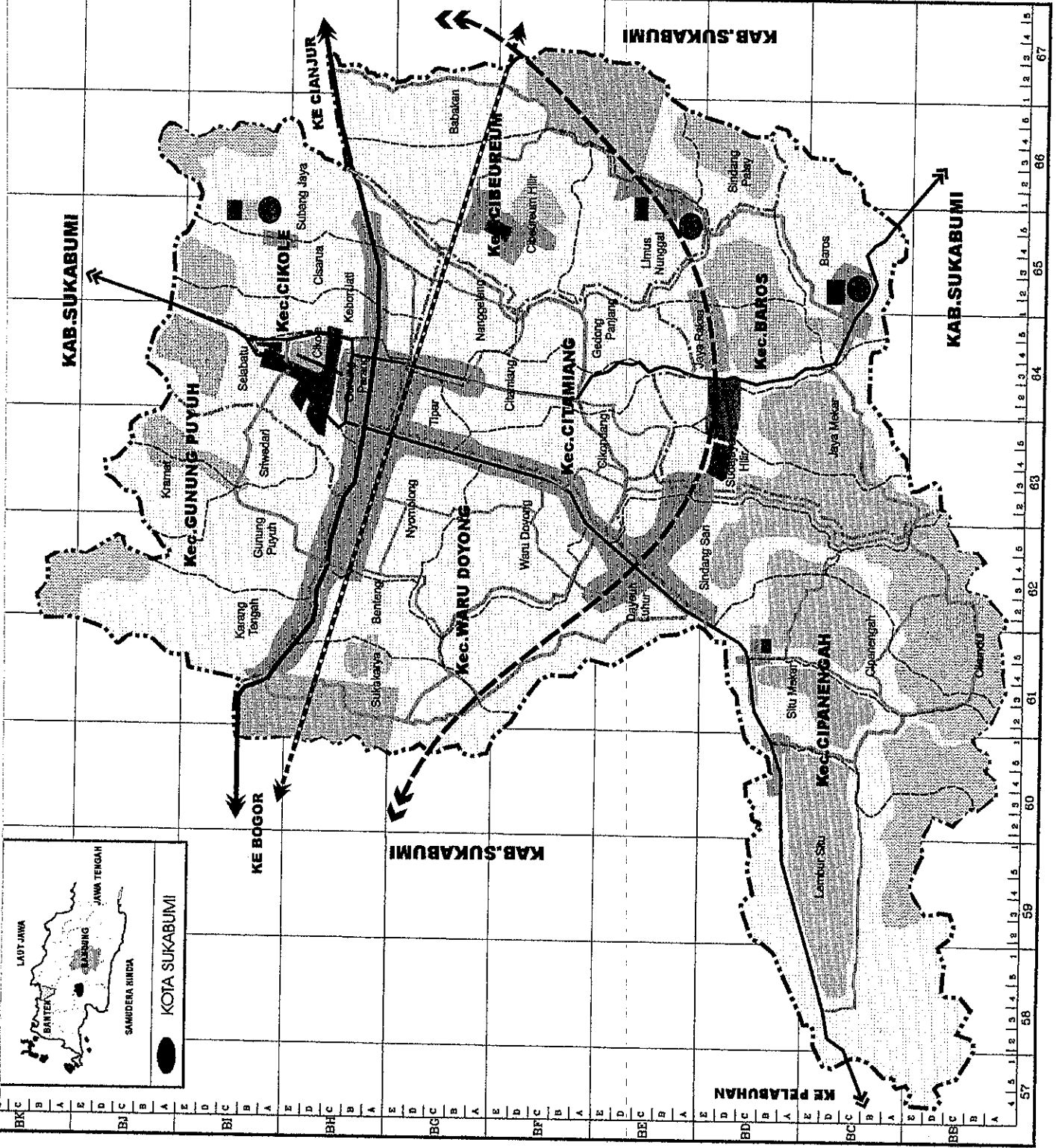
1:55.000

NO. GAMBAR

III.03

SUMBER

BAPPEDA KOTA SUKABUMI



KOTA SUKABUMI

semula pemukiman atau perumahan berubah menjadi kawasan komersial dan perdagangan. Hal ini tampak nyata di sekitar jalan Ahmad Yani, Jl.Harun Akbir, Jl. RE.Martadinata, Jl.Zaenal Zakse, Jl.Jend.Sudirman, Jl.Perintis Kemerdekaan, Jl.Pelabuhan.

Khususnya pembangunan sarana pelayanan masyarakat yang ada di wilayah Kota Sukabumi lama dirasakan sudah cukup kelengkapannya. Dalam artian warga Kota Sukabumi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya sudah dapat disediakan oleh fasilitas pelayanan masyarakat yang ada. Walaupun pembangunan sarana umum perkotaan masih pada taraf *basic needs approach* dan banyak disediakan oleh pemerintah daerah. Di beberapa tempat yang dirasa strategis secara lokasi, maka sektor swasta sudah mulai mengadakan pembangunan sarana pelayanan masyarakat khususnya sarana perdagangan, perkantoran serta sarana hiburan dan rekreasi.

Di kawasan-kawasan yang lebih kecil seperti lingkungan pemukiman, penyediaan dan pembangunan fasilitas pelayanan masyarakat masih terbatas untuk melayani penduduk/warga masyarakat setempat, sedangkan tingkat kelengkapan dan pelayanan dari fasilitas pelayanan masyarakat yang ada sangat dipengaruhi oleh tingkat sosial-ekonomi masyarakat. Pada beberapa kawasan perumahan (pemukiman) pada perkembangannya lebih baik dan lengkap dibandingkan dengan pada beberapa kawasan atau lingkup lain. Jenis sarana pelayanan masyarakat yang bisa terdapat di tingkat lingkungan berkisar pada sarana peribadatan, pendidikan, kesehatan dan sarana perdagangan eceran tingkat lingkungan (warung, kios, toko). Sedangkan sarana hiburan dan rekreasi serta tempat-tempat olah raga masih terbatas, bahkan ruang terbuka (taman kota) di beberapa pemukiman padat (terutama perkampungan) agak jarang didapatkan.

3.2. Deskripsi Wilayah Perluasan

3.2.1. Wilayah Perluasan Kota Sukabumi berdasarkan PP. N0.3 Tahun 1995.

Munculnya pengadaan perluasan wilayah Kota Sukabumi tahun 1995 berdasarkan PP. No.3 Tahun 1995 ini dilatar belakangi oleh pertumbuhan dan perkembangan Kota Sukabumi yang pesat. Dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Jawa Barat tahun 1994-1999, Kota Sukabumi telah di arahkan sebagai wilayah penunjang tengah, dengan fungsi-fungsinya antara lain :

- 1) Fungsi Perumahan / Permukiman
- 2) Fungsi Pemerintahan
- 3) Fungsi Perdagangan dan Jasa
- 4) Fungsi Koleksi dan Distribusi Lokal
- 5) Fungsi Pariwisata.

Dengan latar belakang pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi di kota-kota besar di Indonesia, maka Kota Sukabumi mengalami hal yang sama. Faktor internal seperti tingginya laju pertumbuhan penduduk, serta tingkat kepadatan yang tinggi, demikian pula dengan tingginya tingkat urbanisasi yang masuk ke wilayah Kota Sukabumi terutama komuter dari wilayah pinggiran ke pusat kota. Untuk menampung akan kebutuhan lahan bagi pembangunan dan masyarakat Kota Sukabumi maka di perlukan perluasan wilayah sesuai dengan PP. No.3 Tahun 1995 Kota Sukabumi mengalami perluasan dari 1.215 ha menjadi 4.803,231 ha. Adapun maksud dan tujuan diadakannya perluasan, adalah :

- 1) Pemerataan konsentrasi aktivitas-aktivitas penduduk, sehingga mengurangi beban dan terpusatnya berbagai kegiatan di kawasan pusat kota.

- 2) Penambahan lahan untuk menyediakan kebutuhan akan ruang kota untuk berbagai proses pembangunan dan kebutuhan masyarakat Kota Sukabumi.
- 3) Terjadinya integrasi antara wilayah Kota Sukabumi dengan kawasan pinggiran Kota Sukabumi, sehingga akan mengurangi komuter masyarakat ke pusat kota.
- 4) Penumbuhan aktivitas-aktivitas baru di kawasan pinggiran Kota Sukabumi, dengan membangun sarana pelayanan masyarakat untuk memenuhi dan melayani kebutuhan penduduk di wilayah perluasan itu sendiri dan wilayah sekitarnya.

Perluasan wilayah dimaksud yaitu dengan memasukkan sebagian dari wilayah Kabupaten Sukabumi sebanyak 18 kelurahan yang masuk dalam wilayah perluasan yang meliputi sebagian Kecamatan Sukabumi yang terdiri dari lima desa dan sebagian Kecamatan Baros terdiri dari 13 desa. Penyebaran 18 Kelurahan yang menjadi perluasan Kota Sukabumi tersebut terbanyak 14 kelurahan berada di arah selatan Kota, sebagian berada di arah Barat sebanyak dua kelurahan dan dua kelurahan di arah Timur.

Delapan belas kelurahan yang masuk ke dalam wilayah Kota Sukabumi setelah diundangkannya PP. No.3 Tahun 1995, adalah :

1. Kelurahan Subang Jaya
2. Kelurahan Cisarua
3. Kelurahan Lembur Situ
4. Kelurahan Cipanengah
5. Kelurahan Sindang Sari
6. Kelurahan Sudajaya Hilir
7. Kelurahan Limus Nunggal
8. Kelurahan Jayaraksa
9. Kelurahan Dayeuh Luhur
10. Kelurahan Cibereum Hilir

11. Kelurahan Jaya Mekar
12. Kelurahan Sindang Palay
13. Kelurahan Cikundul
14. Kelurahan Babakan Sirna
15. Kelurahan Situ Mekar
16. Kelurahan Cikundul
17. Kelurahan Sukakarya
18. Kelurahan Karang Tengah

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kelurahan-kelurahan yang masuk ke dalam wilayah Kota Sukabumi pada tahun 1995, dapat dilihat pada gambar Peta III.02 di bawah ini.

3.2.2. Jumlah dan Sebaran Penduduk di Wilayah Perluasan

Jumlah penduduk wilayah perluasan sampai dengan tahun 2001 ini mencapai 123.093 merupakan jumlah yang paling besar diantara kecamatan-kecamatan lain di wilayah Kota Sukabumi, akan tetapi apabila dilihat dari perbandingan antara luas lahan dengan jumlah penduduk di wilayah perluasan Kota Sukabumi, maka tingkat kepadatan penduduk di wilayah perluasan merupakan yang paling kecil yaitu 2.952 jiwa/km (dapat dilihat pada Tabel III.1). Sehingga masih memungkinkan untuk melakukan pembangunan-pembangunan sarana pelayanan masyarakat di wilayah perluasan Kota Sukabumi.

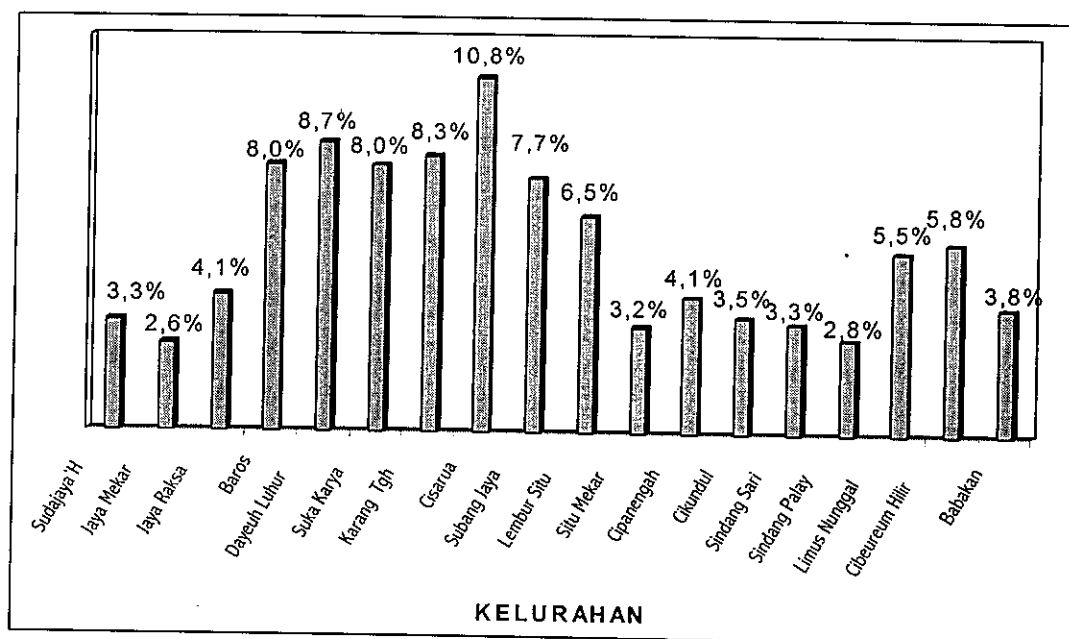
Untuk laju pertambahan penduduk di wilayah perluasan Kota Sukabumi merupakan yang paling besar diantara kecamatan-kecamatan lain di wilayah Kota Sukabumi, yaitu mencapai 2,65 % pertahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel III.4 di bawah ini, sedangkan untuk sebaran penduduk di wilayah perluasan dapat dilihat pada Gambar 3.5 berikut.

Tabel III.4
**JUMLAH PENDUDUK
 DI WILAYAH PERLUASAN TAHUN 2001**

NO	KECAMATAN/ KELURAHAN	JUMLAH			
		KK	LAKI-LAKI	WANITA	PENDDK
1.	Kec. Baros	6.552	12.436	11.985	24.421
2.	Kec. Lembur Situ	7.867	14.041	13.708	27.749
3.	Kec.Cibeureum	6.456	12.154	11.933	24.087
4.	Kel.Karang Tengah	2.712	5.723	5.484	11.207
5.	Kel.Sukakarya	2.644	5.530	5.279	10.809
6.	Kel.Cisarua	3.624	7.307	7.194	14.501
7.	Kel.Subang Jaya	2.673	5.129	5.190	10.319
	JUMLAH	33.528	62.320	60.772	123.093

Sumber : BPS Kota Sukabumi, 2001

Gambar 3.4
**SEBARAN PENDUDUK
 DI WILAYAH PERLUASAN TAHUN 2001**



Sumber : BPS Kota Sukabumi, 2001

Sedangkan jarak masing-masing kelurahan ke pusat kota relatif bervariasi, yang paling dekat adalah Kelurahan Cisarua (2 km) dan yang paling jauh Kelurahan Cikundul mencapai 12 km, namun untuk jarak kelurahan dengan subpusat dalam hal ini kecamatan

ada yang cenderung sangat jauh, yaitu Kelurahan Cibereum Hilir (19 km). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel III.5 di bawah ini.

Tabel III.5
JARAK KELURAHAN, PUSAT KOTA DAN SUB PUSAT KECAMATAN
DI WILAYAH PERLUASAN TAHUN 2001

NO	KELURAHAN	JARAK (M)	
		PUSAT KOTA	SUB PUSAT/KEC
1.	Kelurahan Subang Jaya	2.400	2.600
2.	Kelurahan Cisarua	2.000	2.100
3.	Kelurahan Lembur Situ	10.000	2.000
4.	Kelurahan Cipanengah	10.000	2.000
5.	Kelurahan Sindang Sari	8.000	2.000
6.	Kelurahan Sudajaya hilir	9.000	1.000
7.	Kelurahan Limus Nunggal	7.000	14.000
8.	Kelurahan Jayaraksa	4.000	12.000
9.	Kelurahan Dayeuh Luhur	5.000	3.000
10.	Kelurahan Cibereum Hilir	4.000	19.000
11.	Kelurahan Jaya Mekar	16.000	8.000
12.	Kelurahan Situmekar	9.000	1.000
13.	Kelurahan Cikundul	12.000	3.000
14.	Kelurahan Babakansima	5.000	19.000
15.	Kelurahan Situ Mekar	9.000	1.000
16.	Kelurahan Sindang Palay	6.000	12.000
17.	Kelurahan Sukakarya	5.900	3.300
18.	Kelurahan Karang Tengah	3.800	2.700

Sumber : BPS Kota Sukabumi, 2001

3.3. Ketersediaan Sarana Pelayanan Masyarakat di Wilayah Perluasan Kota Sukabumi.

Untuk wilayah perluasan Kota Sukabumi perkembangan pembangunan sarana pelayanan masyarakat yang terjadi seiring dan bersamaan dengan pengembangan kawasan perumahan baru yang banyak terdapat di bagian Timur (Taman Asri, villa Green Apple, Cibereum Permai, Bukit Ciaul Indah) dan bagian Selatan (Baros Kencana I dan II). Kecenderungan perkembangan pembangunan yang terjadi lebih kepada tingkat pelayanan dan pelengkapan bagi warga/penduduk sekitar lingkungan tempat tinggal. Sedangkan jenis dan macam fasilitas yang dibangun cukup beragam terutama jenis sarana kebutuhan dasar sehari-hari (*basic needs*).

Mengamati Pembangunan sarana pelayanan masyarakat yang telah dibangun di wilayah perluasan Kota Sukabumi terlihat penyebaran dan kelengkapan fasilitasnya

belum merata. Secara lokasi (tempat) pembangunan sarana pelayanan masyarakat yang dibangun masih melekat pada kawasan-kawasan perumahan yang cukup strategis, misalnya di sekitar perumahan baru atau di dekat pusat-pusat kegiatan kota lainnya. Ditingkat lingkungan dan sekitar tempat tinggal, kondisi sarana pelayanan masyarakat hanya untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari warga kota. Bahkan di lingkungan tertentu masih terbatas baik jumlah maupun macam sarana pelayanan masyarakat yang ada.

Pembangunan sarana pelayanan masyarakat di wilayah perluasan Kota Sukabumi terlihat ada hubungan dengan kebijaksanaan pengembangan tata ruang kota yang lebih kecil. Sebagai contoh untuk beberapa kawasan perumahan yang menyediakan lahan untuk sarana sosial, pihak swasta terlibat langsung dalam pengembangannya karena sudah jelasnya market (pasar) dari sarana yang dibangun. Walaupun sampai saat ini jenis sarana pelayanan masyarakat yang dibangun pihak swasta (developer) masih terbatas pada jenis sarana pelayanan ekonomi (toko dan ruko). Sedangkan pemerintah daerah lebih memprioritaskan kepada pembangunan sarana pendidikan, kesehatan dan perdagangan, seperti SD, SLTP, puskesmas dan sub terminal untuk masyarakat disekitarnya.

3.3.1. Sarana Perdagangan

Untuk sarana perdagangan yang ada di wilayah perluasan di sini adalah toko, warung/kios dan pasar lokal/lingkungan. Sejak masuk kedalam wilayah Kota Sukabumi dari tahun 1995 sampai dengan tahun 2001 untuk sarana perdagangan belum mencukupi. Hal ini dapat dilihat bahwa pembangunan untuk sarana perdagangan yang ada sampai dengan sekarang tidak ada peningkatan dari segi jumlah. Untuk toko mengalami











TESIS

**EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN SARANA
PELAYANAN MASYARAKAT DI MILYAH PERLUASAN**

GAMBAR

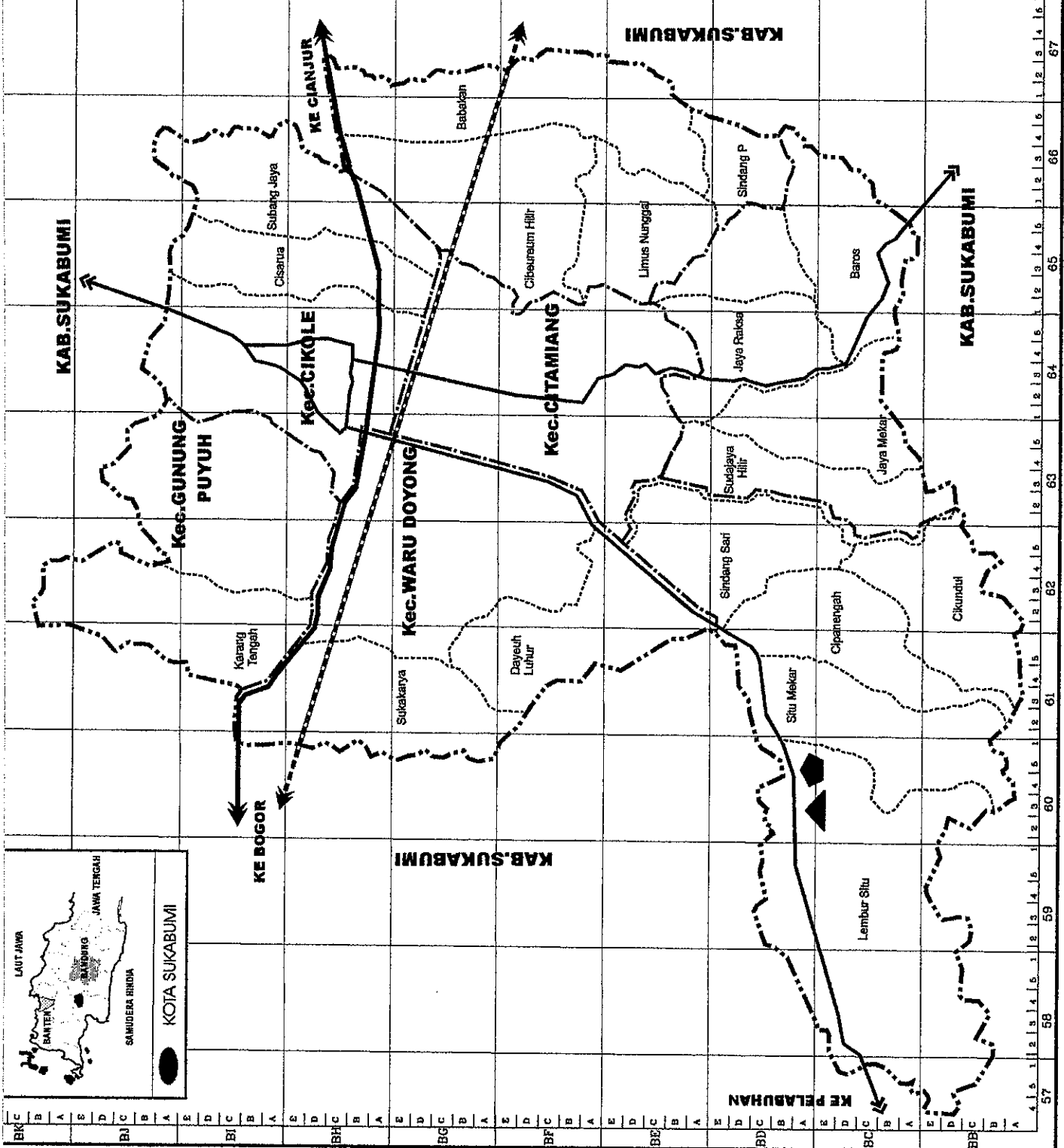
SEBARAN SARANA PERDAGANGAN

-  Batas Administrasi
-  Batas Kecamatan
-  Jalan Arteri Primer
-  Jalan Kereta Api
-  Kota Sukabumi Lama
-  Pasar Lingkungan
-  Sub Terminal

	SKALA	NO. GAMBAR
	1:55.000	III.05

SUMBER

HASIL ANALISA DATA 2002



LAUT JAWA
SAMUDERA RINDIA
SANTARA
SAMUDERA RINDIA
JAWA TENGAH
KOTA SUKABUMI

peningkatan sebanyak 111 buah, kios/warung sebanyak 417 dan pasar lokal/lingkungan tidak mengalami peningkatan. Sebagai sarana transportasi untuk menunjang perdagangan pada tahun 2000 dan 2001 terlihat ada peningkatan sebanyak satu buah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel III.6 di bawah ini.

Tabel III.6
**DATA SARANA PERDAGANGAN
DI WILAYAH PERLUASAN TAHUN 1995-2001**

NO	PARAMETER	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
1.	Juml.Warung/kios	455	512	596	650	670	785	872
2.	Juml.Toko	43	59	77	94	102	125	154
3.	Juml Pasar Lokal	1	1	1	1	1	1	1
4.	Juml.Sub Terminal	-	-	-	-	-	1	1
JUMLAH		499	572	674	745	773	911	128

Sumber : Profil Kelurahan dan Kecamatan 1996-2002

3.3.2. Sarana Kesehatan

Keberadaan sarana kesehatan di wilayah perluasan Kota Sukabumi dilihat masih kurang, hal ini terlihat sejak masuk kedalam wilayah Kota Sukabumi dari tahun 1995-2001 untuk pembangunan balai pengobatan mengalami peningkatan sebanyak lima buah, jumlah puskesmas mengalami peningkatan sejumlah enam buah dan BKIA sejak tahun 2001 baru ada di wilayah perluasan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel III.7. di bawah ini.

Tabel III.7
**DATA SARANA KESEHATAN
DI WILAYAH PERLUASAN TAHUN 1995-2001**

NO	PARAMETER	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
1.	Balai Pengobatan	3	4	6	6	8	9	11
2.	Puskesmas	2	2	3	4	6	7	8
3.	BKIA	-	-	-	-	-	-	1
JUMLAH		5	6	9	10	14	16	20

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Sukabumi 1996 - 2002

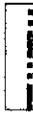










TESIS

**EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN SARANA
PELAYANAN MASYARAKAT DI MILITAH PERLUASAN**

GAMBAR

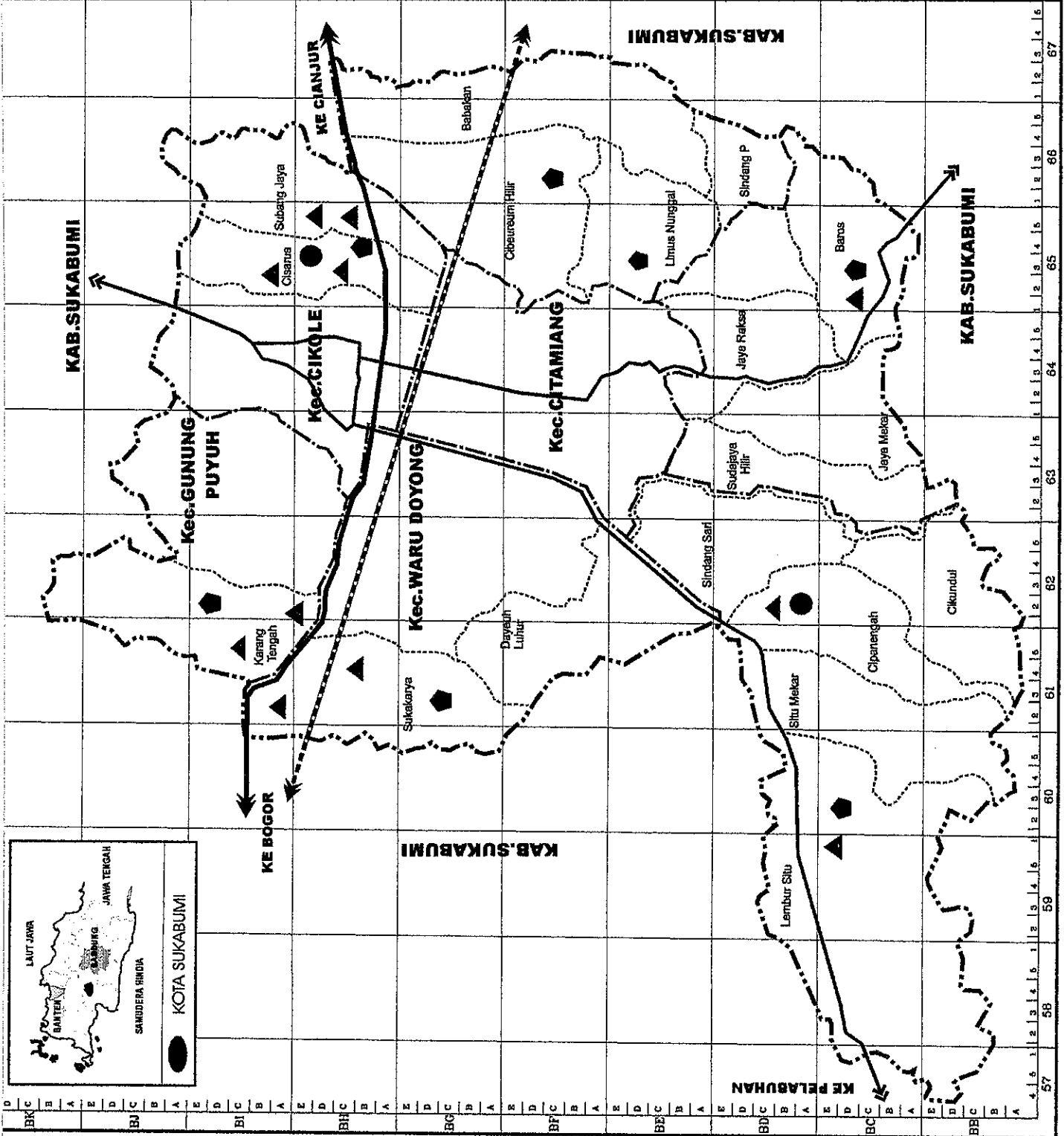
SEBARANSARANA KESEHATAN

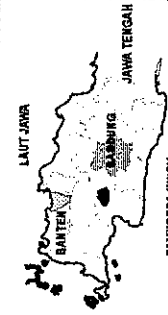
-  Batas Administrasi
-  Batas Kecamatan
-  Jalan Arteri Primer
-  Jalan Arteri Sekunder
-  Jalan Kereta Api
-  Puskesmas
-  Balai Pengobatan (BP)
-  BKIA

	SKALA	No. GAMBAR
	1:55.000	01.07

SUMBER

BAPPEDA KOTA SUKABUMI





KOTA SUKABUMI

3.3.3. Sarana Pendidikan

Jumlah sarana pendidikan yang ada di wilayah perluasan, untuk jumlah TK mengalami kenaikan dari tahun 1995-2001 sebanyak 25 buah, jumlah SD mengalami kenaikan yang tidak begitu besar hanya bertambah 15 buah, jumlah SLTP mengalami penambahan sebanyak enam buah dan SLTA juga mengalami penambahan yang tidak begitu besar yaitu sebanyak empat buah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel III.8 di bawah ini.

Tabel III.8
DATA SARANA PENDIDIKAN
DI WILAYAH PERLUASAN TAHUN 1995-2001

NO	PARAMETER	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
1.	TK	5	7	14	19	24	26	30
2.	Sekolah Dasar	48	50	52	53	53	58	63
3.	SLTP	8	10	10	12	12	13	14
4.	SLTA	2	2	3	4	5	6	6
JUMLAH		63	69	79	88	94	103	113

Sumber : Dinas Pendidikan Nasional Kota Sukabumi 1996 – 2002

3.3.4. Sarana Peribadatan dan Rekreasi

Sarana pelayanan masyarakat yang tidak kalah penting adalah sarana peribadatan dan rekreasi. Sarana peribadatan di sini adalah masjid, musholla/langgar dan tempat rekreasi adalah taman bermain dan lapangan olah raga. Untuk sarana ini di wilayah perluasan yang tampak mengalami peningkatan paling besar adalah masjid dan mushola/langgar yaitu mengalami penambahan sebanyak 31 buah pembangunan masjid selama masuk kedalam wilayah Kota Sukabumi dan 40 buah untuk pembangunan mushola/langgar, sedangkan untuk tempat rekreasi juga mengalami penambahan walaupun tidak begitu besar yaitu hanya 13 buah taman bermain dan 61 buah lapangan

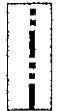
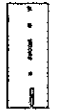
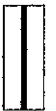
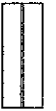








TESIS

**EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN SARANA
PELAYANAN MASYARAKAT DI WILAYAH PERLUASAN**

GAMBAR

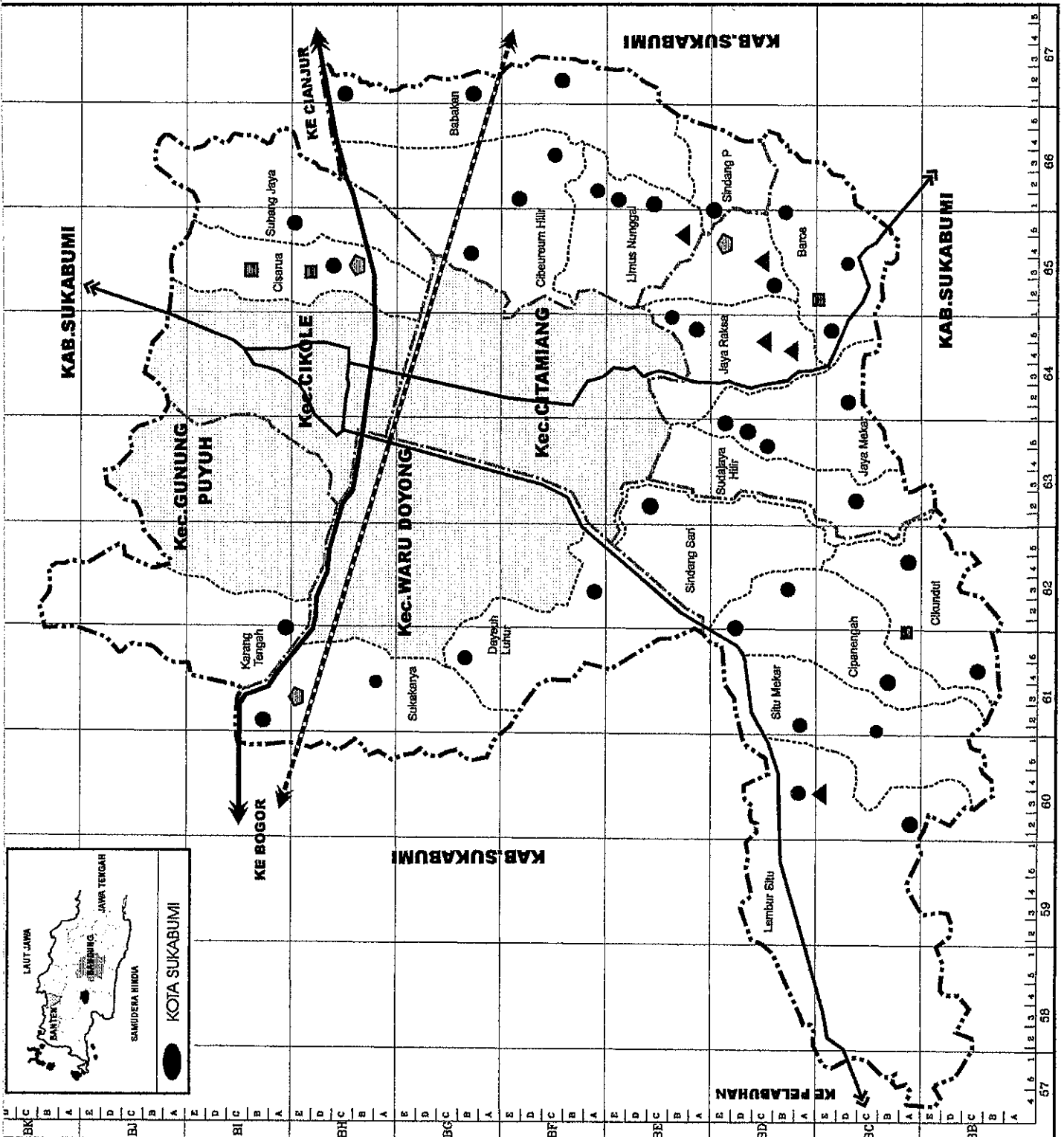
**SEBARAN SARANA
PENDIDIKAN**

-  Batas Administrasi
-  Batas Kecamatan
-  Jalan Arteri Primer
-  Jalan Arteri Sekunder
-  Jalan Kereta Api
-  SLTA
-  SLTP
-  SD
-  TK

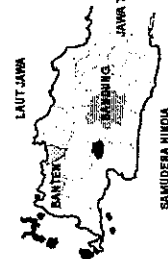
	SKALA	NO. GAMBAR
	1:55.000	III.06

SUMBER

BAPPEDA KOTA SUKABUMI



LAUT JAWA



SAMUDERA HINDIA

KOTA SUKABUMI

olah raga selama masuk ke dalam wilayah Kota Sukabumi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel III.9 di bawah ini.

Tabel III.9
**DATA SARANA PERIBADATAN DAN REKREASI
 DI WILAYAH PERLUASAN TAHUN 1995-2001**

NO	PARAMETER	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
1.	Mushola	371	371	374	376	388	412	421
2.	Masjid	222	230	241	242	250	253	262
3.	Tmpt Olah Raga	59	60	75	81	96	103	120
4.	Taman Bermain	3	3	4	9	13	16	16
JUMLAH		655	664	694	708	747	784	819

Sumber : Profil Kecamatan dan Kelurahan 1996 - 2002

BAB IV

EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN SARANA PELAYANAN MASYARAKAT DI WILAYAH PERLUASAN

4.1. Penilaian Terhadap Arah dan Pergerakan Penduduk ke Berbagai Sarana Pelayanan Masyarakat.

Penilaian terhadap arah dan frekuensi pergerakan masyarakat di wilayah perluasan Kota Sukabumi ke sarana pelayanan masyarakat, ini dapat dilihat dari dua hal yaitu :

1. Pergerakan masyarakat ke sarana pelayanan masyarakat ;
2. Frekuensi pergerakan masyarakat ke sarana pelayanan.

4.1.1. Pergerakan Masyarakat ke Sarana Pelayanan

Dalam penilaian ini arah dan pergerakan penduduk ke berbagai sarana (fasilitas) pelayanan masyarakat yang ada di 18 kelurahan di wilayah perluasan Kota Sukabumi yang dirinci menjadi :

1. Arah dan pergerakan ke sarana tempat bekerja
2. Arah dan pergerakan ke sarana pendidikan
3. Arah dan pergerakan ke sarana perbelanjaan
4. Arah dan pergerakan ke sarana kesehatan
5. Arah dan pergerakan ke sarana ibadah
6. Arah dan pergerakan ke sarana rekreasi

4.1.1.1. Arah dan Pergerakan ke Sarana Tempat Bekerja

Tempat bekerja bagi penduduk di 18 kelurahan di wilayah perluasan sebagian besar atau sebesar 43,86 % menuju lokasi tempat bekerja di wilayah Kota Sukabumi lama untuk kondisi penduduk sebelum diadakannya perluasan Kota Sukabumi pada

tahun 1995, yaitu penduduk di Kelurahan Cisarua, Kelurahan Lembur Situ, Kelurahan Cipanengah, Kelurahan Sindang Sari, Kelurahan Sudajaya Hilir, Kelurahan Limus Nunggal, Kelurahan Jayaraksa, Kelurahan Dayeuh Luhur, Kelurahan Cibeureum Hilir, Kelurahan Jaya Mekar, Kelurahan Sindang Palay, Kelurahan Cikundul, Kelurahan Babakan, Kelurahan Situ Mekar, Kelurahan Baros, Kelurahan Karang Tengah dan Kelurahan Sukakarya.

Sedangkan pergerakan penduduk ke tempat kerja untuk kondisi penduduk setelah diadakannya perluasan Kota Sukabumi sebagian besar dari penduduknya 36,06% melakukan pergerakan ke wilayah perluasan Kota Sukabumi, yaitu untuk penduduk di Kelurahan Cisarua, Lembur Situ, Cipanengah, Sindang Sari, Sudajaya Hilir, Limus Nunggal, JayaRaksa, Dayeuh Luhur, Cibeureum Hilir, Jaya Mekar, Sindang Palay, Cikundul, Babakan, Situ Mekar, Baros, Karang Tengah dan Kelurahan Sukakarya. Secara keseluruhan perbandingan kondisi pergerakan penduduk ke sarana tempat bekerja dari hasil penilaian adalah sebagai berikut :

Tabel IV.1
**PERGERAKAN PENDUDUK
DI WILAYAH PERLUASAN KE SARANA TEMPAT BEKERJA**

No	Lokasi Tempat Bekerja	Kondisi Sebelum		Kondisi sesudah		Perubahan	
		Bobot	(%)	Bobot	(%)	(%)	Ket
1.	Pusat Kota	225	43,86	90	17,54	26,32	Turun
2.	Kota Sukabumi Lama	116	22,61	108	21,05	1,56	Turun
3.	Wilayah Perluasan	54	10,53	185	36,06	25,53	Naik
4.	Luar Kota Sukabumi	6	1,17	4	0,78	0,39	Turun
5.	Luar Kota dan Kabupaten Sukabumi	9	1,75	4	0,78	0,97	Turun
KESIMPULAN		410	79,92	391	76,22	3,7	Turun

Sumber : Hasil Analisis Data, 2002.

Dari Tabel IV.1 di atas dapat terlihat bahwa, untuk wilayah pusat kota dan wilayah kota Sukabumi sebelum perluasan terjadi penurunan pergerakan penduduk ke

sarana bekerja sebesar 26,32% dan 1,56%. Sedangkan ke wilayah perluasan Kota Sukabumi sendiri terjadi kenaikan pergerakan penduduk sebesar 25,53%. Hal ini berarti dengan adanya perluasan Kota Sukabumi pada tahun 1995, telah terdapat pengurangan pergerakan penduduk untuk bekerja di wilayah pusat kota Sukabumi dan wilayah sebelum perluasan sebesar 27,88%. Demikian pula untuk wilayah luar Kota Sukabumi telah terjadi penurunan angka pergerakan penduduk ke tempat kerja sebesar 0,39% dan pergerakan penduduk ke luar kota dan Kabupaten Sukabumi ke tempat kerja mengalami penurunan sebesar 0,97%.

4.1.1.2 Arah dan Pergerakan ke Sarana Pendidikan

Arah dan pergerakan penduduk di wilayah perluasan Kota Sukabumi ke sarana pendidikan dasar dan menengah sebagian besar 49,71% masih menuju pusat Kota Sukabumi. Dari penduduk di 17 kelurahan, yaitu Cisarua, Lembur Situ, Cipanengah, Sindang Sari, Sudajaya Hilir, Limus Nunggal, Jayaraksa, Dayeuh Luhur, Cibeureum Hilir, Jaya Mekar, Sindang Palay, Cikundul, Babakan, Situ Mekar, Baros, Karang Tengah dan Sukakarya, masih mengadakan pergerakan ke sarana pendidikan dasar dan menengah yang ada di wilayah Kota Sukabumi lama, alasan mereka untuk memakai sarana yang ada di wilayah tersebut dikarenakan sekolah-sekolah yang ada di wilayah Kota Sukabumi lama lebih baik dari segi mutu sekolah dan pengajarannya dibandingkan dengan sekolah yang ada di wilayah perluasan Kota Sukabumi.

Sedangkan pergerakan penduduk ke sarana pendidikan untuk kondisi sesudah perluasan pada tahun 1995, masih dalam kategori ke wilayah Kota Sukabumi lama walaupun terjadi penurunan angka pergerakan penduduk ke wilayah pusat kota dan Kota Sukabumi lama. Secara keseluruhan perbandingan pergerakan penduduk ke sarana pendidikan dari hasil penilaian adalah sebagai berikut :

Tabel IV.2
**PERGERAKAN PENDUDUK
 DI WILAYAH PERLUASAN KE SARANA PENDIDIKAN**

No	Lokasi Pendidikan	Kondisi Sebelum		Kondisi Sesudah		Perubahan	
		Bobot	(%)	Bobot	(%)	(%)	Ket
1.	Pusat Kota	225	49,71	93	18,13	31,58	Turun
2.	Kota Sukabumi Lama	136	26,51	148	28,85	2,34	Naik
3.	Wilayah Perluasan	51	9,94	170	33,14	23,20	Naik
4.	Luar Kota Sukabumi	2	0,39	0	0	0,39	Turun
5.	Luar Kota dan Kabupaten Sukabumi	0	0	0	0	0	Tetap
KESIMPULAN		444	86,55	411	80,12	6,43	Turun

Sumber : Hasil Analisis Data, 2002.

Dari Tabel IV.2 di atas terlihat bahwa, untuk wilayah pusat Kota Sukabumi sebelum perluasan terjadi penurunan pergerakan penduduk ke sarana pendidikan sebesar 31,58%, sedangkan ke wilayah Kota Sukabumi lama terjadi peningkatan sebesar 2,43%. Untuk pergerakan penduduk ke wilayah perluasan kota mengalami kenaikan sebesar 23,30%. Hal ini berarti dengan adanya perluasan Kota Sukabumi pada tahun 1995, telah dapat mengurangi pergerakan penduduk ke sarana pendidikan di pusat kota sebesar 31,58%, dan juga telah dapat mengurangi pergerakan penduduk sebesar 0,39% ke Kabupaten Sukabumi.

4.1.1.3 Arah dan Pergerakan ke Sarana Perbelanjaan.

Pergerakan penduduk di 18 kelurahan di wilayah perluasan Kota Sukabumi ke sarana perbelanjaan ini di bagi dalam dua kondisi, yaitu (1) pergerakan ke sarana sebelum perluasan Kota Sukabumi, dan (2) kondisi pergerakan ke sarana perbelanjaan sesudah perluasan Kota Sukabumi pada tahun 1995. Kondisi pergerakan penduduk ke sarana perbelanjaan sehari-hari sebelum perluasan Kota Sukabumi sebesar 2,41% menuju sarana belanja yang ada di lingkungan tempat tinggal (dekat rumah tinggal masih dalam

satu kelurahan). Dan sebagian besar lainnya 75,05% menuju sarana berupa pasar lingkungan yang ada di wilayah Kota Sukabumi dan pusat kota.

Adapun penduduk yang mengadakan pergerakan ke sarana belanja sehari-hari di lingkungan tempat tinggal tersebut di atas berasal dari Kelurahan Sindang Sari dan Kelurahan Sudajaya Hilir. Sedangkan penduduk yang mengadakan pergerakan ke sarana belanja di pasar lingkungan berasal dari Kelurahan Lembur Situ dikarenakan di kelurahan tersebut yang baru ada pasar lingkungan untuk wilayah perluasan Kota Sukabumi. Sedangkan kondisi pergerakan penduduk ke sarana belanja sehari-hari setelah diadakannya perluasan Kota Sukabumi terlihat sebesar 13,65% menuju sarana belanja yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal. Mereka berasal dari Kelurahan Sudajaya Hilir, Kelurahan Jayaraksa, Kelurahan Cibereum Hilir, Kelurahan Jaya Mekar, Kelurahan Sindang Palay, Kelurahan Babakan, Kelurahan Baros dan Kelurahan Sukakarya. Berikut Tabel IV.3 hasil pengamatan lapangan dari pergerakan penduduk ke sarana belanja sehari-hari.

Tabel IV.3
**PERGERAKAN PENDUDUK
 DI WILAYAH PERLUASAN KE SARANA TEMPAT BELANJA**

No	Lokasi Tempat Belanja	Kondisi Sebelum		Kondisi Sesudah		Perubahan	
		Bobot	(%)	Bobot	(%)	(%)	Ket
1.	Di lingkungan sekitar tempat tinggal	11	2,14	70	13,65	11,51	Naik
2.	Di pasar Lingkungan dalam Satu Kecamatan	10	1,95	20	3,90	1,95	Naik
3.	Di pasar lingkungan di Wilayah Perluasan	15	2,92	18	3,51	0,59	Naik
4.	Di Kota Sukabumi lama	20	3,90	28	5,46	1,56	Naik
5.	Di pusat kota	385	75,05	64	12,48	62,57	Turun
KESIMPULAN		441	85,96	200	38,99	46,97	Turun

Sumber : Hasil Analisis Data, 2002.

Dari Tabel IV.3 di atas dapat terlihat bahwa untuk sarana belanja sehari-hari, penduduk di wilayah perluasan Kota Sukabumi menggunakan sarana yang terdapat di lingkungan tempat tinggal mengalami kenaikan pemakaian sebesar 11,51%. Sedangkan sarana berupa pasar lingkungan penggunaannya mengalami kenaikan sebesar 1,95%. Sedangkan sarana belanja di wilayah perluasan Kota Sukabumi mengalami kenaikan sebesar 0,59%. Demikian pula dengan sarana belanja yang berada di wilayah Kota Sukabumi lama, mengalami kenaikan sebesar 1,56%. Sedangkan pergerakan penduduk ke sarana perbelanjaan yang ada di pusat kota mengalami penurunan sebesar 12,48%. Hal ini berarti untuk sarana belanja sehari-hari di wilayah perluasan Kota Sukabumi dapat dinilai mencukupi untuk sarana belanja di sekitar tempat tinggal sedangkan untuk pasar lingkungan belum mencukupi.

4.1.1.4. Arah dan Pergerakan Penduduk ke Sarana Kesehatan

Pergerakan penduduk di 18 kelurahan di wilayah perluasan Kota Sukabumi ke sarana kesehatan, di sini dibagi menjadi dua kondisi yaitu (1) keadaan sebelum perluasan kota dan (2) keadaan sesudah perluasan Kota Sukabumi pada tahun 1995. Pergerakan penduduk ke sarana kesehatan pada kondisi sebelum diadakannya perluasan Kota Sukabumi pada tahun 1995, terlihat mereka mengadakan pergerakan ke sarana kesehatan yang berada di pusat kota, yaitu sebesar 52,63%. Penduduk tersebut berasal dari Kelurahan Cisarua, Kelurahan Lembur Situ, Kelurahan Cipanengah, Kelurahan Sindang Sari, Kelurahan Sudajaya Hilir, Kelurahan Limus Nunggal, Kelurahan Jayaraksa, Kelurahan Dayeuh Luhur, Kelurahan Cibereum Hilir, Kelurahan Jaya Mekar, Kelurahan Sindang Palay, Kelurahan Cikundul, Kelurahan Babakan, Kelurahan Situ Mekar, Kelurahan Karang Tengah dan Kelurahan Sukakarya.

Pergerakan penduduk ke sarana kesehatan untuk keadaan sesudah diadakannya perluasan Kota Sukabumi, sebesar 10,14% menuju sarana kesehatan yang berada masih dalam satu kecamatan yang sama. Sedangkan pergerakan penduduk ke sarana kesehatan yaitu sebesar 13,65%, penduduk di Kelurahan Baros, Cikundul, Cisarua, Lembur Situ dan Kelurahan Karang Tengah mengadakan pergerakan ke sarana kesehatan yang berada di lingkungan kelurahan yang bersangkutan. Hal tersebut di atas dapat dimaklumi karena di kelurahan Baros, Cikundul, Cisarua, Lembur Situ dan Kelurahan Karang Tengah tersebut sudah ada sarana kesehatan seperti puskesmas dan balai pengobatan (dokter praktek) dibandingkan dengan kelurahan lainnya di wilayah perluasan Kota Sukabumi.

Berikut ini dalam Tabel IV.4 disajikan tentang pergerakan penduduk ke sarana kesehatan di 18 kelurahan di wilayah perluasan Kota Sukabumi. Dua kondisi yang dinilai yaitu (1) kondisi penduduk sebelum diadakannya perluasan Kota Sukabumi dan (2) kondisi penduduk sesudah diadakannya perluasan Kota Sukabumi.

Tabel IV.4
**PERGERAKAN PENDUDUK
DI WILAYAH PERLUASAN KE SARANA KESEHATAN**

No	Lokasi Tempat Kesehatan	Kondisi Sebelum		Kondisi Sesudah		Perubahan	
		Bobot	(%)	Bobot	(%)	(%)	Ket
1.	Di lingkungan sekitar tempat tinggal	10	1,95	70	13,65	11,70	Naik
2.	Di luar lingkungan dalam satu Kecamatan	14	2,73	52	10,14	7,41	Naik
3.	Di Wilayah Perluasan	36	7,02	36	7,02	0	Tetap
4.	Di Kota Sukabumi lama	80	15,59	34	6,63	8,96	Turun
5.	Di pusat kota	270	52,63	47	9,16	43,47	Turun
KESIMPULAN		410	79,92	239	46,59	33,33	Turun

Sumber : Hasil Analisis Data, 2002.

Dari Tabel IV.4 di atas terlihat bahwa pergerakan penduduk ke sarana kesehatan dalam satu kecamatan mengalami kenaikan sebesar 7,41%, Sedangkan pergerakan

penduduk ke sarana kesehatan di lingkungan tempat tinggal mengalami kenaikan sebesar 11,70%. Sedangkan pergerakan penduduk ke sarana kesehatan yang ada di wilayah Kota Sukabumi lama dan pusat kota mengalami penurunan sebesar 8,96% dan 43,47%.

4.1.1.5 Arah dan Pergerakan Penduduk Ke Sarana Rekreasi dan Hiburan

Pergerakan penduduk di 18 kelurahan di wilayah perluasan Kota Sukabumi ke sarana rekreasi dan hiburan, di sini dibagi menjadi dua kondisi yaitu (1) keadaan sebelum diadakannya perluasan kota dan (2) keadaan sesudah diadakannya perluasan Kota Sukabumi pada tahun 1995. Pergerakan penduduk ke sarana rekreasi dan hiburan pada kondisi sebelum diadakannya perluasan Kota Sukabumi pada tahun 1995, terlihat mereka mengadakan pergerakan ke sarana rekreasi dan hiburan yang berada di pusat kota, yaitu sebesar 52,63%. Penduduk tersebut berasal dari Kelurahan Cisarua, Kelurahan Lembur Situ, Kelurahan Sindang Sari, Kelurahan Limus Nunggal, Kelurahan Jayaraksa, Kelurahan Dayeuh Luhur, Kelurahan Cibereum Hilir, Kelurahan Cikundul, Kelurahan Babakan, Kelurahan Situ Mekar, Kelurahan Karang Tengah dan Kelurahan Sukakarya.

Pergerakan penduduk ke sarana rekreasi dan hiburan untuk keadaan sesudah diadakannya perluasan Kota Sukabumi, sebesar 28,27% menuju sarana rekreasi dan hiburan yang berada di wilayah perluasan Kota Sukabumi. Sedangkan pergerakan penduduk lainnya ke sarana rekreasi dan hiburan yaitu sebesar 21,05%, penduduk di Kelurahan Babakan, Baros, Cibereum, Dayeuh Luhur dan Kelurahan Sindang Sari mengadakan pergerakan ke sarana rekreasi dan hiburan yang berada di pusat kota. Hal tersebut di atas dapat dimaklumi karena di Kelurahan Babakan, Kelurahan Baros, Kelurahan Cibereum, Kelurahan Dayeuh Luhur dan Kelurahan Sindang Sari tersebut untuk sarana rekreasi dan hiburan seperti taman bermain dan tempat olah raga jumlahnya

sangat kurang dibandingkan dengan kelurahan lainnya di wilayah perluasan Kota Sukabumi.

Berikut ini dalam Tabel IV.5 disajikan tentang pergerakan penduduk ke sarana rekreasi dan hiburan di 18 kelurahan di wilayah perluasan Kota Sukabumi. Dua kondisi yang dinilai yaitu (1) kondisi penduduk sebelum diadakannya perluasan Kota Sukabumi dan (2) kondisi penduduk sesudah diadakannya ada perluasan Kota Sukabumi.

Tabel IV.5
**PERGERAKAN PENDUDUK
KE SARANA REKREASI DAN HIBURAN**

No	Lokasi Tempat Rekreasi	Kondisi Sebelum		Kondisi Sesudah		Perubahan	
		Bobot	(%)	Bobot	(%)	(%)	Ket
1.	Pusat Kota	270	52,63	108	21,05	31,58	Turun
2.	Kota Sukabumi Lama	0	0	52	10,14	10,14	Naik
3.	Wilayah Perluasan	51	9,94	145	28,27	18,33	Naik
4.	Luar Kota Sukabumi	52	10,14	40	7,80	2,34	Turun
5.	Luar Kota dan Kabupaten Sukabumi	6	1,17	5	0,97	0,20	Turun
KESIMPULAN		379	73,88	350	68,23	5,65	Turun

Sumber : Hasil Analisis Data, 2002.

Dari Tabel IV.5 di atas terlihat bahwa pergerakan penduduk ke sarana rekreasi dan hiburan di wilayah perluasan Kota Sukabumi mengalami kenaikan sebesar 18,33%, untuk pergerakan penduduk ke sarana rekreasi dan hiburan yang ada di wilayah Kota Sukabumi lama mengalami kenaikan sebesar 10,14%. Untuk pergerakan penduduk ke sarana rekreasi dan hiburan yang ada di luar kota dan Kabupaten Sukabumi mengalami kenaikan sebesar 2,54%. Sedangkan pergerakan penduduk ke sarana rekreasi dan hiburan yang ada di pusat kota mengalami penurunan sebesar 31,58%.

4.1.6 Arah dan Pergerakan Penduduk ke Sarana Tempat Ibadah

Pergerakan penduduk di 18 kelurahan di wilayah perluasan Kota Sukabumi ke sarana peribadahan ini di bagi dalam dua kondisi, yaitu (1) pergerakan ke sarana sebelum

diadakannya perluasan Kota Sukabumi, dan (2) kondisi pergerakan ke sarana peribadatan sesudah diadakannya perluasan Kota Sukabumi pada tahun 1995. Kondisi pergerakan penduduk ke sarana peribadatan sehari-hari sebelum perluasan Kota Sukabumi sebesar 21,44% menuju sarana ibadah yang ada di lingkungan tempat tinggal (dekat rumah tinggal masih dalam satu kelurahan). Dan sebagian besar lainnya 16,57% menuju sarana peribadatan yang berada di pusat Kota Sukabumi (Masjid Agung Kota Sukabumi).

Adapun penduduk yang mengadakan pergerakan ke sarana ibadah sehari-hari di lingkungan tempat tinggal tersebut di atas berasal dari kelurahan Babakan, Baros, cikundul, Jaya Mekar, Jaya Raksa, Lembur Situ, Sindang Palay, Sindang Sari dan Sudajaya Hilir. Sedangkan penduduk yang mengadakan pergerakan ke sarana ibadah di pusat Kota Sukabumi berasal dari kelurahan Cipanengah, Cisarua, Dayeuh Luhur, Karang Tengah, Subang Jaya dan Kelurahan Sukakarya dikarenakan kelurahan tersebut di atas letaknya berbatasan langsung dengan Kota Sukabumi lama sehingga untuk ibadah cenderung menuju ke pusat kota terutama untuk kegiatan ibadah Jum'atan dan hari raya agama Islam.

Sedangkan kondisi pergerakan penduduk ke sarana ibadah sehari-hari setelah diadakannya perluasan Kota Sukabumi terlihat sebesar 50,29% menuju sarana ibadah yang ada di lingkungan tempat tinggal. Mereka berasal dari Kelurahan Babakan, Kelurahan Baros, Kelurahan Cibereum Hilir, Kelurahan Cikundul, Kelurahan Cisarua, Kelurahan Dayeuh Luhur, Kelurahan Karang Tengah, Kelurahan Jaya Mekar, Kelurahan Jaya Raksa, Kelurahan Lembur Situ, Kelurahan Situ Mekar, Kelurahan Sindang Sari, Kelurahan Subang Jaya, Kelurahan Sukakarya dan Kelurahan Sudajaya Hilir. Berikut Tabel IV.6 hasil pengamatan lapangan dari pergerakan penduduk ke sarana tempat peribadatan sehari-hari.

Tabel IV.6
**PERGERAKAN PENDUDUK
 DI WILAYAH PERLUASAN KE SARANA TEMPAT IBADAH**

No	Lokasi Tempat Ibadah	Kondisi Sebelum		Kondisi Sesudah		Perubahan	
		Bobot	(%)	Bobot	(%)	(%)	Ket
1.	Di lingkungan sekitar tempat tinggal	24	4,68	110	21,44	16,76	Naik
2.	Di luar lingkungan dalam satu Kecamatan	86	16,76	148	28,85	12,09	Naik
3.	Di Wilayah Perluasan	42	8,19	96	18,71	10,52	Naik
4.	Di Kota Sukabumi lama	20	3,90	20	3,90	0	Tetap
5.	Di pusat kota	85	16,57	2	0,39	16,18	Turun
KESIMPULAN		257	50,10	376	73,29	23,19	Naik

Sumber : Hasil Analisis Data, 2002.

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa untuk sarana ibadah sehari-hari, penduduk di wilayah perluasan Kota Sukabumi menggunakan sarana yang terdapat di lingkungan tempat tinggal mengalami kenaikan pemakaian sebesar 16,76%. Sedangkan sarana peribadatan yang ada di lingkungan dalam satu kecamatan penggunaannya mengalami kenaikan sebesar 12,091%. Untuk sarana ibadah di wilayah perluasan Kota Sukabumi mengalami kenaikan sebesar 10,52%. Sedangkan pergerakan penduduk ke sarana peribadatan yang ada di pusat kota mengalami penurunan sebesar 16,18%. Hal ini berarti untuk sarana ibadah sehari-hari di wilayah perluasan Kota Sukabumi dapat dinilai sudah dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari penduduk yang bertempat tinggal di wilayah perluasan Kota Sukabumi.

4.1.1.7 Resume Arah dan Pergerakan Penduduk ke Sarana Pelayanan Masyarakat

Di bawah ini Tabel IV.7 berisi resume hasil dari penilaian pergerakan penduduk atau orientasi pergerakan penduduk ke berbagai sarana pelayanan masyarakat di wilayah perluasan dan pusat kota seperti tempat bekerja (sebelum dan sesudah perluasan), tempat ibadah (sebelum dan sesudah perluasan), tempat pendidikan (sebelum dan sesudah

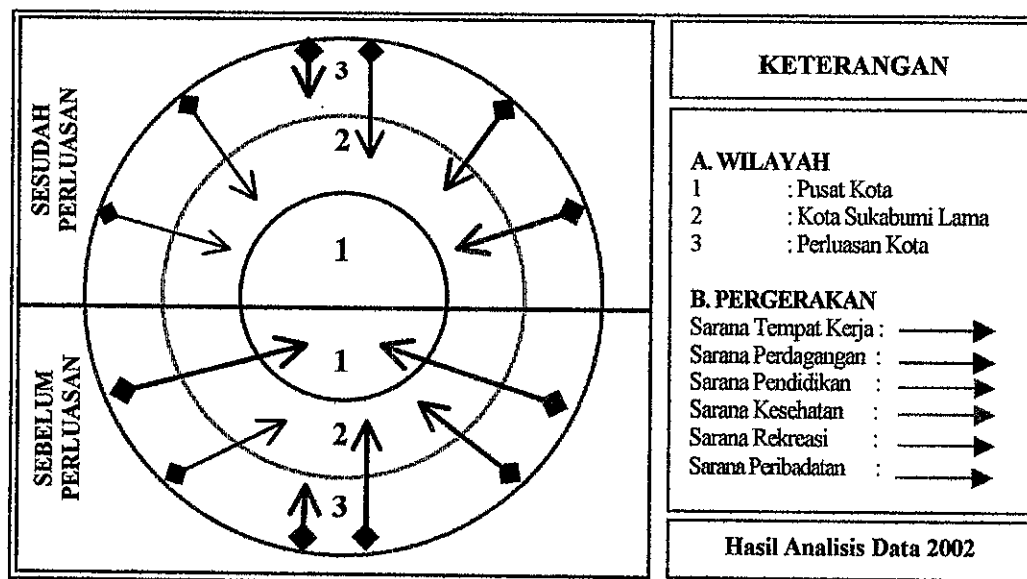
perluasan), tempat ibadah sehari-hari (sebelum dan sesudah perluasan), tempat rekreasi mingguan dan musiman (sebelum dan sesudah perluasan) dan sarana kesehatan (sebelum dan sesudah perluasan). Resume ini memperlihatkan pula gambaran orientasi penduduk di wilayah perluasan Kota Sukabumi keberbagai jenis sarana pelayanan masyarakat.

Tabel IV.7
**PERGERAKAN PENDUDUK DI WILAYAH PERLUASAN
KE SARANA PELAYANAN MASYARAKAT**

No	SARANA	SEBELUM PERLUASAN			SESUDAH PERLUASAN			KET
		Bobot	(%)	Kategori	Bobot	(%)	Kategori	
1	Tempat Bekerja	410	79,9	Sukabumi Lama	391	76,2	Sukabumi Lama	Turun (3,7%)
2	Pendidikan	444	86,5	Pusat Kota	411	80,1	Sukabumi Lama	Turun (6,4%)
3	Perbelanjaan	441	86,0	Pusat Kota	200	39,0	Sukabumi Lama	Turun (47,0%)
4	Kesehatan	410	79,9	Sukabumi Lama	239	46,6	Sukabumi Lama	Turun (33,3%)
5	Rekreasi	379	73,9	Sukabumi Lama	350	68,2	Sukabumi Lama	Turun (5,7%)
6	Peribadatan	257	50,1	Wil. Perluasan	376	73,3	Wil. Perluasan	Naik (23,2%)
KESIMPULAN		390	76,1	Sukabumi Lama	328	63,9	Sukabumi Lama	Turun (12,2%)

Catatan : Untuk rentang nilai (bobot) dapat di lihat pada Lampiran A.4

Gambar 4.1
**PERGERAKAN PENDUDUK DI WILAYAH PERLUASAN
KE SARANA PELAYANAN MASYARAKAT**



4.1.2. Frekuensi Pergerakan Masyarakat ke Pusat Kota

Untuk penilaian frekuensi pergerakan ke pusat kota bagi 18 kelurahan di wilayah perluasan Kota Sukabumi, terbanyak yaitu sebesar 37,65% termasuk kategori sering mengadakan perjalanan ke pusat Kota Sukabumi atau rata-rata satu kali sehari pergi ke wilayah Pusat Kota. Frekuensi pergi atau mengadakan perjalanan ke wilayah pusat Kota Sukabumi ini dilakukan oleh penduduk dari Kelurahan Babakan, Baros, Cibereum, Cikundul, Cipanengah, Sindang Sari dan Kelurahan Sukakarya, selebihnya di enam kelurahan lainnya yaitu Jaya Mekar, Jaya Raksa, Limus Nunggal, Sindang Palay, Situ Mekar dan Kelurahan Sudajaya Hilir sebesar 32,44% mengadakan perjalanan ke wilayah pusat Kota Sukabumi dengan kategori cukup sering yaitu 2-3 kali pergi ke wilayah pusat kota dalam satu minggu. Sedangkan lima kelurahan lainnya yaitu Kelurahan Cisarua, Dayeuh Luhur, Karang Tengah, Lembur Situ dan Kelurahan Subang Jaya, sebesar 20,04% dengan kategori sangat sering (1-3 kali setiap hari mengadakan pergerakan ke pusat kota).

Tabel IV.8
**FREKUENSI PERGERAKAN PENDUDUK KE SARANA
 PELAYANAN MASYARAKAT YANG ADA DI PUSAT KOTA**

NO	FREKUENSI	KRITERIA	KELURAHAN
1.	SANGAT SERING (20,04 %)	1- 3 Kali Sehari	Cisarua, Dayeuh Luhur, Karang Tengah, Lembur Situ, Cisarua.
2.	SERING (37,65 %)	1 Kali Sehari	Babakan, Baros, Cibereum, Cikundul, Cipanengah, Sindang Sari dan kelurahan Sukakarya
3.	CUKUP SERING (32,44 %)	2-3Kali Setiap Minggu	Jaya Mekar, Jaya Raksa, Limus Nunggal, Sindang Palay, Situ Mekar dan kelurahan Sudajaya Hilir

Sumber : Hasil Analisa Data, 2002

4.2. Penilaian terhadap Kondisi Sarana Pelayanan Masyarakat

Untuk penilaian kondisi sarana pelayanan masyarakat di 18 kelurahan di wilayah perluasan Kota Sukabumi, terbanyak yaitu sebesar 33,70% termasuk dalam kategori cukup artinya perlu penambahan sarana pelayanan, tidak perlu perbaikan dan lokasi sarana pelayanan masyarakat letaknya sudah sesuai/tepat. Kondisi tersebut berada di Kelurahan Babakan, Cipanengah, Dayeuh Luhur, Jaya Raksa, Situ Mekar dan Kelurahan Sukakarya. Selebihnya sebesar 32,18% termasuk dalam kategori baik artinya jumlah sarana pelayanan masyarakat sudah memadai, tidak perlu perbaikan dan lokasi sarana pelayanan masyarakat letaknya sudah sesuai/tepat, kondisi ini berada pada Kelurahan Baros, Cibeureum Hilir, Cisarua, Karang Tengah, Lembur Situ, Limus Nunggal, Sindang Sari dan Kelurahan Subang Jaya. Sedangkan sebesar 19,40% termasuk dalam kondisi buruk artinya perlu penambahan jumlah sarana pelayanan masyarakat, perlu perbaikan dan lokasi sarana pelayanan masyarakat letaknya sudah tepat/sesuai yaitu untuk Kelurahan Jaya Mekar, Sindang Palay dan Kelurahan Sudajaya Hilir. Untuk kondisi sarana pelayanan masyarakat dengan penilaian sangat baik artinya jumlah sarana pelayanan sangat memadai, tidak perlu perbaikan dan lokasinya sudah sesuai atau tepat berada pada Kelurahan Cikundul. Lebih jelasnya maka dapat dilihat pada Tabel IV.9 di bawah ini.

Tabel IV.9
**PENILAIAN TERHADAP KONDISI
 SARANA PELAYANAN MASYARAKAT DI WILAYAH PERLUASAN
 (Dalam Persent-%)**

NO	KELURAHAN	Sangat Baik	Baik	Cukup Baik	Buruk	Sangat Buruk	JML BOBOT
1.	Babakan Sirna	0,00	30,77	69,23	0,00	0,00	13,00
2.	Baros	0,00	66,67	25,00	8,33	0,00	24,00
3.	Cibeureum Hilir	0,00	60,00	30,00	10,00	0,00	20,00
4.	Cikundul	55,56	44,44	0,00	0,00	0,00	18,00
5.	Cipanengah	0,00	30,77	69,23	0,00	0,00	13,00

Lanjutan Tabel IV.9

NO	KELURAHAN	Sangat Baik	Baik	Cukup Baik	Buruk	Sangat Buruk	JML BOBOT
6.	Cisarua	14,29	45,71	34,29	5,71	0,00	35,00
7.	Dayeuh Luhur	0,00	0,00	52,94	35,29	11,76	17,00
8.	Jaya Mekar	0,00	0,00	0,00	80,00	20,00	5,00
9.	Jayaraksa	0,00	25,00	56,25	12,50	6,25	16,00
10.	Karang Tengah	17,86	42,86	32,14	7,14	0,00	28,00
11.	Lembur Situ	35,71	42,86	21,43	0,00	0,00	28,00
12.	Limus Nunggal	21,74	52,17	26,09	0,00	0,00	23,00
13.	Sindang Palay	0,00	0,00	0,00	80,00	20,00	5,00
14.	Sindang Sari	0,00	57,14	42,86	0,00	0,00	14,00
15.	Situ Mekar	0,00	30,77	69,23	0,00	0,00	13,00
16.	Subang Jaya	0,00	50,00	25,00	25,00	0,00	24,00
17.	Sudajaya Hilir	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	4,00
18.	Sukakarya	0,00	0,00	52,94	35,29	11,76	17,00
							317,00
	RATA-RATA	8,06	32,18	33,70	19,40	6,65	100,00
	PENILAIAN	CUKUP BAIK					

Sumber : Hasil Analisa Data, 2002

4.3. Penilaian terhadap Sebaran dan Jarak Sarana Pelayanan Masyarakat.

Di dalam penilaian terhadap sebaran dan jarak ke sarana pelayanan masyarakat yang ada di 18 kelurahan di wilayah perluasan Kota Sukabumi, ini dapat dilihat dari dua hal, yaitu :

1. Jumlah dan sebaran sarana pelayanan masyarakat di 18 kelurahan di wilayah perluasan Kota Sukabumi.
2. Jarak rata-rata dari tempat tinggal ke sarana pelayanan masyarakat yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal.

Berdasarkan jumlah dan sebaran sarana pelayanan masyarakat yang ada di 18 kelurahan di wilayah perluasan Kota Sukabumi pada tahun 1995, dapat dilihat sebagai berikut :

4.3.1. Sebaran Sarana Pelayanan Masyarakat

Dalam penilaian sebaran sarana pelayanan masyarakat yang ada di 18 kelurahan di wilayah perluasan Kota Sukabumi dirinci menjadi :

1. Sebaran sarana tempat peribadatan
2. Sebaran sarana pendidikan
3. Sebaran sarana perdagangan
4. Sebaran sarana rekreasi dan hiburan
5. Sebaran sarana kesehatan

4.3.1.1. Sebaran Sarana Tempat Peribadatan.

Untuk kurun waktu 1995 sampai dengan 2002 sebaran sarana tempat peribadatan agama Islam yaitu masjid, maka kelurahan yang memiliki kepadatan tertinggi yaitu kelurahan Karang Tengah (58 buah), sedangkan dengan kepadatan terendah yaitu kelurahan Sindang Sari enam buah.

Dengan urutan kepadatan tertinggi untuk sarana musholla/langgar adalah Kelurahan Cisarua (42 buah) dan Kelurahan Sukakarya (40 buah), sedangkan dengan kepadatan terendah adalah kelurahan Jaya Raksa delapan buah dan Kelurahan Sindang Palay (7 buah). Bagi pemeluk agama Kristen, Protestan, Budha dan Hindu, sarana ibadah berupa gereja dan vihara masih berada di pusat Kota Sukabumi yang bertempat di Kecamatan Cikole Kelurahan Gunung Parang.

4.3.1.2. Sebaran Sarana Tempat Pendidikan.

Untuk sarana pendidikan dasar dan menengah di 18 kelurahan di wilayah perluasan Kota Sukabumi terlihat sebagai berikut kecamatan yang memiliki urutan tertinggi dari segi kepadatan sarana pendidikan adalah Kelurahan Karang Tengah dengan jenis sarana pendidikan berupa taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Sedangkan untuk sarana pendidikan berupa SLTP dan SLTA serta yang sederajat, urutan kecamatan yang tertinggi adalah Kecamatan Lembur Situ. Untuk kecamatan dengan urutan kepadatan sarana pendidikan SLTP dan SLTA terendah adalah Kecamatan Baros.

Sarana SLTP dengan sebaran kepadatan tertinggi berada di Kelurahan Lembur Situ (tiga buah) untuk tahun 2001. Sedangkan untuk sarana SLTA sebaran dan kepadatan tertinggi berada di kelurahan Lembur Situ dua buah untuk tahun 2001. Sarana TK (taman kanak-kanak) di Kelurahan Baros, Kelurahan Cibeureum dan Kelurahan Limus Nunggal memiliki jumlah yang terbesar yaitu tiga buah dan untuk kelurahan dengan kepadatan terendah adalah Kelurahan Jaya Raksa nol buah pada tahun 2001. Sedangkan untuk sarana SD (sekolah dasar) urutan kelurahan dengan kepadatan tertinggi adalah Kelurahan Karang Tengah sembilan buah dan Kelurahan Lembur Situ tujuh buah, sedangkan untuk kelurahan dengan kepadatan terendah adalah Kelurahan Sudajaya nol buah dan Kelurahan Sindang Palay nol buah pada tahun 2001.

4.3.1.3. Sebaran Sarana Perdagangan.

Untuk penilaian sarana perdagangan di 18 kelurahan di wilayah perluasan Kota Sukabumi dilihat dari keberadaan pasar lingkungan/kecamatan (pasar inpres), warung/kios dan toko. Sarana pasar inpres di wilayah perluasan Kota Sukabumi sampai dengan tahun 2001 hanya ada satu buah, yaitu di Kecamatan Cipanengah tepatnya di Kelurahan Lembur Situ. Sarana toko dan kios/warung yang ada, sebaran dan lokasinya tidak merata yang paling menonjol adalah sarana toko/kios yang ada di Kelurahan Baros (82 buah) dan Kelurahan Subang Jaya (19 buah) untuk tahun 2001. Sedangkan dengan kepadatan tertinggi untuk warung/kios adalah Kelurahan Cisarua (132 buah) dan untuk kepadatan terendah adalah Kelurahan Sukakarya (10 buah).

4.3.1.4. Sebaran Sarana Rekreasi.

Sarana hiburan/rekreasi yang dimaksud di sini adalah berupa taman/tempat bermain (*open space*) dan tempat olah raga (lapangan sepak bola, bola voley, bulu

tangkis dan lain-lain). Sarana hiburan/rekreasi yang ada di wilayah perluasan Kota Sukabumi sebarannya terlihat tidak merata, yang paling menonjol adalah sarana tempat olah raga dengan kepadatan tertinggi berada pada Kelurahan Karang Tengah (14 buah) dan kepadatan terendah pada Kelurahan Sudajaya Hilir dan Kelurahan Babakan, karena di kelurahan tersebut belum ada sarana tempat olah raga.

Sedangkan untuk sarana taman bermain dengan kepadatan tertinggi berada pada Kelurahan Subang Jaya delapan buah dan Kelurahan Cisarua tujuh buah untuk sebaran sarana taman bermain dengan kepadatan terendah berada pada hampir diseluruh wilayah perluasan kota pada tahun 1995 yaitu Kelurahan Lembur Situ, Kelurahan Cipanengah, Kelurahan Sindang Sari, Kelurahan Sudajaya Hilir, Kelurahan Limus Nunggal, Kelurahan Jayaraksa, Kelurahan Dayeuh Luhur, Kelurahan Cibeureum Hilir, Kelurahan Jaya Mekar, Kelurahan Sindang Palay, Kelurahan Babakan, Kelurahan Situ Mekar, Kelurahan Baros, Kelurahan Karang Tengah dan Kelurahan Sukakarya.

4.3.1.5 Sebaran Sarana Kesehatan

Sebaran ke sarana kesehatan di 18 kelurahan di wilayah perluasan Kota Sukabumi dilihat dari tiga jenis sarana yaitu balai pengobatan/klinik, BKIA dan Puskesmas. Sarana balai pengobatan/klinik terbanyak terdapat pada Kelurahan Cisarua dua buah, Kelurahan Karang Tengah dua buah dan Kelurahan Sukakarya dua buah untuk tahun 2001. Sarana BKIA belum tersebar merata di tiga kecamatan perluasan, yaitu hanya terdapat pada kecamatan Lembur Situ satu buah tepatnya di Kelurahan Lembur Situ.

Sedangkan untuk sarana puskesmas sebaran dengan kepadatan tertinggi terdapat pada Kelurahan Baros, Kelurahan Cibeureum, Kelurahan Cikundul, Kelurahan Cisarua, Kelurahan Karang Tengah, Kelurahan Lembur Situ, Kelurahan Limus Nunggal, dan

Kelurahan Sukakarya (masing-masing satu buah). Untuk lebih jelasnya sebaran sarana pelayanan masyarakat di wilayah perluasan dapat dilihat pada Tabel IV.10 di bawah ini.

Tabel IV.10
PENILAIAN SEBARAN SARANA PELAYANAN MASYARAKAT
DI WILAYAH PERLUASAN KOTA SUKABUMI TAHUN 2002

No	JENIS SARANA	KEPADATAN			
		TERTINGGI		TERENDAH	
		KELURAHAN	JUML	KELURAHAN	JUML
1.	Warung/kios	Cisarua	132	Sukakarya	10
2.	Toko	Baros	82	Subang Jaya	19
3.	Pasar lingkungan	Lembur Situ	1		0
4.	TK	Baros, Cibeureum, Limus, Nunggal	3	Jaya Raksa	0
5.	Sekolah Dasar (SD)	Karang Tgh,	9	Sudajaya, Sindang Sari	0
6.	SLTP	Lembur Situ	3		0
7.	SLTA	Lembur Situ, Sukakarya	2		0
8.	Puskesmas	Baros, Cibeureum, Cikundul, Cisarua, Karang Tengah, Lembur Situ, Limus Nunggal, Sukakarya	1		0
9.	Balai Pengobatan	Cisarua, Karang Tgh, Sukakarya	2		0
10.	BKIA	Lembur Situ	1		0
11.	Taman Bermain	Subang Jaya	8		0
12.	Tempat Olah Raga	Karang Tengah	14	Sudajaya, Baros	0
13.	Masjid	Karang Tengah	58	Sindang Sari	6
14.	Mushola/langgar	Cisarua	40	Jaya Raksa	8
15.	Sub terminal	Kec. Lembur Situ	1		0

Sumber : Hasil Analisis Data 2002

4.3.2. Jarak Rata-rata Sarana Pelayanan Masyarakat.

Dalam penentuan penilaian jarak rata-rata dari tempat tinggal ke sarana pelayanan masyarakat yang ada di 18 kelurahan di wilayah perluasan Kota Sukabumi didasarkan pada pengertian dan besaran jarak dan waktu tempuh pada unit hunian terkecil atau *neighborhood unit*. Dasar yang diambil tersebut meliputi waktu tempuh dengan berjalan kaki (*walking distance scale*) maupun waktu tempuh terdekat dan terjauh dari suatu sarana pelayanan masyarakat dari tempat tinggal penduduk. Dari dasar jarak dan waktu tempuh pada *neighborhood unit* tersebut, maka penilaian jarak ke sarana pelayanan masyarakat diklasifikasikan dalam lima kategori, yaitu :

1. Sangat dekat (0 - 300 meter, 5 menit berjalan kaki, letaknya masih dalam lingkungan RT/RW) ;
2. Dekat (301 - 600 meter, 6 -10 menit berjalan kaki, letaknya masih dalam satu kelurahan tempat tinggal) ;
3. Sedang (601 - 1.200 meter, 11 - 20 menit berjalan kaki, letaknya di luar kelurahan masih dalam satu kecamatan di wilayah perluasan) ;
4. Jauh (1.201 - 3.000 meter, 21 - 40 menit berjalan kaki, letaknya di luar kecamatan masih dalam wilayah perluasan Kota Sukabumi) ;
5. Sangat jauh (>3.000 meter, > 40 menit berjalan kaki, letaknya di wilayah pusat kota dan Kota Sukabumi lama).

Jarak rata-rata ke sarana pelayanan masyarakat yang ada di 18 kelurahan di wilayah perluasan Kota Sukabumi ini dapat terlihat/dinilai sebagai berikut :

1. Kelurahan Babakan

Jarak rata-rata sarana pelayanan masyarakat dari tempat tinggal di Kelurahan Babakan adalah sebagai berikut --30,77% berjarak dekat dan 69,23% berjarak sedang--. Untuk jenis sarana perdagangan warung/kios sebesar 75% berjarak sangat dekat, toko sebesar 75% berjarak sedang dan pasar lingkungan sebesar 50% berjarak sedang. Sedangkan untuk sarana peribadatan masjid sebesar 50% berjarak sangat dekat, mushola/langgar sebesar 99% berjarak sangat dekat.

Untuk sarana pendidikan dasar TK sebesar 50% berjarak sedang, sekolah dasar (SD) sebesar 50% berjarak dekat, untuk sarana pendidikan menengah SLTP sebesar 50% berjarak dekat, dan SLTA sebesar 75% berjarak sangat jauh. Untuk sarana rekreasi dan hiburan taman bermain/tempat terbuka sebesar 99% berjarak jauh, tempat olah raga sebesar 75% berjarak jauh. Sedangkan untuk sarana kesehatan puskesmas sebesar 50% berjarak sedang, balai pengobatan/dokter praktek sebesar 50% berjarak sedang dan untuk

balai kesehatan ibu dan anak (BKIA) sebesar 99% berjarak jauh. Sarana sub terminal di Kelurahan Babakan berjarak jauh sebesar 99% penduduknya.

2. Kelurahan Baros

Jarak rata-rata sarana pelayanan masyarakat dari tempat tinggal di Kelurahan Baros adalah sebagai berikut --61,54% berjarak dekat, 23,08% berjarak sedang dan 15,38% berjarak jauh--. Untuk jenis sarana perdagangan warung/kios sebesar 63% berjarak sangat dekat, toko sebesar 75% berjarak dekat dan pasar lingkungan sebesar 75% berjarak jauh. Sedangkan untuk sarana peribadatan masjid sebesar 37,5% berjarak sangat dekat, mushola/langgar sebesar 99% berjarak sangat dekat.

Untuk sarana pendidikan menengah SLTP sebesar 50% berjarak sedang dan SLTA sebesar 63% berjarak jauh, untuk sarana pendidikan dasar TK (taman kanak-kanak) sebesar 38 % berjarak sedang, SD (sekolah dasar) sebesar 37,5% berjarak dekat. Sarana rekreasi dn hiburan berupa taman bermain/tempat terbuka sebesar 50% berjarak sedang, tempat olah raga sebesar 37,5% berjarak dekat. Sedangkan untuk sarana kesehatan puskesmas sebesar 50% berjarak sedang, balai pengobatan /dokter praktek sebesar 50% berjarak dekat dan untuk balai kesehatan ibu dan anak (BKIA) sebesar 75% berjarak sangat jauh. Sarana sub terminal di Kelurahan Baros berjarak sangat jauh sebesar 99% penduduknya.

3. Kelurahan Cibeureum Hilir

Jarak rata-rata sarana pelayanan masyarakat dari tempat tinggal di Kelurahan Cibeureum Hilir adalah sebagai berikut --42,11% berjarak dekat, 47,37% berjarak sedang dan 10,53% berjarak jauh--. Untuk jenis sarana perdagangan warung/kios sebesar 66,7% berjarak dekat, toko sebesar 83% berjarak sedang dan pasar lingkungan sebesar 66,7%

berjarak sangat jauh. Sedangkan untuk sarana peribadatan berupa masjid sebesar 50% berjarak sangat dekat, mushola/langgar sebesar 99% berjarak sangat dekat.

Untuk sarana pendidikan menengah SLTP sebesar 67% berjarak sangat jauh dan SLTA sebesar 67% berjarak sangat jauh, untuk sarana pendidikan dasar TK (taman Kanak-kanak) sebesar 33% berjarak dekat, SD (sekolah dasar) sebesar 50% berjarak sangat jauh. Sarana tempat rekreasi dan hiburan berupa taman bermain/tempat terbuka sebesar 66,7% berjarak jauh, tempat olah raga sebesar 33,3% berjarak sangat dekat. Sedangkan untuk sarana kesehatan berupa puskesmas sebesar 50% berjarak sedang, balai pengobatan / dokter praktek sebesar 67 % berjarak sangat jauh dan untuk balai kesehatan ibu dan anak (BKIA) sebesar 50% berjarak sedang. Sarana sub terminal di Kelurahan Cibeureum Hilir berjarak sangat jauh sebesar 99% dari penduduknya.

4. Kelurahan Cikundul

Jarak rata-rata sarana pelayanan masyarakat dari tempat tinggal di Kelurahan Cikundul adalah sebagai berikut --62,5 % berjarak sangat dekat dan 37,5 % berjarak sedang--. Untuk jenis sarana perdagangan warung/kios sebesar 50% berjarak sangat dekat, toko sebesar 75% berjarak sedang dan pasar lingkungan sebesar 99% berjarak sangat jauh. Sedangkan untuk sarana peribadatan berupa masjid sebesar 99% berjarak sangat dekat dan mushola/langgar sebesar 99% berjarak sangat dekat.

Untuk sarana pendidikan menengah SLTP sebesar 50% berjarak sedang dan SLTA sebesar 75% berjarak jauh, untuk sarana pendidikan dasar TK (taman kanak-kanak) sebesar 75% berjarak dekat dan SD (sekolah dasar) sebesar 50% berjarak sangat dekat. Sarana rekreasi dan hiburan berupa taman bermain/tempat terbuka sebesar 75%

berjarak dekat dan tempat olah raga sebesar 75% berjarak dekat. Sedangkan untuk sarana kesehatan berupa puskesmas sebesar 75 % berjarak dekat, balai pengobatan/dokter praktek sebesar 50% berjarak sedang dan untuk balai kesehatan ibu dan anak (BKIA) sebesar 75% berjarak sedang. Sarana sub terminal di Kelurahan Cikundul berjarak jauh sebesar 50 % dari penduduknya.

5. Kelurahan Cipanengah

Jarak rata-rata sarana pelayanan masyarakat dari tempat tinggal di Kelurahan Cipanengah adalah sebagai berikut 30,77 % berjarak dekat dan 69,23 % berjarak sedang. Untuk jenis sarana perdagangan warung/kios sebesar 75% berjarak dekat, toko sebesar 50% berjarak sedang dan pasar lingkungan sebesar 50 % berjarak sedang. Sedangkan untuk sarana peibadatan berupa masjid sebesar 50% berjarak sangat dekat dan mushola/langgar sebesar 99% berjarak sangat dekat.

Untuk sarana pendidikan menengah SLTP sebesar 50% berjarak dekat dan SLTA sebesar 50% berjarak dekat, untuk sarana pendidikan dasar TK (taman kanak-kanak) sebesar 75% berjarak dekat dan SD (sekolah dasar) sebesar 50% berjarak dekat. Sarana tempat rekreasi dan hiburan berupa taman bermain/tempat terbuka sebesar 50% berjarak sedang dan tempat olah raga sebesar 50% berjarak dekat. Sedangkan untuk sarana kesehatan berupa puskesmas sebesar 50% berjarak sedang, balai pengobatan /dokter praktek sebesar 50% berjarak sangat dekat dan untuk balai kesehatan ibu dan anak (BKIA) sebesar 75% berjarak dekat. Sarana sub terminal di Kelurahan Cipanengah berjarak sedang sebesar 50% penduduknya.

6. Kelurahan Cisarua

Jarak rata-rata sarana pelayanan masyarakat dari tempat tinggal di Kelurahan Cisarua adalah sebagai berikut --33,3% berjarak sangat dekat, 26,67% berjarak dekat,

10% berjarak sedang, 26,67% berjarak sedang dan 3,33% berjarak sangat jauh--. Untuk jenis sarana perdagangan warung/kios sebesar 80% berjarak sangat dekat, toko sebesar 50% berjarak sedang dan pasar lingkungan sebesar 40% berjarak sedang. Sedangkan untuk sarana peribadatan berupa masjid sebesar 40% berjarak sangat dekat dan mushola/langgar sebesar 90% berjarak sangat dekat.

Untuk sarana pendidikan menengah SLTP sebesar 40% berjarak sangat jauh dan SLTA sebesar 40% berjarak sangat jauh, untuk sarana pendidikan dasar TK (taman kanak-kanak) sebesar 30% berjarak sangat dekat dan SD (sekolah dasar) sebesar 40% berjarak sangat jauh. Sarana tempat rekreasi dan hiburan berupa taman bermain/tempat terbuka sebesar 40% berjarak dekat dan tempat olah raga sebesar 40% berjarak dekat. Sedangkan untuk sarana kesehatan berupa puskesmas sebesar 60 % berjarak dekat, balai pengobatan/dokter praktek sebesar 40 % berjarak sedang dan untuk balai kesehatan ibu dan anak (BKIA) sebesar 50% berjarak sedang. Sarana sub terminal di Kelurahan Cisarua berjarak sangat jauh sebesar 99% penduduknya.

7. Kelurahan Dayeuh Luhur

Jarak rata-rata sarana pelayanan masyarakat dari tempat tinggal di Kelurahan Dayeuh Luhur adalah sebagai berikut --56,25 % berjarak sedang, 25 % berjarak jauh dan 18,75 % berjarak sangat jauh--. Untuk jenis sarana perdagangan warung/kios sebesar 63% berjarak sangat dekat, toko sebesar 38% berjarak sedang dan pasar lingkungan sebesar 62,5% berjarak sedang. Sedangkan sarana peribadatan berupa masjid sebesar 62,5% berjarak sangat dekat dan mushola/langgar sebesar 75% berjarak sangat dekat.

Untuk sarana pendidikan menengah SLTP sebesar 38% berjarak sedang dan SLTA sebesar 63% berjarak sangat jauh, untuk sarana pendidikan dasar TK (taman

kanak-kanak) sebesar 50% berjarak dekat dan SD (sekolah dasar) sebesar 50% berjarak dekat. Sarana tempat rekreasi dan hiburan berupa taman bermain/tempat terbuka sebesar 50% berjarak sedang dan tempat olah raga sebesar 50% berjarak dekat. Sedangkan untuk sarana kesehatan berupa puskesmas sebesar 50% berjarak sedang, balai pengobatan /dokter praktek sebesar 38% berjarak sedang dan untuk balai kesehatan ibu dan anak (BKIA) sebesar 75% berjarak sangat jauh. Sarana sub terminal di Kelurahan Dayeuh Luhur berjarak jauh sebesar 50% penduduknya.

8. Kelurahan Jaya Mekar

Jarak rata-rata sarana pelayanan masyarakat dari tempat tinggal di Kelurahan Jaya Mekar adalah sebagai berikut --50% berjarak jauh dan 50% berjarak sangat jauh--. Untuk jenis sarana perdagangan warung/kios sebesar 67% berjarak sangat dekat, toko sebesar 67% berjarak dekat dan pasar lingkungan sebesar 99% berjarak sangat jauh. Sedangkan untuk sarana pribadatan berupa masjid sebesar 67 % berjarak dekat dan mushola/langgar sebesar 99 % berjarak sangat dekat. Untuk sarana pendidikan menengah SLTP sebesar 67% berjarak sedang dan SLTA sebesar 67% berjarak sedang, untuk sarana pendidikan dasar TK (taman kanak-kanak) sebesar 67% berjarak dekat, (SD) sekolah dasar sebesar 99% berjarak dekat.

Sarana tempat rekreasi dan hiburan berupa taman bermain/tempat terbuka sebesar 66,7% berjarak sangat jauh dan tempat olah raga sebesar 99% berjarak sedang. Sedangkan untuk sarana kesehatan berupa puskesmas sebesar 99% berjarak sedang, balai pengobatan /dokter praktek sebesar 67% berjarak sangat jauh dan untuk balai kesehatan ibu dan anak (BKIA) sebesar 99% berjarak sangat jauh. Sarana sub terminal di Kelurahan Jaya Mekar berjarak sangat jauh sebesar 67,5% penduduknya.

9. Kelurahan Jayaraksa

Jarak rata-rata sarana pelayanan masyarakat dari tempat tinggal di Kelurahan Jaya Raksa adalah sebagai berikut --26,67 % berjarak dekat, 40 % berjarak jauh, 26,67 % berjarak sedang dan 6,67 % berjarak jauh--. Untuk jenis sarana perdagangan warung/kios sebesar 80% berjarak sangat dekat, toko sebesar 60% berjarak jauh dan pasar lingkungan sebesar 60% berjarak sangat jauh. Sedangkan untuk sarana peribadatan berupa masjid sebesar 99% berjarak sangat dekat dan mushola/langgar sebesar 60% berjarak sangat dekat.

Untuk sarana pendidikan menengah SLTP sebesar 40 % berjarak dekat dan SLTA sebesar 40 % sedang. Untuk pendidikan dasar TK (taman kanak-kanak) sebesar 40% berjarak sedang dan (SD) sekolah dasar sebesar 40% berjarak dekat. Sarana tempat rekreasi dan hiburan berupa taman bermain/tempat terbuka sebesar 60% berjarak sangat jauh dan tempat olah raga sebesar 60% berjarak dekat. Sedangkan untuk sarana kesehatan berupa puskesmas sebesar 60% berjarak sedang, balai pengobatan /dokter praktek sebesar 40% berjarak sedang dan untuk balai kesehatan ibu dan anak (BKIA) sebesar 80% berjarak sangat jauh. Sarana sub terminal di Kelurahan Jaya Raksa berjarak jauh sebesar 67% dari penduduknya.

10. Kelurahan Karang Tengah

Jarak rata-rata sarana pelayanan masyarakat dari tempat tinggal di Kelurahan Karang Tengah adalah sebagai berikut --17,86% berjarak sangat dekat, 42,86% berjarak dekat, 32,14% berjarak sedang dan 7,14% berjarak jauh--. Untuk jenis sarana perdagangan warung/kios sebesar 88% berjarak sangat dekat, toko sebesar 38% berjarak dekat dan pasar lingkungan sebesar 38% berjarak sangat jauh. Sedangkan untuk sarana

peribadatan berupa masjid sebesar 75% berjarak sedang dan mushola/langgar sebesar 99% berjarak sedang.

Untuk sarana pendidikan menengah SLTP sebesar 38% berjarak sedang dan SLTA sebesar 38% berjarak sangat jauh, untuk sarana pendidikan dasar TK (taman kanak-kanak) sebesar 50% berjarak sangat jauh dan SD (sekolah dasar) sebesar 50% berjarak sangat dekat. Sarana tempat rekreasi dan hiburan berupa taman bermain/tempat terbuka sebesar 38% berjarak sedang dan tempat olah raga sebesar 37,5% berjarak sangat dekat. Sedangkan untuk sarana kesehatan berupa puskesmas sebesar 37,5% berjarak sedang, balai pengobatan /dokter praktek sebesar 38% berjarak sedang dan untuk balai kesehatan ibu dan anak (BKIA) sebesar 37,5% berjarak sedang. Sarana sub terminal di Kelurahan Karang Tengah berjarak sangat jauh sebesar 80% penduduknya.

11. Kelurahan Lembur Situ

Jarak rata-rata sarana pelayanan masyarakat dari tempat tinggal di Kelurahan Lembur Situ adalah sebagai berikut --35,71% berjarak sangat dekat, 42,86% berjarak dekat dan 21,43% berjarak sedang--. Untuk jenis sarana perdagangan warung/kios sebesar 71% berjarak dekat, toko sebesar 50% berjarak dekat dan pasar lingkungan sebesar 66,7% berjarak sedang. Sedangkan untuk sarana peribadatan berupa masjid sebesar 66,7% berjarak dekat mushola/langgar sebesar 83,3% berjarak dekat.

Untuk sarana pendidikan menengah SLTP sebesar 33,3% berjarak dekat dan SLTA sebesar 50% berjarak dekat, untuk sarana pendidikan dasar TK (taman kanak-kanak) sebesar 33,3% berjarak sangat dekat dan SD (sekolah dasar) sebesar 67% berjarak dekat. Sarana tempat rekreasi dan hiburan berupa taman bermain/tempat terbuka sebesar 66,7% berjarak sangat jauh dan tempat olah raga sebesar 50% berjarak sedang.

Sedangkan untuk sarana kesehatan berupa puskesmas sebesar 66,7% berjarak dekat, balai pengobatan /dokter praktek sebesar 33,3% berjarak sedang dan untuk balai kesehatan ibu dan anak (BKIA) sebesar 99% berjarak sangat jauh. Sarana sub terminal di Kelurahan Lembur Situ berjarak dekat sebesar 33,3% penduduknya.

12. Kelurahan Limus Nunggal

Jarak rata-rata sarana pelayanan masyarakat dari tempat tinggal di Kelurahan Limus Nunggal adalah sebagai berikut --26,67% berjarak dekat, 40% berjarak sedang, 26,67% berjarak jauh dan 6,67% berjarak sangat jauh--. Untuk jenis sarana perdagangan warung/kios sebesar 66,7% berjarak dekat, toko sebesar 67% berjarak dekat dan pasar lingkungan sebesar 99% berjarak sedang. Untuk sarana peribadatan berupa masjid sebesar 99% berjarak sangat dekat dan mushola/langgar sebesar 99% berjarak sangat dekat.

Untuk sarana pendidikan menengah SLTP sebesar 67% berjarak sedang dan SLTA sebesar 67% berjarak jauh, untuk sarana pendidikan dasar TK (taman kanak-kanak) sebesar 67% berjarak dekat dan SD (sekolah dasar) sebesar 67% berjarak sedang. Sarana tempat rekreasi dan hiburan berupa taman bermain/tempat terbuka sebesar 99% berjarak sedang dan tempat olah raga sebesar 99% berjarak sangat dekat. Sedangkan untuk sarana kesehatan berupa puskesmas sebesar 67% berjarak sedang, balai pengobatan /dokter praktek sebesar 33,3% berjarak sedang dan untuk balai kesehatan ibu dan anak (BKIA) sebesar 66,7% berjarak sedang. Sarana sub terminal di Kelurahan Limus Nunggal berjarak sangat jauh sebesar 99% penduduknya.

13. Kelurahan Sindang Palay

Jarak rata-rata sarana pelayanan masyarakat dari tempat tinggal di Kelurahan Sindang Palay adalah sebagai berikut --80% berjarak sedang dan 20% berjarak jauh--.

Untuk jenis sarana perdagangan warung/kios sebesar 75% berjarak dekat, toko sebesar 50% berjarak sedang dan pasar lingkungan sebesar 50% berjarak jauh. Untuk sarana peribadatan berupa masjid sebesar 75% berjarak sangat dekat, mushola sebesar 99% berjarak sangat dekat.

Untuk sarana pendidikan menengah SLTP sebesar 50% berjarak sedang dan SLTA sebesar 50% berjarak dekat, untuk sarana pendidikan dasar TK (taman kanak-kanak) sebesar 50% berjarak dekat dan SD (sekolah dasar) sebesar 50% berjarak dekat. Sarana tempat rekreasi dan hiburan berupa taman bermain/tempat terbuka sebesar 75% berjarak sangat jauh dan tempat olah raga sebesar 50% berjarak dekat. Sedangkan untuk sarana kesehatan berupa puskesmas sebesar 50% berjarak sedang, balai pengobatan /dokter praktek sebesar 75% berjarak sangat jauh dan untuk balai kesehatan ibu dan anak (BKIA) sebesar 50% berjarak sedang. Sarana sub terminal di Kelurahan Sindang Palay berjarak jauh sebesar 50% penduduknya.

14. Kelurahan Sindang Sari

Jarak rata-rata sarana pelayanan masyarakat dari tempat tinggal di Kelurahan Sindang Sari adalah sebagai berikut --60% berjarak sedang dan 40% berjarak jauh--. Untuk jenis sarana perdagangan warung/kios sebesar 75% berjarak sangat dekat, toko sebesar 50% berjarak dekat dan pasar lingkungan sebesar 50% berjarak sedang. Sedangkan untuk sarana peribadatan berupa masjid sebesar 75% berjarak sangat dekat, mushola/langgar sebesar 99% berjarak sangat dekat.

Untuk sarana pendidikan menengah SLTP sebesar 50% berjarak sangat jauh dan SLTA sebesar 50% berjarak sangat jauh, untuk sarana pendidikan dasar TK (taman kanak-kanak) sebesar 75% berjarak dekat, SD (sekolah dasar) sebesar 50% berjarak

dekat. Sarana tempat rekreasi dan hiburan berupa taman bermain/tempat terbuka sebesar 75% berjarak sangat jauh dan tempat olah raga sebesar 50% berjarak dekat. Sedangkan untuk sarana kesehatan berupa puskesmas sebesar 50% berjarak sangat jauh, balai pengobatan /dokter praktek sebesar 75% berjarak sedang dan untuk balai kesehatan ibu dan anak (BKIA) sebesar 50% berjarak sedang. Sarana sub terminal di Kelurahan Sindang Sari berjarak sedang sebesar 50% penduduknya.

15. Kelurahan Situ Mekar

Jarak rata-rata sarana pelayanan masyarakat dari tempat tinggal di Kelurahan Situ Mekar adalah sebagai berikut --30,77% berjarak dekat, dan 69,23% berjarak sedang--. Untuk jenis sarana perdagangan warung/kios sebesar 75% berjarak sangat dekat, toko sebesar 50% berjarak dekat dan pasar lingkungan sebesar 50% berjarak sedang. Sedangkan untuk sarana peribadatan berupa masjid sebesar 75% berjarak sangat dekat, mushola/langgar sebesar 99% berjarak sangat dekat.

Untuk sarana pendidikan menengah SLTP sebesar 50% berjarak sangat jauh dan SLTA sebesar 50% berjarak sangat jauh, untuk sarana pendidikan dasar TK (taman kanak-kanak) sebesar 75% berjarak dekat dan SD (sekolah dasar) sebesar 50% berjarak dekat. Sarana tempat rekreasi dan hiburan berupa taman bermain/tempat terbuka sebesar 99% berjarak sangat jauh dan tempat olah raga sebesar 50% berjarak dekat. Sedangkan untuk sarana kesehatan berupa puskesmas sebesar 50% berjarak sedang, balai pengobatan /dokter praktek sebesar 75% berjarak sedang dan untuk balai kesehatan ibu dan anak (BKIA) sebesar 50% berjarak sangat dekat. Sarana sub terminal di Kelurahan Situ Mekar berjarak sedang sebesar 50% penduduknya.

16. Kelurahan Sudajaya Hilir

Jarak rata-rata sarana pelayanan masyarakat dari tempat tinggal di Kelurahan Sudajaya Hilir adalah sebagai berikut --80% berjarak sedang dan 20% berjarak sangat jauh--. Untuk jenis sarana perdagangan warung/kios sebesar 99% berjarak dekat, toko sebesar 67% berjarak dekat dan pasar lingkungan sebesar 99% berjarak jauh. Sedangkan untuk sarana peribadatan berupa masjid sebesar 66,7% berjarak sangat dekat dan mushola/langgar sebesar 66,7% berjarak sangat dekat.

Untuk sarana pendidikan menengah SLTP sebesar 67% berjarak sedang dan SLTA sebesar 33% berjarak sedang, untuk sarana pendidikan dasar TK (taman kanak-kanak) sebesar 67% berjarak dekat, SD (sekolah dasar) sebesar 67% berjarak sedang. Sarana tempat rekreasi dan hiburan berupa taman bermain/tempat terbuka sebesar 99% berjarak sangat jauh dan tempat olah raga sebesar 66,7% berjarak sangat dekat. Sedangkan untuk sarana kesehatan puskesmas sebesar 66,7% berjarak sedang, balai pengobatan /dokter praktek sebesar 67% berjarak sedang dan untuk balai kesehatan ibu dan anak (BKIA) sebesar 66,7% berjarak sangat jauh. Sarana sub terminal di Kelurahan Sudajaya Hilir berjarak jauh sebesar 75% penduduknya.

17. Kelurahan Subang Jaya

Jarak rata-rata sarana pelayanan masyarakat dari tempat tinggal di Kelurahan Subang Jaya adalah sebagai berikut --45,45% berjarak sangat dekat, 36,36% berjarak dekat, dan 18,18% berjarak sedang--. Untuk jenis sarana perdagangan warung/kios sebesar 62,5% berjarak dekat, toko sebesar 38% berjarak dekat dan pasar lingkungan sebesar 50% berjarak sedang. Sedangkan untuk sarana peribadatan berupa masjid sebesar 87,5% berjarak sangat dekat dan mushola/langgar sebesar 99% berjarak sangat dekat.

Untuk sarana pendidikan menengah SLTP sebesar 50% berjarak sangat jauh dan SLTA sebesar 63% berjarak sangat jauh, untuk sarana pendidikan dasar TK (taman kanak-kanak) sebesar 38% berjarak sedang dan SD (sekolah dasar) sebesar 38% berjarak sangat jauh. Sarana tempat rekreasi dan hiburan berupa bermain/tempat terbuka sebesar 63% berjarak sangat dekat dan tempat olah raga sebesar 38% berjarak sangat jauh. Sedangkan untuk sarana kesehatan puskesmas sebesar 63% berjarak jauh, balai pengobatan /dokter praktek sebesar 50% berjarak dekat dan untuk balai kesehatan ibu dan anak (BKIA) sebesar 38% berjarak jauh. Sarana sub terminal di Kelurahan Subang Jaya berjarak jauh sebesar 50% penduduknya.

18. Kelurahan Sukakarya

Jarak rata-rata sarana pelayanan masyarakat dari tempat tinggal di Kelurahan Sukakarya adalah sebagai berikut --48% berjarak dekat, 36% berjarak sedang, dan 16% berjarak jauh--. Untuk jenis sarana perdagangan warung/kios sebesar 62,5% berjarak dekat, toko sebesar 38% berjarak dekat dan pasar lingkungan sebesar 50% berjarak jauh. Sedangkan untuk sarana peribadatan berupa masjid sebesar 75% berjarak sangat dekat dan mushola/langgar sebesar 99% berjarak sangat dekat.

Untuk sarana pendidikan menengah SLTP sebesar 38% berjarak dekat dan SLTA sebesar 38% berjarak dekat, untuk sarana pendidikan dasar TK (taman kanak-kanak) sebesar 50% berjarak dekat dan SD (sekolah dasar) sebesar 37,5% berjarak dekat. Sarana tempat rekreasi dan hiburan berupa taman bermain/tempat terbuka sebesar 38% berjarak sedang dan tempat olah raga sebesar 38% berjarak sangat jauh. Sedangkan untuk sarana kesehatan puskesmas sebesar 50% berjarak dekat, balai pengobatan /dokter praktek sebesar 38% berjarak dekat dan untuk balai kesehatan ibu dan anak (BKIA)

sebesar 62,5% berjarak sangat jauh. Sarana sub terminal di Kelurahan Sukakarya berjarak sangat jauh sebesar 99% dari penduduknya. Untuk lebih jelasnya jarak rata-rata sarana pelayanan masyarakat dapat di lihat pada Tabel IV.11.

Tabel IV.11
**PENILAIAN JARAK RATA-RATA SARANA PELAYANAN
 MASYARAKAT DI WILAYAH PERLUASAN KOTA SUKABUMI
 (Dalam Persent- %)**

NO	KELURAHAN	Sangat Dekat	Dekat	Sedang	Jauh	Sangat Jauh	JML Bobot
1.	Babakan Sirna	0,00	30,77	69,23	0,00	0,00	13,00
2.	Baros	0,00	61,54	23,08	15,38	0,00	26,00
3.	Cibeureum Hilir	0,00	42,11	47,37	10,53	0,00	19,00
4.	Cikundul	62,50	0,00	37,50	0,00	0,00	16,00
5.	Cipanengah	0,00	30,77	69,23	0,00	0,00	13,00
6.	Cisarua	33,33	26,67	10,00	26,67	3,33	30,00
7.	Dayeuh Luhur	0,00	0,00	56,25	25,00	18,75	16,00
8.	Jaya Mekar	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	4,00
9.	Jayaraksa	0,00	26,67	60,00	13,33	0,00	15,00
10.	Karang Tengah	17,86	42,86	32,14	7,14	0,00	28,00
11.	Lembur Situ	35,71	42,86	21,43	0,00	0,00	28,00
12.	Limus Nunggal	0,00	26,67	40,00	26,67	6,67	15,00
13.	Sindang Palay	0,00	0,00	0,00	80,00	20,00	5,00
14.	Sindang Sari	0,00	0,00	60,00	40,00	0,00	10,00
15.	Situ Mekar	0,00	30,77	69,23	0,00	0,00	13,00
16.	Subang Jaya	45,45	36,36	18,18	0,00	0,00	33,00
17.	Sudajaya Hilir	0,00	0,00	0,00	80,00	20,00	5,00
18.	Sukakarya	0,00	48,00	36,00	16,00	0,00	25,00
							314,00
	RATA-RATA	11,46	24,43	34,14	22,98	6,99	100,00
	PENILAIAN	SEDANG					

Sumber : Hasil Analisis Data, 2002

4.4. Penilaian Ketersediaan (*supplay*) dan Kebutuhan (*demand*) Sarana Pelayanan Masyarakat.

Di dalam penilaian terhadap ketersediaan dan kebutuhan sarana pelayanan masyarakat yang ada di 18 kelurahan di wilayah perluasan Kota Sukabumi, ini dapat dilihat dari 2 (dua) hal, yaitu :

1. Ketersediaan sarana pelayanan masyarakat di 18 kelurahan di wilayah perluasan Kota Sukabumi.

2. Kebutuhan sarana pelayanan masyarakat yang ada di wilayah perluasan Kota Sukabumi.

Berdasarkan ketersediaan dan kebutuhan sarana pelayanan masyarakat yang ada di 18 kelurahan di wilayah perluasan Kota Sukabumi pada tahun 1995, dapat dilihat sebagai berikut :

4.4.1. Ketersediaan Sarana Pelayanan Masyarakat

Yang di maksud dengan penilaian ketersediaan sarana pelayanan masyarakat yang ada di 18 kelurahan di wilayah perluasan Kota Sukabumi di sini adalah perbandingan (comparasi) antara kebutuhan sarana pelayanan masyarakat berdasarkan tolok ukur dalam hal ini adalah Kepmen PU. Nomor 137/KPTS/1986 dengan kondisi eksisting ketersediaan sarana pelayanan masyarakat yang ada di wilayah perluasan Kota Sukabumi.

Untuk penilaian ketersediaan sarana pelayanan masyarakat di wilayah perluasan Kota Sukabumi, maka diklasifikasikan ke dalam lima (5) kategori, yaitu :

1. **Sangat memadai** : Apabila perbandingan antara standar dengan kondisi eksisting > 1 ;
2. **Memadai** : Apabila perbandingan antara standar dengan kondisi eksisting antara $0,75 - 1$;
3. **Cukup/sedang** : Apabila perbandingan antara standar dengan kondisi eksisting antara $0,5 - 0,75$;
4. **Kurang** : Apabila perbandingan antara standar dengan kondisi eksisting antara $0,25 - 0,50$;
5. **Sangat kurang** : Apabila perbandingan antara standar dengan kondisi eksisting $< 0,25$.

Adapun penilaian ketersediaan sarana pelayanan masyarakat di 18 kelurahan di wilayah perluasan Kota Sukabumi adalah sebagai berikut :

1. Kelurahan Babakan

Secara rata-rata penilaian kondisi sarana pelayanan masyarakat untuk Kelurahan Babakan adalah sebagai berikut sarana-sarana yang dinilai/dianggap masih sangat kurang adalah toko, pasar lingkungan, sub terminal, taman kanak-kanak (TK) sebesar, sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA), puskesmas, balai pengobatan (klinik), balai kesehatan ibu dan anak (BKIA), taman bermain dan tempat olah raga.

Sarana-sarana yang dinilai/dianggap masih memadai yaitu sarana yang masih mampu melayani kebutuhan masyarakat adalah sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) dan sekolah dasar (SD). Sarana-sarana yang dinilai/dianggap masih sangat memadai yaitu sarana yang dinilai/dianggap dapat melayani kebutuhan seluruh masyarakat adalah warung/kios, masjid dan musola/langgar.

2. Kelurahan Baros

Secara rata-rata penilaian kondisi sarana pelayanan masyarakat untuk Kelurahan Baros adalah sebagai berikut sarana-sarana yang dinilai/dianggap masih sangat kurang adalah pasar lingkungan, sub terminal, sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA), taman bermain dan Balai kesehatan ibu dan anak (BKIA).

Sarana-sarana yang dinilai/dianggap masih kurang adalah warung/kios, taman kanak-kanak(TK), sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) dan balai pengobatan/klinik. Sarana-sarana yang dinilai/dianggap masih cukup adalah, sarana yang dinilai/dianggap masih kurang adalah sekolah dasar (SD). Sarana-sarana yang dinilai/dianggap masih sangat memadai adalah, sarana yang dinilai/dianggap masih kurang adalah toko, puskesmas, tempat olah raga, masjid dan musolla atau langgar.

3. Kelurahan Cibeureum Hilir

Secara rata-rata penilaian kondisi sarana pelayanan masyarakat untuk Kelurahan Cibeureum Hilir adalah sebagai berikut sarana-sarana yang dinilai/dianggap masih sangat kurang adalah, sarana yang dinilai/dianggap masih kurang adalah warung/kios, toko, pasar lingkungan, sub terminal, sekolah lanjutan tingkat pertama, sekolah lanjutan tingkat atas, balai pengobatan/klinik, balai kesehatan ibu dan anak dan taman bermain.

Sarana-sarana yang dinilai/dianggap masih kurang adalah taman kanak-kanak (TK). Sarana-sarana yang dinilai/dianggap masih sangat memadai adalah, sarana yang dinilai/dianggap masih kurang adalah sekolah dasar (SD), puskesmas, tempat olah raga, masjid dan musholla/langgar.

4. Kelurahan Cikundul

Secara rata-rata penilaian kondisi sarana pelayanan masyarakat untuk Kelurahan Cikundul adalah sebagai berikut sarana-sarana yang dinilai/dianggap masih sangat kurang adalah, sarana yang dinilai/dianggap masih kurang adalah toko, pasar lingkungan, sub terminal, taman kanak-kanak (TK), sekolah lanjutan tingkat atas, balai pengobatan/klinik, balai kesehatan ibu dan anak (BKIA) dan taman bermain.

Sarana-sarana yang dinilai/dianggap masih sangat memadai adalah warung/kios, sekolah dasar (SD), sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP), puskesmas, tempat olah raga, masjid dan musholla/langgar.

5. Kelurahan Cipanengah

Secara rata-rata penilaian kondisi sarana pelayanan masyarakat untuk Kelurahan Cipanengah adalah sebagai berikut sarana-sarana yang dinilai/dianggap masih sangat kurang adalah pasar lingkungan, sub terminal, puskesmas dan taman bermain. Sarana-

sarana yang dinilai/dianggap masih kurang adalah taman kanak-kanak (TK). Sarana-sarana yang dinilai/dianggap masih cukup adalah, sarana yang dinilai/dianggap masih kurang adalah balai pengobatan/klinik.

Sarana-sarana yang dinilai/dianggap masih memadai adalah warung/kios, sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP). Sarana-sarana yang dinilai/dianggap masih sangat memadai adalah toko, sekolah dasar (SD), sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA), balai kesehatan ibu dan anak (BKIA), tempat olah raga, masjid dan musholla/langgar.

6. Kelurahan Cisarua

Secara rata-rata penilaian kondisi sarana pelayanan masyarakat untuk Kelurahan Cisarua adalah sebagai berikut sarana-sarana yang dinilai/dianggap masih sangat kurang adalah, sarana yang dinilai/dianggap masih kurang adalah pasar lingkungan, sub terminal, taman kanak-kanak (TK), balai kesehatan ibu dan anak (BKIA) dan taman bermain.

Sarana-sarana yang dinilai/dianggap masih kurang adalah sekolah dasar (SD) dan balai pengobatan/klinik. Sarana-sarana yang dinilai/dianggap masih cukup adalah sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) dan sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA). Sarana yang dinilai/dianggap masih memadai adalah toko. Sarana-sarana yang dinilai/dianggap masih sangat memadai adalah warung/kios, puskesmas, tempat olah raga, masjid dan musholla/langgar.

7. Kelurahan Dayeuh Luhur

Secara rata-rata penilaian kondisi sarana pelayanan masyarakat untuk Kelurahan Dayeuh Luhur adalah sebagai berikut sarana-sarana yang dinilai/dianggap masih sangat kurang adalah pasar lingkungan, sub terminal, taman kanak-kanak (TK), sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP), sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) puskesmas, balai

pengobatan/klinik, balai kesehatan ibu dan anak (BKIA) dan taman bermain. Sarana yang dinilai/dianggap masih cukup adalah sekolah dasar (SD). Sarana yang dinilai/dianggap masih memadai adalah toko. Sarana-sarana yang dinilai/dianggap masih sangat memadai adalah warung/kios, tempat olah raga, masjid dan musholla/langgar.

8. Kelurahan Jaya Mekar

Secara rata-rata penilaian kondisi sarana pelayanan masyarakat untuk Kelurahan Jaya Mekar adalah sebagai berikut sarana-sarana yang dinilai/dianggap masih sangat kurang adalah pasar lingkungan, sub terminal sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP), sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) puskesmas, balai pengobatan/klinik, balai kesehatan ibu dan anak (BKIA) dan taman bermain.

Sarana yang dinilai/dianggap masih kurang adalah taman kanak-kanak (TK). Sarana yang dinilai/dianggap masih cukup adalah toko. Sarana-sarana yang dinilai/dianggap masih memadai adalah sekolah dasar (SD). Sarana-sarana yang dinilai/dianggap masih sangat memadai adalah warung/kios, tempat olah raga, masjid dan mushola/langgar.

9. Kelurahan Jaya Raksa

Secara rata-rata penilaian kondisi sarana pelayanan masyarakat untuk Kelurahan Jaya Raksa adalah sebagai berikut sarana-sarana yang dinilai/dianggap masih sangat kurang adalah toko, pasar lingkungan, sub terminal, taman kanak-kanak (TK), sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP), sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) puskesmas, balai pengobatan/klinik, balai kesehatan ibu dan anak (BKIA) dan taman bermain. Sarana yang dinilai/dianggap masih cukup adalah sekolah dasar (SD). Sarana-sarana yang

dinilai/dianggap masih sangat memadai adalah warung/kios, tempat olah raga, masjid dan mushola/langgar.

10. Kelurahan Karang Tengah

Secara rata-rata penilaian kondisi sarana pelayanan masyarakat untuk Kelurahan Karang Tengah adalah sebagai berikut sarana-sarana yang dinilai/dianggap masih sangat kurang adalah pasar lingkungan, sub terminal, taman kanak-kanak (TK), sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA), balai kesehatan ibu dan anak (BKIA) dan taman bermain.

Sarana yang dinilai/dianggap masih kurang adalah sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP). Sarana yang dinilai/dianggap masih cukup adalah balai pengobatan/klinik. Sarana-sarana yang dinilai/dianggap masih sangat memadai adalah warung/kios, toko, sekolah dasar (SD), puskesmas, tempat olah raga, masjid dan mushola/langgar.

11. Kelurahan Lembur Situ

Secara rata-rata penilaian kondisi sarana pelayanan masyarakat untuk Kelurahan Lembur Situ adalah sebagai berikut sarana-sarana yang dinilai/dianggap masih sangat kurang adalah taman kanak-kanak (TK), balai kesehatan ibu dan anak (BKIA) dan taman bermain.

Sarana yang dinilai/dianggap masih kurang adalah balai pengobatan/klinik. Sarana yang dinilai/dianggap masih memadai adalah warung/kios. Sarana-sarana yang dinilai/dianggap masih sangat memadai adalah toko, pasar lingkungan, sub terminal, sekolah dasar (SD), sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP), sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA), tempat olah raga, masjid dan mushola/langgar.

12. Kelurahan Limus Nunggal

Secara rata-rata penilaian kondisi sarana pelayanan masyarakat untuk Kelurahan Limus Nunggal adalah sebagai berikut sarana-sarana yang dinilai/dianggap masih sangat kurang adalah warung/kios, sub terminal, sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA), balai kesehatan ibu dan anak (BKIA), balai pengobatan/klinik dan taman bermain.

Sarana yang dinilai/dianggap masih kurang adalah taman kanak-kanak (TK). Sarana-sarana yang dinilai/dianggap masih sangat memadai adalah toko, pasar lingkungan, sekolah dasar (SD), sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP), puskesmas, tempat olah raga, masjid dan mushola/langgar.

13. Kelurahan Sindang Palay

Secara rata-rata penilaian kondisi sarana pelayanan masyarakat untuk Kelurahan Sindang Palay adalah sebagai berikut sarana-sarana yang dinilai/dianggap masih sangat kurang adalah pasar lingkungan, sub terminal sekolah dasar (SD), sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP), sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA), puskesmas, balai pengobatan/klinik, balai kesehatan ibu dan anak (BKIA) dan taman bermain.

Sarana yang dinilai/dianggap masih kurang adalah taman kanak-kanak (TK). Sarana yang dinilai/dianggap masih cukup adalah toko. Sarana-sarana yang dinilai/dianggap masih sangat memadai adalah warung/kios, tempat olah raga, masjid dan mushola/langgar.

14. Kelurahan Sindang Sari

Secara rata-rata penilaian kondisi sarana pelayanan masyarakat untuk Kelurahan Sindang Sari adalah sebagai berikut sarana-sarana yang dinilai/dianggap masih sangat kurang adalah toko, pasar lingkungan, sub terminal, sekolah lanjutan tingkat pertama

(SLTP), sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA), puskesmas, balai pengobatan/klinik, balai kesehatan ibu dan anak (BKIA) dan taman bermain.

Sarana-sarana yang dinilai/dianggap masih kurang adalah taman kanak-kanak (TK) dan sekolah dasar (SD). Sarana-sarana yang dinilai/dianggap masih sangat memadai adalah warung/kios, tempat olah raga, masjid dan mushola/langgar.

15. Kelurahan Situ Mekar

Secara rata-rata penilaian kondisi sarana pelayanan masyarakat untuk Kelurahan Situ Mekar adalah sebagai berikut sarana-sarana yang dinilai/dianggap masih sangat kurang adalah pasar lingkungan, sub terminal, sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP), sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA), puskesmas, balai pengobatan/klinik, balai kesehatan ibu dan anak (BKIA) dan taman bermain.

Sarana-sarana yang dinilai/dianggap masih kurang adalah taman kanak-kanak (TK) dan sekolah dasar (SD). Sarana yang dinilai/dianggap masih cukup adalah toko. Sarana-sarana yang dinilai/dianggap masih sangat memadai adalah warung/kios, tempat olah raga, masjid dan mushola/langgar.

16. Kelurahan Subang Jaya

Secara rata-rata penilaian kondisi sarana pelayanan masyarakat untuk Kelurahan Subang Jaya adalah sebagai berikut sarana-sarana yang dinilai/dianggap masih sangat kurang adalah pasar lingkungan, sub terminal, taman kanak-kanak (TK), sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP), sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA), puskesmas, balai kesehatan ibu dan anak (BKIA) dan taman bermain. Sarana-sarana yang dinilai/dianggap masih cukup adalah sekolah dasar (SD) dan balai pengobatan/klinik. Sarana-sarana yang

dinilai/dianggap masih sangat memadai adalah warung/kios, toko, tempat olah raga, masjid dan mushola/langgar.

17. Kelurahan Sudajaya Hilir

Secara rata-rata penilaian kondisi sarana pelayanan masyarakat untuk Kelurahan Sudajaya Hilir adalah sebagai berikut sarana-sarana yang dinilai/dianggap masih sangat kurang adalah pasar lingkungan, sub terminal, taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP), sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA), puskesmas, balai pengobatan/klinik, balai kesehatan ibu dan anak (BKIA), taman bermain dan tempat olah raga. Sarana-sarana yang dinilai/dianggap masih sangat memadai adalah warung/kios, toko, masjid dan musholla/langgar.

18. Kelurahan Sukakarya

Secara rata-rata penilaian kondisi sarana pelayanan masyarakat untuk Kelurahan Sukakarya adalah sebagai berikut sarana-sarana yang dinilai/dianggap masih sangat kurang adalah sarana yang dinilai/dianggap masih kurang adalah warung/kios, pasar lingkungan, sub terminal, taman kanak-kanak (TK), balai kesehatan ibu dan anak (BKIA) dan taman bermain.

Sarana-sarana yang dinilai/dianggap masih cukup adalah sekolah dasar (SD). Sarana yang dinilai/dianggap masih memadai adalah sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP). Sarana-sarana yang dinilai/dianggap masih sangat memadai adalah toko, sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA), puskesmas, tempat olah raga, masjid dan mushola/langgar. Untuk lebih jelasnya penilaian ketersediaan sarana pelayanan masyarakat di wilayah perluasan Kota Sukabumi dapat dilihat pada Tabel IV.12 di bawah ini.

Tabel IV.12
**PENILAIAN KETERSEDIAAN SARANA PELAYANAN
 MASYARAKAT DI WILAYAH PERLUASAN KOTA SUKABUMI**

No	KELURAHAN	KETERSEDIAAN SARANA PELAYANAN MASYARAKAT				
		Sangat Memadai	Memadai	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
1.	Babakan	warung, masjid, mushola	SLTP, SD	-	-	toko, pasar, BKIA, TK, sub terminal, SLTA, puskesmas, taman, tmp olah raga, BP
2.	Baros	masjid, mushola, toko, puskesmas, tempat olah raga	-	SD	warung, TK, SLTP, BP	pasar, sub terminal, SLTA, BKIA, taman bermain
3.	Cibeureum	masjid, mushola, SD, Puskesmas, tempat olah raga			TK	warung, toko, pasar, sub terminal, SLTP, SLTA, BP, BKIA, taman
4.	Cikundul	masjid, mushola, warung, SD, SLTP, puskesmas, tempat olah raga,				toko, pasar, sub terminal, TK, SLTA, BP, BKIA, taman
5.	Cipanengah	masjid, mushola, SD, BKIA, tempat olah raga, SLTA	warung, SLTP		TK	pasar, sub terminal, puskesmas, taman
6.	Cisarua	masjid, mushola, warung, pusat Kota Sukabumi, tempat olah raga,	Toko	SLTP, SLTA	BP, SD	Pasar, sub terminal, TK, BKIA, taman
7.	Dayeuh Luhur	masjid, mushola, warung, tempat olah raga,	TOKO	SD		pasar, sub terminal, TK, SLTP, SLTA, BP, BKIA, taman
8.	Jaya Mekar	masjid, mushola, warung, tempat olah raga,	SD	TOKO	TK	pasar, sub terminal, SLTP, SLTA, BP, BKIA, taman, puskesmas
9.	Jaya Raksa	masjid, mushola, warung, tempat olah raga,		SD		toko, puskesmas, pasar, TK, SLTP, SLTA, sub terminal, BP, BKIA
10.	Karang Tgh	masjid, mushola, warung, toko, SD, puskesmas, tempat olah raga,		BP	SLTP	pasar, sub terminal, TK, SLTA, BKIA, taman
11.	Lembur Situ	masjid, mushola, SD, SLTP, SLTA, pasar, toko, sub terminal, tempat olah raga,	Warung		BP	TK, BKIA, taman
12.	Limus N	masjid, mushola, SD, SLTP, puskesmas, pasar, toko			TK	warung, sub terminal, SLTA, BKIA, BP, taman
13.	Sindang Palay	masjid, mushola, warung, tempat olah raga,		TOKO	TK	pasar, sub terminal, SD, SLTP, SLTA, BP, puskesmas, taman, BKIA
14.	Sindang Sari	masjid, mushola, warung, tempat olah raga,			TK, SD	toko, pasar, sub terminal, SLTP, SLTA, BP, BKIA, taman, puskesmas
15.	Situ Mekar	masjid, mushola, warung, tempat olah raga,		TOKO	TK, SD	pasar, sub terminal, SLTP, SLTA, puskesmas, BP, BKIA, taman
16.	Subang Jaya	masjid, mushola, warung, toko, tempat olah raga,			SD, BP	pasar, sub terminal, TK, SLTP, SLTA, BKIA, puskesmas, taman
17.	Sudajaya Hilir	masjid, mushola, warung, toko,				pasar, BP, sub terminal, TK, SD, SLTP, SLTA, BKIA, puskesmas, tempat olah raga, taman,
18.	Sukakarya	masjid, mushola, toko, tempat olah raga, SLTA	SLTP	SD		warung, pasar, sub terminal, TK, BKIA, taman
KESIMPULAN		Warung, toko, puskesmas, tempat olah raga, masjid, mushola	-	SD	Pasar, SLTP, SLTA	TK, BP, BKIA, Taman, Sub terminal

Sumber : Hasil Analisa Data, 2002.

4.4.2. Kebutuhan Ruang dan Sarana Pelayanan untuk Pengembangan Wilayah Perluasan

Untuk penilaian kebutuhan ruang dan sarana pelayanan masyarakat di 18 Kelurahan di wilayah perluasan Kota Sukabumi maka dapat dirinci sebagai berikut :

1. Sarana Perdagangan
2. Sarana Pendidikan
3. Sarana Kesehatan

4. Sarana Rekreasi dan Hiburan, dan
5. Sarana Peribadatan

4.4.2.1. Sarana Perdagangan

1. Warung/Kios dan Toko

Sarana ini fungsinya untuk menjual barang-barang keperluan sehari-hari. Berdasarkan analisis jumlah sarana ini dinilai sudah memadai, akan tetapi apabila dilihat dari tingkat penyebarannya jumlah sarana ini tidak merata, terkonsentrasi hanya pada kelurahan-kelurahan di pusat pelayanan kecamatan.

2. Pasar lingkungan / pusat perbelanjaan

Pusat perbelanjaan ini menjual kebutuhan sehari-hari mulai dari sayuran, makanan, pakaian, alat pendidikan dan sebagainya. Minimum penduduk pendukung untuk sarana ini adalah 30.000 penduduk, maka dibutuhkan sebanyak tiga buah dengan kebutuhan ruang adalah 40.500 M².

3. Sub Terminal

Sebagai prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang atau barang untuk melayani masyarakat di wilayah perluasan Kota Sukabumi. Minimum penduduk pendukung untuk sarana ini adalah 30.000 penduduk, maka dibutuhkan empat sub terminal yang berlokasi di pusat-pusat pelayanan kecamatan di wilayah perluasan Kota Sukabumi.

4.4.2.2. Sarana Pendidikan

1. Taman Kanak-Kanak (TK)

Taman kanak-kanak adalah sarana pendidikan paling dasar yang diperuntukkan anak-anak usia 5-6 tahun, terdiri dari 2 ruang kelas yang dapat menampung 35-40 murid

perkelas. Minimum penduduk pendukung untuk sarana ini adalah 1.000 penduduk, maka dibutuhkan 105 unit untuk sarana ini dengan kebutuhan ruangnya adalah 126.000 M².

2. Sekolah Dasar (SD)

Sekolah untuk anak-anak usia 6-12 tahun terdiri dari enam kelas masing-masing 40 murid. Minimum penduduk pendukung untuk sarana ini adalah 1.600 penduduk, maka diperlukan 22 unit untuk fasilitas ini dengan kebutuhan ruangnya adalah 79.200M².

3. SLTP

Adalah sekolah untuk melayani anak-anak lulusan SD terdiri dari enam kelas masing-masing 30 murid termasuk taman dan lapangan olah raga. Minimum penduduk pendukung untuk sarana ini adalah 4.800 penduduk. Diperlukan untuk sarana ini sebanyak 15 unit dengan kebutuhan ruangnya adalah 130.500 M².

4. SLTA

Sekolah Lanjutan Tingkat Atas termasuk sekolah lanjutan yang setingkat dengan SLTA adalah kelanjutan dari SLTP, terdiri dari enam kelas masing-masing untuk 30 murid termasuk di dalamnya taman dan lapangan olah raga. Minimum penduduk pendukung untuk sarana ini adalah 9.600 penduduk. Untuk sarana ini diperlukan delapan unit dengan kebutuhan ruang 61.600 M².

4.4.2.3. Sarana Kesehatan

1. Balai Pengobatan (BP)

Fungsi utamanya adalah memberikan pelayanan kesehatan dengan titik berat pada penyembuhan tanpa perawat, dengan penduduk pendukung minimalnya adalah 3.000 penduduk. Untuk sarana ini diperlukan sebanyak 34 unit dengan luas kebutuhan ruangnya adalah 10.200 M².

2. BKIA

Fungsi utamanya adalah melayani ibu-ibu sebelum, pada waktu dan sesudah melahirkan serta melayani anak-anak sampai dengan usia enam tahun. Penduduk pendukung untuk sarana ini minimalnya adalah 10.000 penduduk, dibutuhkan sebanyak empat unit dengan kebutuhan ruangnya 6.400 M².

3. Puskesmas

Fungsi utamanya adalah memberikan pelayanan kesehatan kepada penduduk berupa penyembuhan, pencegahan dan pendidikan. Penduduk pendukung untuk sarana ini minimal adalah 30.000 penduduk. Untuk jenis sarana ini berdasarkan penilaian sudah memadai, akan tetapi masih dibutuhkan minimal dua unit dengan kebutuhan ruangnya adalah 4.800 M², untuk wilayah perluasan di pusat pelayanan tingkat kecamatan.

4.4.2.4. Sarana Rekreasi dan Hiburan

1. Taman / Tempat Bermain

Taman ini melayani penduduk pendukung sebanyak 250 penduduk, maka dibutuhkan 524 unit dengan kebutuhan ruangnya adalah 131.000 M², yang berlokasi di pusat-pusat kegiatan/lingkungan masyarakat.

2. Taman dan Lapangan Olah Raga

Sarana ini diperlukan untuk melayani kegiatan-kegiatan di ruang terbuka seperti pertandingan olah raga dan lain-lain. Sarana ini mendukung 30.000 penduduk, untuk sarana tempat olah raga sesuai dengan standar kebutuhannya sudah mencukupi, akan tetapi penyebarannya masih terpusat pada kelurahan tertentu. Kebutuhan untuk sarana ini adalah dua unit dengan kebutuhan ruang 18.000 M², masing-masing dapat berlokasi di pusat pelayanan kecamatan.



TESIS

**EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN SARANA
PELAYANAN MASYARAKAT DI HILAYAH PERLUASAN**

GAMBAR

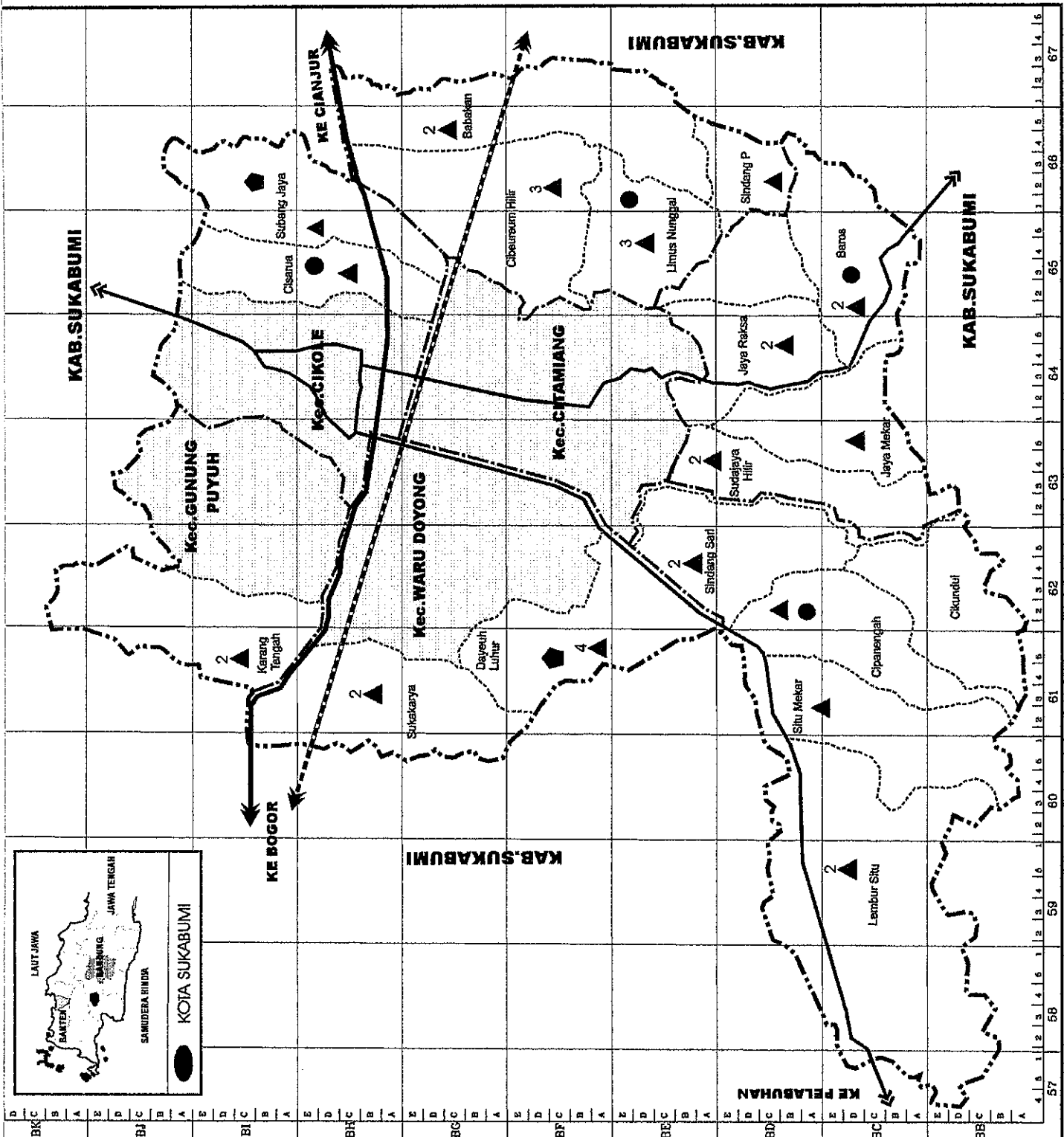
**SEBARAN KEBUTUHAN
SARANA KESEHATAN**

- Batas Administrasi
- Batas Kecamatan
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kereta Api
- Puskesmas
- Balai Pengobatan (BP)
- BKIA
- Kota Sukabumi lama

	SKALA	No. GAMBAR
	1 : 50.000	IV.03

SUMBER

HASIL ANALISA DATA 2002



KOTA SUKABUMI

LAUT JAWA
SAMUDERA HINDIA
JAWA TERGANG
CIBANING


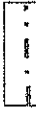








TESIS

**EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN SARANA
PELAYANAN MASYARAKAT DI WILAYAH PERLUASAN**

GAMBAR

**SEBARAN KEBUTUHAN
SARANA REKREASI**

-  Batas Administrasi
-  Batas Kecamatan
-  Jalan Arteri Primer
-  Jalan Arteri Sekunder
-  Jalan Kereta Api
-  Taman Bermain
-  Tempat Olah Raga
-  Kota Sukabumi lama

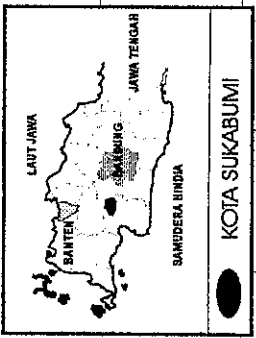
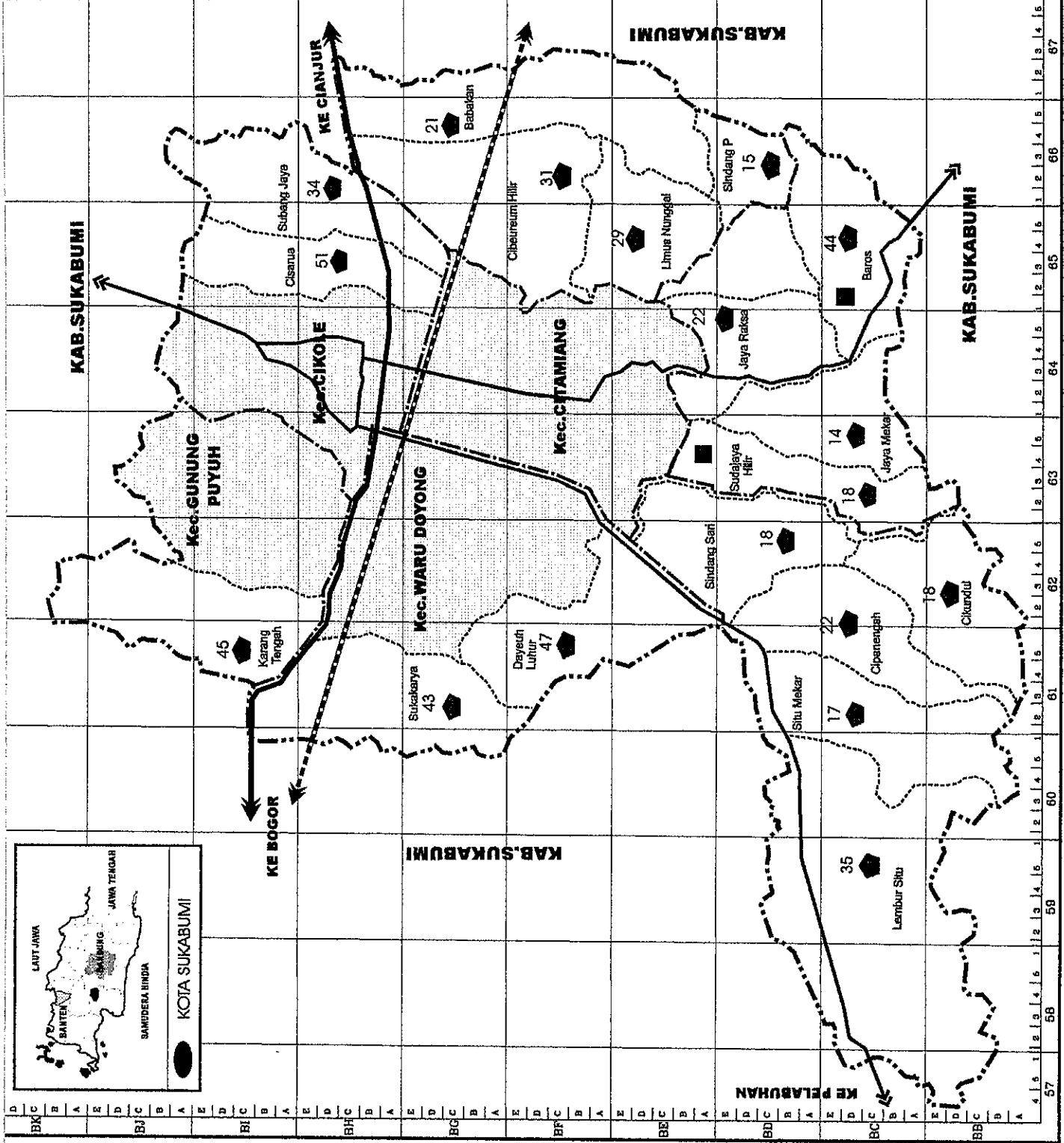


SKALA
1 : 55.000

NO. GAMBAR
IV/04

SUMBER

HASIL ANALISA DATA 2002



KOTA SUKABUMI

4.4.2.5 Sarana Peribadatan

1. Masjid dan Musholla

untuk sarana peribadatan bagi pemeluk agama Islam dinilai sudah sangat mencukupi dan penyebarannya sudah merata, diperlukan peningkatan fungsi dan keberadaannya.

2. Gereja

Untuk sarana bagi pemeluk agama Kristen dan Katholik di wilayah perluasan Kota Sukabumi walaupun termasuk dalam golongan minoritas, akan tetapi perlu untuk mengakomodir juga kebutuhan ibadah bagi pemeluknya. Untuk ini diperlukan gereja sebanyak tiga unit dengan kebutuhan lahan 4.500M², yang berlokasi di pusat pelayanan kecamatan di wilayah perluasan Kota Sukabumi.

Tabel IV.13
KEBUTUHAN RUANG DAN SARANA PELAYANAN MASYARAKAT
DI WILAYAH PERLUASAN KOTA SUKABUMI

No	Jenis Sarana	Kebutuhan		keterangan
		Unit	Ruang (M ²)	
1.	Warung/kios	0	0	Penyebarannya tidak merata
2.	Toko	0	0	Penyebarannya tidak merata
3.	Pasar lingkungan	3	40.500	Lokasi di pusat pelayanan kecamatan
4.	TK	105	126.000	Pemerataan di wilayah perluasan
5.	Sekolah Dasar (SD)	22	79.200	Pemerataan di wilayah perluasan
6.	SLTP	15	130.500	Pemerataan di wilayah perluasan
7.	SLTA	8	61.600	Lokasi di pusat pelayanan kecamatan
8.	Puskesmas	0	4.800	Masih di butuhkan 2 unit, lokasi di pusat pelayanan masyarakat
9.	Balai Pengobatan	34	10.200	Pemerataan di wilayah perluasan
10.	BKIA	4	6.400	Lokasi di pusat pelayanan kecamatan
11.	Taman Bermain	524	131.000	Lokasi di pusat kegiatan/lingkungan masyarakat dan perumahan
12.	Tempat Olah Raga	0	18.000	Dibutuhkan 2 unit untuk pemerataan
13.	Masjid	0	0	Penyebarannya sudah merata
14.	Mushola/langgar	0	0	Penyebarannya sudah merata
15.	Sub terminal	4	45.000	Lokasi di pusat pelayanan kecamatan
KESIMPULAN		719	653.200	Perlu adanya pemerataan sarana pelayanan masyarakat di wilayah perluasan Kota Sukabumi

Sumber : Hasil Analisis Data, 2002

4.5. Penilaian Terhadap Pelaku Pembangunan

Dari hasil pengamatan di lapangan didapat angka prosentase tentang aktor/pelaku pembangunan sarana pelayanan masyarakat di 18 kelurahan di wilayah perluasan Kota Sukabumi. Terlihat dari Tabel IV.14 di bawah ini bahwa pelaku utama pembangunan di 18 kelurahan di wilayah perluasan Kota Sukabumi adalah Pemerintah Kota Sukabumi sebesar 51,32%. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 48,68% dilakukan oleh beberapa pelaku pembangunan seperti oleh masyarakat sendiri secara swadaya sebesar 30,4% dan swasta sebesar 17,1% dan oleh pemerintah kelurahan/kecamatan sebesar 1,1 %.

Dari Tabel IV.14 di bawah terlihat bahwa peran serta masyarakat di 18 kelurahan di wilayah perluasan Kota Sukabumi dapat dinilai cukup baik, sedangkan untuk peran serta swasta dinilai kurang yang dapat diindikasikan dengan besarnya prosentase peran pelaku pembangunan di wilayah perluasan Kota Sukabumi.

Tabel IV.14
PENILAIAN TERHADAP PELAKU PEMBANGUNAN
DI WILAYAH PERLUASAN KOTA SUKABUMI

No	KELURAHAN	PELAKU PEMBANGUNAN				
		MASY	KEL/KEC	PEMDA	SWASTA	LAINNYA
1.	Babakan	25,0	0,0	50,0	25,0	0,0
2.	Baros	25,0	0,0	50,0	25,0	0,0
3.	Cibeureum	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0
4.	Cikundul	0,0	0,0	100	0,0	0,0
5.	Cipanengah	0,0	0,0	100	0,0	0,0
6.	Cisarua	10,0	0,0	70,0	20,0	0,0
7.	Dayeuh Luhur	50,0	0,0	37,5	12,5	0,0
8.	Jaya Mekar	66,7	0,0	33,3	0,0	0,0
9.	Jaya Raksa	40,0	20,0	40,0	0,0	0,0
10.	Karang Tgh	25,0	0,0	50,0	25,0	0,0
11.	Lembur Situ	14,3	0,0	42,9	42,9	0,0
12.	Limus N	16,7	0,0	50,0	33,3	0,0
13.	Sindang Palay	33,3	0,0	66,7	0,0	0,0
14.	Sindang Sari	25,0	0,0	50,0	25,0	0,0
15.	Situ Mekar	50,0	0,0	25,0	25,0	0,0
16.	Subang Jaya	37,5	0,0	37,5	25,0	0,0
17.	Sudajaya Hilir	66,7	0,0	33,3	0,0	0,0
18.	Sukakarya	62,5	0,0	37,5	0,0	0,0
	RATA-RATA	30,4	1,1	51,32	17,1	0,0

Sumber : Hasil Analisi Data, 2002 . Cetak tebal : Prosentase paling besar

4.6. Resume Penilaian Kinerja Pembangunan Sarana Pelayanan Masyarakat

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja sarana pelayanan masyarakat di wilayah perluasan Kota Sukabumi yang telah dilakukan pada subbab-subbab di atas, yang dirinci dalam penilaian-penilaian sebagai berikut :

1. Penilaian terhadap arah dan frekuensi pergerakan masyarakat;
2. Penilaian terhadap kondisi sarana pelayanan masyarakat;
3. Penilaian terhadap sebaran dan jarak sarana pelayanan masyarakat;
4. Penilaian ketersediaan dan kebutuhan sarana pelayanan masyarakat dan,
5. Penilaian terhadap pelaku pembangunan di wilayah perluasan Kota Sukabumi.

Maka untuk penilaian kinerja pembangunan sarana pelayanan masyarakat di wilayah perluasan Kota Sukabumi baik berdasarkan hasil penilaian dari data primer (preferensi masyarakat) maupun penilaian dari data sekunder (tolok ukur/standar) untuk sarana-sarana pelayanan masyarakat yang berupa sarana perdagangan, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana rekreasi dan sarana peribadatan. Dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa untuk pembangunan sarana pelayanan masyarakat pasca diundangkannya PP. No 3 Tahun 1995 tentang Perluasan Wilayah Kota Sukabumi (telah berlangsung selama tujuh tahun) dilihat dari tujuan diundangkannya peraturan pemerintah tersebut serta Visi Kota Sukabumi sebagai pusat pelayanan jasa terpadu di bidang perdagangan, pendidikan dan kesehatan dinilai **belum tercapai** (64,2%). Hal ini menunjukkan bahwa selama tujuh tahun diadakannya perluasan dan pembangunan sarana pelayanan masyarakat, tujuan dari PP.No.3/1995 dan visi Kota Sukabumi baru **tercapai** 35,8%. Untuk meningkatkan kinerja ini maka perlu adanya upaya pemerataan pembangunan sarana pelayanan masyarakat, dalam penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan indeks sentralitas untuk mengetahui dan menentukan pusat-pusat pelayanan dan Analisis Wilayah

Keputusan Berkaitan (AWKB) sebagai strategi pembangunan sarana pelayanan masyarakat di wilayah perluasan Kota Sukabumi.

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai hasil penilaian kinerja pembangunan sarana pelayanan masyarakat di wilayah perluasan Kota Sukabumi, maka dapat dilihat pada Tabel IV.15 di bawah ini.

Tabel IV.15
**RESUME PENILAIAN KINERJA PEMBANGUNAN
SARANA PELAYANAN MASYARAKAT DI WILAYAH PERLUASAN**

No	VARIABEL	NILAI			KATEGORI
		Akhir	Maksimal	Interval (%)	
I	DATA PRIMER				
1.	Arah pergerakan ke sarana	328	513	63,9	Kota Sukabumi lama
2.	Frekuensi ke sarana pelayanan	376	513	73,3	Sering
3.	Kondisi sarana pelayanan	317	513	61,8	Sedang/cukup baik
4.	Jarak rata-rata sarana	314	513	61,2	Sedang
5.	Pelaku pembangunan	53	103	51,3	Pemerintah Daerah
	KESIMPULAN I	1.388	2.155	64,4	Belum tercapai
II	DATA SEKUNDER				
1.	Sebaran sarana pelayanan	16	18	88,9	Belum Merata
2.	Ketersediaan sarana pelayanan	46	90	51,1	Kurang
	KESIMPULAN II	62	108	57,4	Belum tercapai
	KESIMPULAN I+II	1.452	2.263	64,2	Belum tercapai

Catatan : Klasifikasi rentang nilai dapat dilihat pada lampiran A.5

Keterangan :

Tercapai : *interval < 50%*
Belum tercapai : *interval > 50%*

Sumber : Hasil Analisa Data, 2002

4.7. Pendekatan Wilayah Nodal dengan Metode Indeks sentralitas

Pendekatan wilayah dengan menggunakan metode berikut adalah untuk mendapatkan gambaran tingkat keterpusatan dari suatu fungsi pelayanan yang terdapat di wilayah perluasan Kota Sukabumi. Tingkat --keterpusatan suatu fungsi pelayanan masyarakat merupakan indikator utama yang dapat menunjukkan kemampuan pelayanan dari tiap titik-titik pertumbuhan--, dalam hal ini adalah kelurahan-kelurahan di wilayah perluasan Kota Sukabumi terhadap kelurahan-kelurahan di sekitarnya.

Selain itu, hasil yang ditunjukkan oleh metode ini juga mampu mendeskripsikan tingkat *hierarki* kekotaan tiap kelurahan di wilayah perluasan Kota Sukabumi dan sebagai dasar penilaian kemampuan pelayanan serta sebagai dasar untuk melakukan Analisis Wilayah Keputusan Berkaitan (AWKB). Untuk itu ditetapkan variabel-variabel yang digunakan dalam metode ini, adalah :

1. Wilayah yang dinilai kemampuan pelayanannya, dalam hal ini kelurahan-kelurahan di wilayah perluasan Kota Sukabumi sebagai variabel *dependent*.
2. Ketersediaan atau kelengkapan sarana pelayanan masyarakat yang ada di wilayah perluasan Kota Sukabumi, yang dirinci sebagai berikut :
 - Sarana perdagangan yang meliputi sub terminal, warung, toko dan pasar lingkungan/lokal
 - Sarana pendidikan yang meliputi taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD/yang sederajat), sekolah menengah pertama (SLTP/ yang sederajat), sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA/yang sederajat).
 - Sarana kesehatan yang meliputi puskesmas, balai pengobatan/klinik, balai rekreasi dan hiburan ibu dan anak (BKIA).
 - Sarana rekreasi yang meliputi taman bermain, tempat rekreasi dan lapangan olah raga.
 - Sarana peribadatan yang meliputi musholla/langgar dan masjid.

Tidak seluruh titik pertumbuhan dalam hal ini kelurahan-kelurahan di wilayah perluasan Kota Sukabumi memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, hal ini perlu kita akui terlebih dahulu, sehingga penentuan prioritas pengembangan pusat-pusat interaksi atas dasar kemampuan pelayanannya terhadap daerah terbelakang (*hinterland*) masing-masing dapat berlangsung sesuai dengan potensinya dan sesuai dengan tujuan

pendekatan wilayah nodal berdasarkan keterpusatan pelayanan ini. Untuk mendefinisikan pusat-pusat kota sesuai dengan *hierarki* kekotaannya, maka pusat-pusat yang telah terpilih dapat berfungsi sekaligus sebagai pusat distribusi perkembangan wilayah terhadap daerah pinggiran atau belakangnya.

Pembobotan terhadap sarana pelayanan masyarakat dalam metode indeks sentralitas dilakukan atas dasar asumsi, bahwa --tingkat keterpusatan sarana atau kemampuan pelayanan tidak ditentukan oleh kelengkapan sarana pelayanan masyarakat saja melainkan juga jumlah satuan tiap jenis sarana pelayanan masyarakat-- pada satu titik pertumbuhan (kelurahan-kelurahan di wilayah perluasan Kota Sukabumi) dibandingkan relatif terhadap titik-titik pertumbuhan lainnya.

Perhitungan dengan indeks sentralitas akan memperlihatkan keterpusatan fasilitas dengan bobot fasilitas tertentu yang relatif lebih besar nilainya. Sebagai contoh sarana perdagangan yaitu pasar lingkungan yang hanya terdapat di Kelurahan Lembur Situ menjadikan bobot atas fasilitas tersebut relatif lebih tinggi dibandingkan dengan bobot nilai fasilitas/sarana lainnya, dan pembobotan ini juga memberikan nilai lebih atas keragaman sarana di Kelurahan Lembur Situ. Berdasarkan hasil penilaian keterpusatan dan kemampuan pelayanan di wilayah perluasan Kota Sukabumi dengan menggunakan metode indeks sentralitas ditemukan beberapa hal, antara lain :

1. Kelurahan Lembur Situ, Kelurahan Cisarua dan Kelurahan Cipanengah memiliki total bobot nilai yang signifikan sekali untuk menjadikan kelurahan tersebut sebagai pusat pelayanan utama di wilayah perluasan Kota Sukabumi.
2. Rentang bobot nilai yang dimiliki oleh tiap kelurahan menunjukkan tidak meratanya persebaran sarana pelayanan masyarakat di wilayah perluasan Kota Sukabumi. (lihat **lampiran B.8**).

Tabel IV.16
**HIERARKI SARANA PELAYANAN MASYARAKAT BERDASARKAN
 INDEKS SENTRALITAS DI WILAYAH PERLUASAN KOTA SUKABUMI**

No.	KRITERIA	FUNGSI HIERARKI	KELURAHAN
1.	Titik pertumbuhan dengan nilai dan bobot ($>1,5$)	Pusat pelayanan utama (primer)	Lembur Situ, Cisarua, Cipanengah
2.	Titik pertumbuhan dengan nilai dan bobot ($0,5 - 1,5$)	Pusat pelayanan kedua (sekunder)	Baros, Limus Nunggal, Subang Jaya, Sukakarya, Karang Tengah, Cikundul.
3.	Titik pertumbuhan dengan nilai dan bobot ($< 0,5$)	Pusat pelayanan ketiga atau daerah terbelakang	Cibeureum, Dayeuh Luhur, Babakan, Situ Mekar, Jaya Raksa, Jaya Mekar, Sindang Palay, Sindang Sari, Sudajaya Hilir.

Sumber : Hasil Analisis Data, 2002.

Apabila dasar penilaian dengan menggunakan metode indeks sentralitas dijadikan dasar pengklasifikasian wilayah di wilayah perluasan Kota Sukabumi, maka akan didapatkan pengelompokkan wilayah seperti terlihat pada Tabel IV.16, Pengelompokkan wilayah dilakukan menjadi tiga kelompok pelayanan yang dibagi atas total bobot nilai tiap kelurahan. Dari pengelompokkan wilayah tersebut di atas, ketidakmerataan persebaran fasilitas di wilayah perluasan Kota Sukabumi lebih jelas terlihat. Kelurahan-kelurahan yang termasuk dalam kelompok pusat pelayanan utama dan pusat pelayanan kedua (sekunder), hanya sebagian dari ibukota kecamatan yang ada saat ini di wilayah perluasan Kota Sukabumi.

Kenyataan keterpusatan dan persebaran sarana pelayanan masyarakat yang diperlihatkan dari hasil penilaian dengan menggunakan metode indeks sentralitas di atas, dapat dijadikan sebagai masukan untuk digunakan dalam metode Analisis Wilayah Keputusan Berkaitan (AWKB) dalam merumuskan strategi pembangunan sarana pelayanan masyarakat di wilayah perluasan Kota Sukabumi. Beberapa titik pertumbuhan yang saat ini ditetapkan sebagai ibukota kecamatan di wilayah perluasan Kota Sukabumi ternyata tidak memiliki kapasitas atau kemampuan fungsi pelayanan yang sesuai dengan perannya sebagai pusat pelayanan utama ditingkat kecamatan.

4.8. Analisis Wilayah Keputusan Berkaitan (*analysis of interconnected decision area*) sebagai Pilihan Strategis Pembangunan di Wilayah Perluasan Kota Sukabumi

Analisis penentuan pilihan strategis merupakan suatu kegiatan yang rasional yang sifatnya bersinambungan (*continuous*). Oleh karena itu penentuan pilihan strategis ini dilakukan dengan suatu rangkaian kegiatan berproses yang disebut sebagai proses pilihan strategis, dalam pengambilan keputusan terhadap masalah tersebut secara cepat (*scanning analysis*) sebagai suatu analisis dan eksplorasi pendahuluan. Essensi pilihan strategis diarahkan untuk memperoleh pertimbangan pembuatan keputusan, perumusan pola kebijaksanaan dan perencanaan kota. Pada hakekatnya pilihan strategis didasarkan kepada :

- 1). **Saling keterkaitan** dari masalah yang harus diputuskan yang dicirikan sebagai strategi dan adanya ketidak pastian sebagai sumber dari berbagai kesukaran-kesukaran untuk menetapkan suatu keputusan.
- 2). **Keterkendalian** pilihan memberikan arti tidak sekedar menentukan rentang dari alternatif pemecahan masalah, tetapi suatu pilihan yang lebih luas yang akan mengimbangi kebutuhan mendesak dengan yang memerlukan waktu penelaahan lebih lama antara sesuatu yang pasti dengan yang tidak pasti.
- 3). **Berdampak** memberikan arti suatu dinamika pengambilan keputusan dimana pemecahan masalah mendesak dikaitkan dengan usaha pemecahan masalah serta dampak yang lebih luas.
- 4). **Derajat kepentingan** di dalam penentuan keputusan dalam kenyataannya akan dipengaruhi oleh unsur-unsur penentu yaitu unsur pembuat kebijakan (Pemerintah Daerah dan DPRD), masyarakat yang berkepentingan dan rencana kota.

Salah satu bentuk analisis pilihan strategis adalah Analisis Wilayah Keputusan Berkaitan (AWKB). Secara konseptual AWKB ini didasari oleh dua unsur pokok yaitu (1) Ditetapkannya wilayah-wilayah keputusan (*decision areas*), yaitu suatu lingkup keputusan (kelurahan-kelurahan) yang mengandung seperangkat pilihan alternatif pemecahan (sarana pelayanan masyarakat) masalah yang akan menjadi pertimbangan pembuat keputusan, (2) Keterkaitan keputusan (*interconnected area*), diartikan sebagai suatu kenyataan bahwa bagi setiap keputusan yang diambil disuatu wilayah perencanaan akan terkait kepada berbagai keputusan yang diambil di wilayah perencanaan lainnya (kelurahan sekitarnya).

4.8.1. Pengidentifikasian Wilayah Keputusan

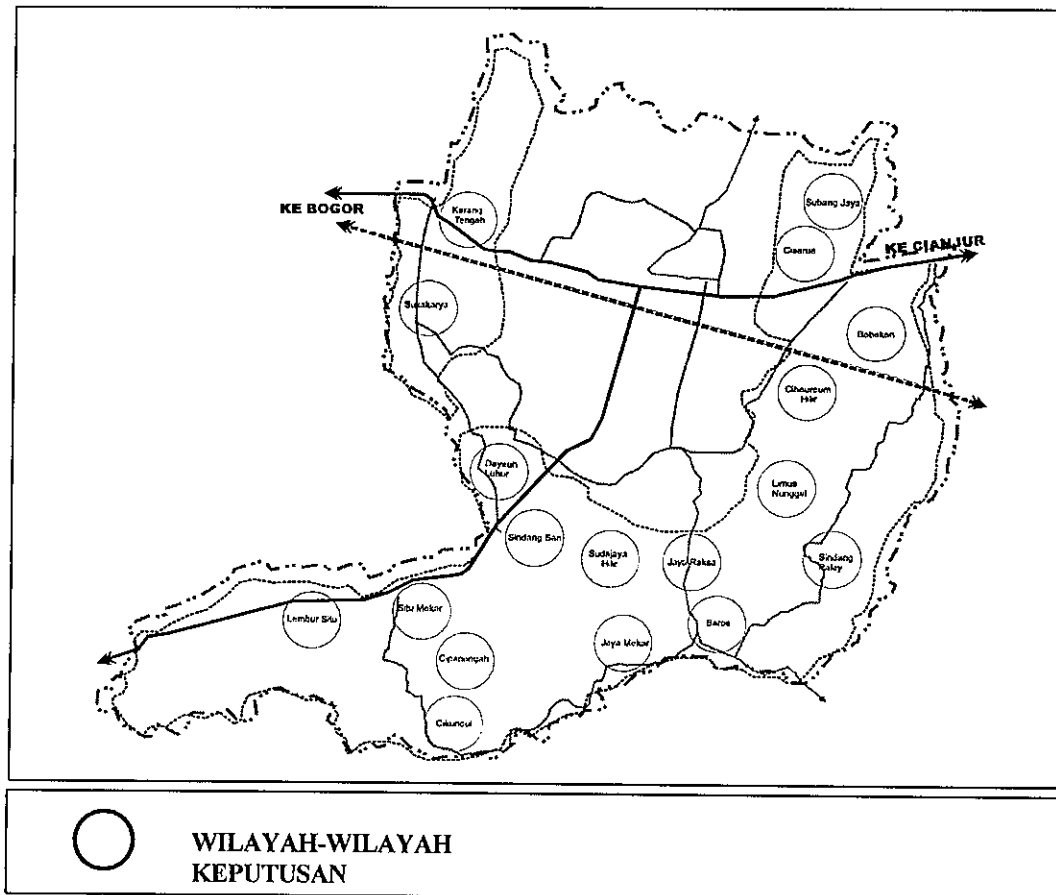
Dalam studi ini lokasi wilayah yang akan dijadikan obyek adalah tiga kecamatan yang terdiri dari 18 kelurahan di wilayah perluasan Kota Sukabumi yang dijadikan sebagai wilayah keputusan, seperti tampak pada Tabel IV.17 di bawah ini.

Tabel IV.17
PENENTUAN WILAYAH-WILAYAH KEPUTUSAN
DI WILAYAH PERLUASAN KOTA SUKABUMI

No	WILAYAH PERENCANAAN	LIPUTAN WILAYAH	LUAS WILAYAH (Ha)
1.	Kec. Cibeureum Hilir	Subang Jaya	220,120
		Cisarua	200,300
		Babakan	184,090
		Cibeureum Hilir	264,875
		Sindang Palay	164,990
		Limus Nunggal	263,435
2.	Kec. Baros	Baros	179,150
		Jaya Raksa	145,200
		Jaya Mekar	158,594
		Sudajaya Hilir	128,445
3.	Kec. Cipanengah	Sindang Sari	101,675
		Cikundul	158,115
		Cipanengah	153,325
		Situ Mekar	154,290
		Lembur Situ	322,358
		Dayeuh Luhur	233,100
		Sukakarya	303,590
Karang Tengah	249,579		

Sumber : Hasil Analisis Data, 2002.

Gambar 4.1
**WILAYAH-WILAYAH KEPUTUSAN
 DI WILAYAH PERLUASAN KOTA SUKABUMI**



Sumber : Hasil analisis data, 2002

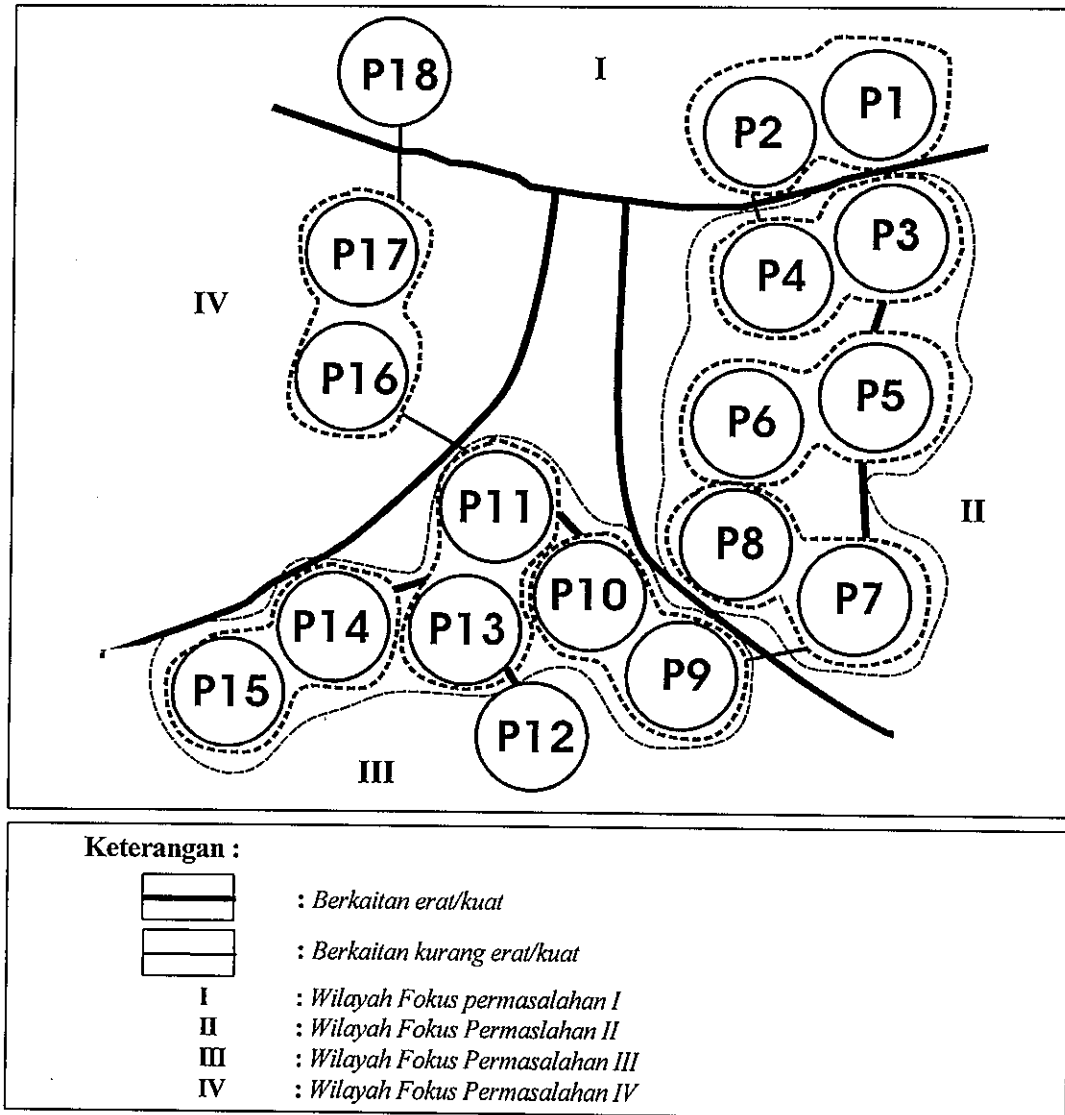
Berdasarkan Gambar 4.1 tersebut di atas, maka untuk wilayah fokus permasalahan di wilayah perluasan Kota Sukabumi dapat di kelompokkan kedalam 5 (lima) kelompok wilayah fokus permasalahan, yaitu :

1. **Wilayah Fokus Permasalahan I**, yang berada di bagian Utara jalan arteri, meliputi wilayah perencanaan P1 (Subang Jaya), P2 (Cisarua) dan P18 (Karang Tengah). Selanjutnya berdasarkan letak geografis dan fungsional maka wilayah fokus permasalahan I ini di bagi dalam dua sub wilayah fokus permasalahan, yang meliputi sub wilayah fokus permasalahan P1 dan P2 serta wilayah fokus permasalahan mandiri (*independent*) P18.

2. **Wilayah fokus permasalahan II**, yang berada di bagian sebelah timur jalan kolektor primer. Wilayah fokus permasalahan II tercakup wilayah perencanaan P3, P4, P5, P6, P7 dan P8. selanjutnya berdasarkan letak geografis dan hubungan fungsional, maka wilayah ini dibagi menjadi tiga sub wilayah fokus permasalahan II, yaitu sub wilayah fokus permasalahan I meliputi P3 dan P4, sub wilayah fokus permasalahan II meliputi P5 dan P6 dan sub wilayah fokus permasalahan III meliputi P7 dan P8.
3. **Wilayah fokus permasalahan III**, yang berada di antara jalan kolektor primer dan arteri sekunder. Wilayah fokus permasalahan III mencakup wilayah perencanaan P9, P10, P11, P12, P13, P14 dan P15. selanjutnya berdasarkan letak geografis dan hubungan fungsional, maka wilayah ini dibagi menjadi tiga sub wilayah fokus permasalahan II, yaitu sub wilayah fokus permasalahan I meliputi P9 dan P10, sub wilayah fokus permasalahan II meliputi P11 dan P13 dan sub wilayah fokus permasalahan III meliputi P14 dan P15.
4. **Wilayah fokus permasalahan IV**, yang berada di bagian sebelah Barat jalan arteri sekunder. Wilayah fokus permasalahan IV mencakup wilayah perencanaan P16 dan P17.
5. Wilayah fokus permasalahan keputusan mandiri (*independent*) yaitu wilayah fokus permasalahan yang berdiri sendiri dan tidak secara langsung terkait ke wilayah fokus permasalahan lainnya yaitu P12 yang berada di bagian Selatan dari Kecamatan Lembur Situ dan P18 yang berada di utara jalan arteri primer bagian Barat.

Untuk lebih jelasnya mengenai wilayah fokus permasalahan dapat dilihat pada Gambar 4.2 di bawah ini.

Gambar 4.2
**WILAYAH-WILAYAH FOKUS PERMASALAHAN
 DI WILAYAH PERLUASAN KOTA SUKABUMI**



Sumber : Hasil Analisi Data, 2002

4.8.2. Penetapan Pilihan Program Pembangunan Wilayah Perluasan Kota Sukabumi

Wilayah perencanaan pada dasarnya merupakan suatu sistematika perwilayahan dalam perencanaan pembangunan wilayah perluasan Kota Sukabumi yang merupakan wilayah keputusan (*decision areas*). Berdasarkan pada hasil penilaian-penilaian

(evaluasi) kinerja pembangunan sarana pelayanan masyarakat di wilayah perluasan Kota Sukabumi yang telah dilakukan di atas dan indeks sentralitas, maka didapatkan pilihan-pilihan layak untuk diprogramkan pada setiap wilayah keputusan sebagaimana dicantumkan dalam Tabel IV.18 berikut ini.

Tabel IV.18
PENETAPAN PILIHAN PROGRAM PEMBANGUNAN
DI WILAYAH PERLUASAN KOTA SUKABUMI

No	KECAMATAN	WILAYAH KEPUTUSAN	KODE	PROGRAM PEMBANGUNAN (PILIHAN LAYAK)
1.	Kec. Cibeureum Hilir	Subang Jaya	P1	Sarper, Sarpemd, Sarkes, Sarrek
		Cisarua	P2	Sarper, Sarpemd, Sarkes, Sarrek
		Babakan	P3	Sarper, Sarpemd, Sarkes, Sarrek
		Cibeureum Hilir	P4	Sarper, Sarpemd, Sarkes, Sarrek
		Sindang Palay	P5	Sarper, Sarpemd, Sarkes, Sarrek
		Limus Nunggal	P6	Sarper, Sarpemd, Sarkes, Sarrek
2.	Kec. Baros	Baros	P7	Sarper, Sarpemd, Sarkes, Sarrek
		Jaya Raksa	P8	Sarper, Sarpemd, Sarkes, Sarrek
		Jaya Mekar	P9	Sarper, Sarpemd, Sarkes, Sarrek
		Sudajaya Hilir	P10	Sarper, Sarpemd, Sarkes, Sarrek
		Sindang Sari	P11	Sarper, Sarpemd, Sarkes, Sarrek
3.	Kec. Cipanengah	Cikundul	P12	SarPer, Sarpemd, Sarkes, Sarrek
		Cipanengah	P13	SarPer, Sarpemd, Sarkes, Sarrek
		Situ Mekar	P14	SarPer, Sarpemd, Sarkes, Sarrek
		Lembur Situ	P15	SarPer, Sarpemd, Sarkes, Sarrek
		Dayeuh Luhur	P16	SarPer, Sarpemd, Sarkes, Sarrek
		Sukakarya	P17	SarPer, Sarpemd, Sarkes, Sarrek
		Karang Tengah	P18	SarPer, Sarpemd, Sarkes, Sarrek

Keterangan :

- Sarper : Sarana Perdagangan
- Sarpemd : Sarana Pendidikan
- Sarkes : Sarana Kesehatan
- Sarrek : Sarana Rekreasi

Sumber : Hasil Analisi data, 2002

4.8.3. Penetapan Keterkaitan Program Pembangunan Wilayah Perluasan Kota Sukabumi

Kegiatan fungsional yang dikembangkan disetiap wilayah perencanaan sebagai wilayah keputusan didasarkan kepada hubungan keterkaitan fungsional yang berkesesuaian (*compatible*) yaitu yang dapat dikombinasikan tanpa akan menimbulkan konflik kepentingan, konflik kesesuaian, konflik penggunaan lahan, konflik fungsional

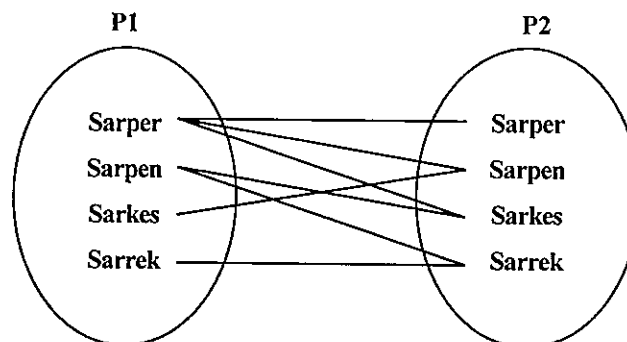
kegiatan, kemacetan (*congestion*) atau persaingan fungsional yang tidak sehat. Keterkaitan yang berkesesuaian ini dianalisis pada setiap wilayah fokus permasalahan sebagai berikut.

4.8.3.1. Wilayah Fokus Permasalahan I (P1 dan P2)

Pada sub wilayah fokus permasalahan P1 dan P2, yang keberkesesuaian (*compatible*) dan yang tidak berkesesuaian (*incompatible*) fungsional adalah sebagai berikut :

Gambar 4.3
Matriks Wilayah Fokus Permasalahan I (P1 dan P2)

Wilayah Keputusan	Sub Wilayah P1				Sub Wilayah P2			
	Sarper	Sarpen	Sarkes	Sarrek	Sarper	Sarpen	Sarkes	Sarrek
P1	Sarper	-	V	V	V	V	V	O
	Sarpen	-	-	V	V	O	V	V
	Sarkes	-	-	-	O	V	V	O
	Sarrek	-	-	-	V	O	V	O
P2	Sarper	-	-	-	-	V	V	V
	Sarpen	-	-	-	-	-	V	O
	Sarkes	-	-	-	-	-	-	V
	Sarrek	-	-	-	-	-	-	-



Keterangan :

- Sarper : Sarana perdagangan V : pasangan pilihan layak berkesesuaian (*compatible*)
 Sarpen : Sarana pendidikan O : pasangan pilihan tidak berkesesuaian (*incompatible*)
 Sarkes : Sarana rekreasi dan hiburan
 Sarrek : Sarana rekreasi

Sumber : Hasil Analisa Data, 2002

4.8.3.2. Wilayah Fokus Permasalahan II

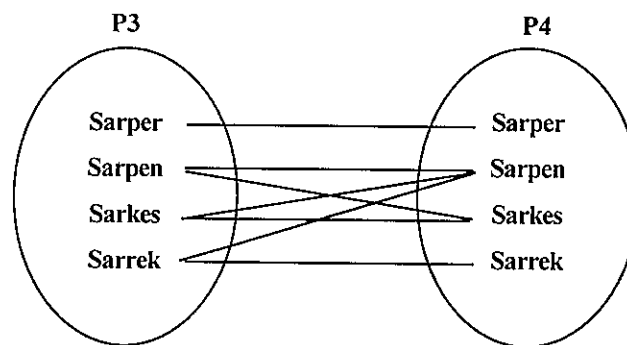
Pada wilayah fokus permasalahan II ini di bagi dalam tiga sub wilayah fokus permasalahan, yaitu :

1. Sub Wilayah Fokus Permasalahan I (P3 dan P4)

Pada sub wilayah fokus permasalahan P3 dan P4, yang keberkesesuaian (*compatible*) dan yang tidak keberkesesuaian (*incompatible*) fungsional adalah sebagai berikut :

Gambar 4.4
Matriks Sub Wilayah Fokus Permasalahan I (P3 dan P4)

Wilayah Keputusan		Sub wilayah P3				Sub Wilayah P4			
		Sarper	Sarpen	Sarkes	Sarrek	Sarper	Sarpen	Sarkes	Sarrek
P3	Sarper	-	O	O	O	V	O	O	O
	Sarpen	-	-	V	V	O	V	V	V
	Sarkes	-	-	-	V	O	V	V	V
	sarrek	-	-	-	-	O	V	V	V
P4	Sarper	-	-	-	-	-	O	O	O
	Sarpen	-	-	-	-	-	-	V	V
	Sarkes	-	-	-	-	-	-	-	V
	sarrek	-	-	-	-	-	-	-	-



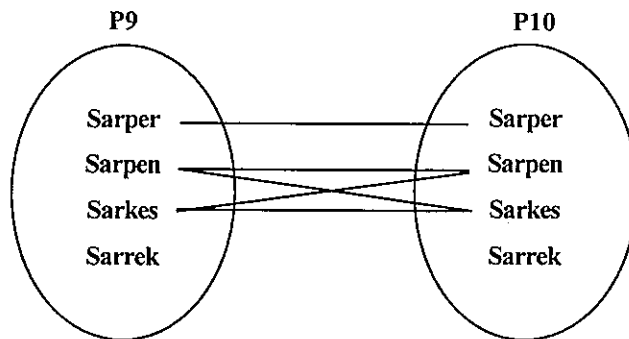
Keterangan :

- Sarper : Sarana perdagangan V : pasangan pilihan layak keberkesesuaian (*compatible*)
 Sarpen : Sarana pendidikan O : pasangan pilihan tidak keberkesesuaian (*incompatible*)
 Sarkes : Sarana rekreasi dan hiburan
 Sarrek : Sarana rekreasi

Sumber : Hasil Analisa Data, 2002

2. Sub wilayah fokus permasalahan II (P5 dan P6)

Pada sub wilayah fokus permasalahan P5 dan P6 yang keberkesesuaian (*compatible*) dan yang tidak keberkesesuaian (*incompatible*) fungsional adalah sebagai berikut :



Keterangan :

- Sarper : Sarana perdagangan
- Sarpen : Sarana pendidikan
- Sarkes : Sarana rekreasi dan hiburan
- Sarrek : Sarana rekreasi
- V : pasangan pilihan layak berkesesuaian (*compatible*)
- O : pasangan pilihan tidak berkesesuaian (*incompatible*)

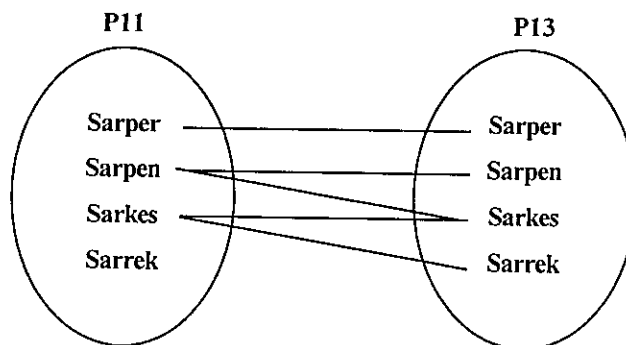
Sumber : Hasil Analisis Data, 2002

2. Sub Wilayah Fokus Permasalahan II (P11 dan P13)

Pada sub wilayah fokus permasalahan P11 dan P13, yang keberkesesuaian (*compatible*) dan yang tidak berkesesuaian (*incompatible*) fungsional adalah sebagai berikut :

Gambar 4.8
Matriks Sub Wilayah Fokus Permasalahan II (P11 dan P13)

Wilayah Keputusan	Sub Wilayah P11				Sub Wilayah P13				
	Sarper	Sarpen	Sarkes	Sarrek	Sarper	Sarpen	Sarkes	Sarrek	
P11	Sarper	-	O	O	O	V	O	O	O
	Sarpen	-	-	V	O	O	V	V	V
	Sarkes	-	-	-	O	O	V	V	V
	Sarrek	-	-	-	-	O	O	O	O
P13	Sarper	-	-	-	-	-	O	O	O
	Sarpen	-	-	-	-	-	-	V	V
	Sarkes	-	-	-	-	-	-	-	V
	Sarrek	-	-	-	-	-	-	-	-



Keterangan :

- Sarper** : Sarana perdagangan **V** : pasangan pilihan layak berkesesuaian (*compatible*)
Sarpen : Sarana pendidikan **O** : pasangan pilihan tidak berkesesuaian (*incompatible*)
Sarkes : Sarana rekreasi dan hiburan
Sarrek : Sarana rekreasi

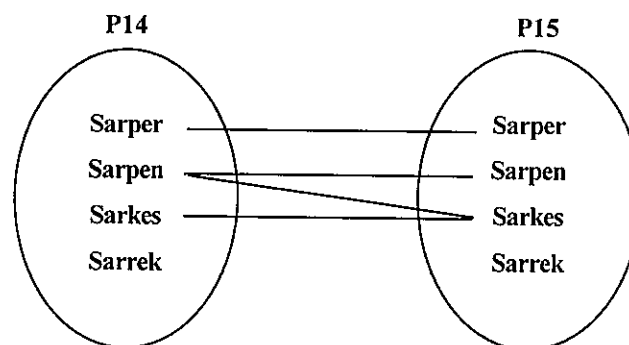
Sumber : Hasil Analisis Data, 2002

3. Sub wilayah fokus permasalahan III (P14 dan P15)

Pada sub wilayah fokus permasalahan P14 dan P15, yang keberkesesuaian (*compatible*) dan yang tidak berkesesuaian (*incompatible*) fungsional adalah sebagai berikut :

Gambar 4.9
Matriks Sub Wilayah Fokus Permasalahan I (P14 dan P15)

Wilayah Keputusan	Sub Wilayah P14				Sub Wilayah P15				
	Sarper	Sarpen	Sarkes	Sarrek	Sarper	Sarpen	Sarkes	Sarrek	
P14	Sarper	-	O	O	O	V	O	O	O
	Sarpen	-	-	V	O	O	V	V	O
	Sarkes	-	-	-	O	O	V	V	O
	Sarrek	-	-	-	-	O	O	O	O
P15	Sarper	-	-	-	-	O	O	O	O
	Sarpen	-	-	-	-	-	-	V	O
	Sarkes	-	-	-	-	-	-	-	O
	Sarrek	-	-	-	-	-	-	-	-

**Keterangan :**

- Sarper** : Sarana perdagangan **V** : pasangan pilihan layak berkesesuaian (*compatible*)
Sarpen : Sarana pendidikan **O** : pasangan pilihan tidak berkesesuaian (*incompatible*)
Sarkes : Sarana rekreasi dan hiburan
Sarrek : Sarana rekreasi

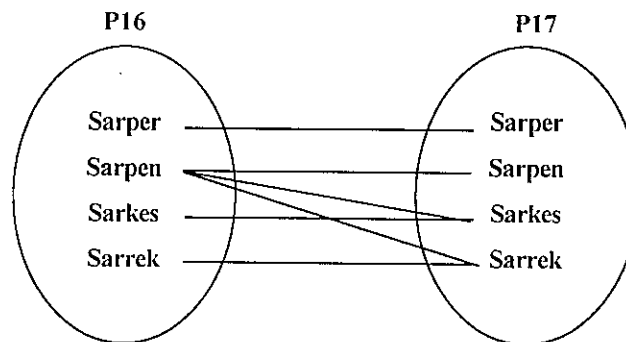
Sumber : Hasil Analisis Data, 2002

4.9.3.4. Wilayah Fokus Permasalahan IV

Wilayah fokus permasalahan IV ini, wilayah perencanaanya meliputi P16 dan P17. Pada sub wilayah fokus permasalahan P16 dan P17 yang keberkesesuaian (*compatible*) dan yang tidak keberkesesuaian (*incompatible*) fungsional adalah sebagai berikut :

Gambar 4.10
Matriks Wilayah Fokus Permasalahan IV (P16 dan P17)

Wilayah Keputusan	Sub Wilayah P16				Sub Wilayah P17				
	Sarper	Sarpen	Sarkes	Sarrek	Sarper	Sarpen	Sarkes	Sarrek	
P16	Sarper	-	O	O	O	V	O	O	O
	Sarpen	-	-	V	V	O	V	V	V
	Sarkes	-	-	-	V	O	V	V	V
	Sarrek	-	-	-	-	O	V	V	V
P17	Sarper	-	-	-	-	-	O	O	O
	Sarpen	-	-	-	-	-	-	V	V
	Sarkes	-	-	-	-	-	-	-	V
	Sarrek	-	-	-	-	-	-	-	-



Keterangan :

- Sarper : Sarana perdagangan V : pasangan pilihan layak keberkesesuaian (*compatible*)
 Sarpen : Sarana pendidikan O : pasangan pilihan tidak keberkesesuaian (*incompatible*)
 Sarkes : Sarana rekreasi dan hiburan
 Sarrek : Sarana rekreasi

Sumber : Hasil Analisis Data, 2002

4.9.4. Pilihan Strategis di Wilayah Perluasan Kota Sukabumi

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap fokus-fokus permasalahan di wilayah-wilayah keputusan di wilayah perluasan Kota Sukabumi sebagaimana telah diuraikan di atas dan nilai dari indeks sentralitas, maka pengembangan disetiap wilayah

perencanaan di wilayah perluasan Kota Sukabumi dapat diarahkan sesuai dengan pilihan layak di wilayah tersebut kepada kegiatan fungsional perkotaan yang **dominan** tanpa akan menimbulkan konflik kepentingan, konflik kesesuaian, konflik penggunaan lahan, konflik fungsional kegiatan serta kemacetan (*congestion*) atau persaingan fungsional yang tidak sehat, dengan rincian sebagai berikut :

4.9.4.1 Pilihan Strategis untuk Wilayah-Wilayah Keputusan

- a). P1 (Kelurahan Subang Jaya) kegiatan/pembangunan yang dapat dikembangkan di wilayah P1 (Kelurahan Subang Jaya) ini terutama kegiatan/pembangunan **sarana perdagangan** (yaitu berupa pasar lingkungan lokasi dapat di P1 ataupun P2 dan sub terminal) yang dapat menunjang di P2 serta kelurahan lain disekitarnya dan **sarana pendidikan** (yaitu berupa penambahan TK dan SLTP) sebagai **fungsi dominan** dan kegiatan-kegiatan **penunjang** lainnya adalah **sarana kesehatan** (yaitu berupa puskesmas) dan **sarana rekreasi** (yaitu penambahan taman bermain di pusat kegiatan lingkungan ataupun dalam perumahan).
- b). P2 (Kelurahan Cisarua) kegiatan/pembangunan yang dapat dikembangkan di wilayah P2 (Kelurahan Cisarua) sebagai **pusat pelayanan masyarakat** nantinya adalah terutama kegiatan/pembangunan **sarana pendidikan** (yaitu penambahan taman kanak-kanak), **sarana kesehatan** (yaitu penambahan balai pengobatan dan BKIA) yang dapat melayani kebutuhan masyarakat di P2 serta Kelurahan lainnya di sekitarnya dan **sarana rekreasi** (yaitu berupa penambahan taman bermain untuk anak-anak) sebagai **fungsi dominan** dan kegiatan-kegiatan **penunjang** lainnya adalah **sarana perdagangan** (yaitu pasar lingkungan) yang dapat dibangun di wilayah P1 maupun P2.

- c). P3 (Kelurahan Babakan) kegiatan/pembangunan yang dapat dikembangkan di wilayah P3 (Kelurahan Babakan) ini terutama kegiatan/pembangunan **sarana pendidikan** (yaitu TK dan SLTA) untuk SLTA ini dapat dibangun baik di wilayah P3 ataupun wilayah P4, **sarana kesehatan** (yaitu puskesmas dan penambahan balai pengobatan) dan **sarana rekreasi** (yaitu penambahan taman bermain di pusat lingkungan masyarakat) sebagai **fungsi dominan** dan kegiatan-kegiatan **penunjang** lainnya adalah **sarana perdagangan** (yaitu penambahan warung dan toko).
- d). P4 (Kelurahan Cibeureum Hilir) kegiatan/pembangunan yang dapat dikembangkan di wilayah P4 (Kelurahan Cibeureum Hilir) ini terutama kegiatan/pembangunan **sarana pendidikan** (yaitu penambahan TK, SLTP), **sarana kesehatan** (yaitu penambahan balai pengobatan) sebagai **fungsi dominan** dan kegiatan-kegiatan **penunjang** lainnya adalah **sarana rekreasi** (yaitu penambahan taman bermain di pusat kegiatan lingkungan masyarakat) dan **sarana perdagangan** (yaitu penambahan warung dan toko).
- e). P5 (Kelurahan Sindang Palay) kegiatan/pembangunan yang dapat dikembangkan di wilayah P5 (Kelurahan Sindang Palay) ini terutama kegiatan/pembangunan **sarana pendidikan** (yaitu penambahan jumlah TK, SD dan SLTP) sebagai **fungsi dominan** dan kegiatan-kegiatan penunjang lainnya adalah **sarana perdagangan** (yaitu penambahan jumlah toko), **sarana rekreasi** (yaitu penambahan taman bermain di pusat-pusat lingkungan kegiatan masyarakat) dan **sarana kesehatan** (yaitu penambahan jumlah balai pengobatan dan puskesmas).
- f). P6 (Kelurahan Limus Nunggal) kegiatan/pembangunan yang dapat dikembangkan di wilayah P6 (Kelurahan Limus Nunggal) yang nantinya **potensial sebagai pusat pelayanan masyarakat** di Kecamatan Cibeureum, adalah terutama

- kegiatan/pembangunan **sarana kesehatan** (yaitu penambahan jumlah balai pengobatan dan BKIA) dan **sarana rekreasi** (yaitu penambahan taman bermain di pusat-pusat lingkungan kegiatan masyarakat) sebagai **fungsi dominan** dan kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat **menunjang** di P5 dan kelurahan lain di Kecamatan Cibeureum adalah **sarana perdagangan** (yaitu pasar lingkungan dan pembangunan sub terminal baru serta penambahan jumlah toko) dan **sarana pendidikan** (yaitu berupa penambahan jumlah TK dan SLTA).
- g). P7 (Kelurahan Baros) kegiatan/pembangunan yang dapat dikembangkan di wilayah P1 (Kelurahan Baros) yang **berpotensi sebagai pusat pelayanan masyarakat** di Kecamatan Baros adalah terutama kegiatan/pembangunan **sarana perdagangan dan jasa** (yaitu penambahan jumlah warung, pasar lingkungan dan sub terminal untuk melayani masyarakat di P8 dan Kelurahan lain di kecamatan Baros) sebagai **fungsi dominan** dan kegiatan-kegiatan **penunjang** lainnya adalah **sarana pendidikan** (yaitu penambahan jumlah TK dan SLTP serta pembangunan SLTA dirasakan sangat diperlukan), **sarana kesehatan** (yaitu penambahan balai pengobatan dan BKIA untuk jangka panjang) dan **sarana rekreasi** (yaitu penambahan taman bermain di pusat-pusat lingkungan kegiatan masyarakat dan perumahan).
- h). P8 (Kelurahan Jaya Raksa) kegiatan/pembangunan yang dapat dikembangkan di wilayah P8 (Kelurahan Jaya Raksa) ini terutama kegiatan/pembangunan **sarana pendidikan** (yaitu penambahan jumlah TK dan SLTA, untuk sarana SLTA ini dapat dibangun baik di P7 maupun di P8), **sarana kesehatan** (yaitu puskesmas dan balai pengobatan) dan **sarana rekreasi** (yaitu penambahan taman bermain di pusat-pusat lingkungan kegiatan masyarakat) sebagai **fungsi dominan** dan kegiatan-kegiatan **penunjang** lainnya adalah **sarana perdagangan** (yaitu penambahan jumlah toko).

- i). P9 (Kelurahan Jaya Mekar) kegiatan/pembangunan yang dapat dikembangkan di wilayah P9 (Kelurahan Jaya Mekar) ini terutama kegiatan/pembangunan **sarana pendidikan** (yaitu penambahan jumlah TK dan SLTP) dan **sarana kesehatan** (yaitu penambahan balai pengobatan) sebagai **fungsi dominan** dan kegiatan-kegiatan **penunjang** lainnya adalah **sarana perdagangan** (yaitu penambahan jumlah toko) dan **sarana rekreasi** (yaitu taman bermain di pusat-pusat lingkungan kegiatan masyarakat).
- j). P10 (Kelurahan Sudajaya Hilir) kegiatan/pembangunan yang dapat dikembangkan di wilayah P10 (Kelurahan Sudajaya Hilir) ini terutama kegiatan/pembangunan **sarana pendidikan** (yaitu penambahan jumlah TK dan sekolah dasar) dan **sarana kesehatan** (yaitu puskesmas dan penambahan balai pengobatan) sebagai **fungsi dominan** dan kegiatan-kegiatan **penunjang** lainnya adalah **sarana perdagangan** (yaitu penambahan jumlah warung/kios untuk melayani kebutuhan sehari-hari masyarakat di P10) dan **sarana rekreasi** (yaitu tempat olah raga dan penambahan taman bermain di pusat-pusat lingkungan kegiatan masyarakat).
- k). P11 (Kelurahan Sindang Sari) kegiatan/pembangunan yang dapat dikembangkan di wilayah P11 (Kelurahan Sindang Sari) ini terutama kegiatan/pembangunan **sarana pendidikan** (yaitu penambahan jumlah TK, SD dan SLTP, untuk SLTP dapat di lokasi P11 maupun P13) dan **sarana kesehatan** (yaitu puskesmas yang dapat dibangun terlebih dahulu baik di lokasi P11 maupun P13 dan balai pengobatan) sebagai **fungsi dominan** dan kegiatan-kegiatan **penunjang** lainnya adalah **sarana perdagangan** (yaitu penambahan jumlah toko) dan **sarana rekreasi** (yaitu berupa penambahan taman bermain di pusat-pusat lingkungan kegiatan masyarakat).

- l). P13 (Kelurahan Cipanengah) kegiatan/pembangunan yang dapat dikembangkan di wilayah P13 (Kelurahan Cipanengah) yang **berpotensi sebagai pusat pelayanan masyarakat** di Kecamatan Cipanengah dan sebagian masyarakat Kabupaten Sukabumi adalah terutama kegiatan/pembangunan **sarana pendidikan** (yaitu penambahan jumlah TK dan SLTP), **sarana rekreasi** (yaitu penambahan taman bermain di pusat-pusat lingkungan kegiatan masyarakat) dan **sarana kesehatan** (yaitu berupa puskesmas) sebagai **fungsi dominan** dan kegiatan-kegiatan **penunjang** lainnya adalah **sarana perdagangan** (yaitu pembangunan untuk jangka panjang berupa pasar lingkungan yang dapat melayani kebutuhan masyarakat di P11, P12 dan kelurahan lain disekitarnya).
- m). P14 (Kelurahan Situ Mekar) kegiatan/pembangunan yang dapat dikembangkan di wilayah P14 (Kelurahan Situ Mekar) ini terutama kegiatan/pembangunan **sarana pendidikan** (yaitu penambahan jumlah TK dan sekolah dasar) sebagai **fungsi dominan** dan kegiatan-kegiatan **penunjang** lainnya adalah **sarana kesehatan** (yaitu puskesmas dan penambahan balai pengobatan), **sarana perdagangan** (yaitu penambahan jumlah toko) dan **sarana rekreasi** (yaitu berupa penambahan taman bermain di pusat-pusat lingkungan kegiatan masyarakat).
- n). P15 (Kelurahan Lembur Situ) kegiatan/pembangunan yang dapat dikembangkan di wilayah P1 (Kelurahan Lembur Situ) berdasarkan nilai indeks sentralitas memiliki nilai yang besar sehingga berpotensi juga sebagai pusat pelayanan masyarakat di Kecamatan Cipanengah selain Kelurahan Cipanengeh, namun untuk Kelurahan Lembur Situ ini selain dapat melayani di Kecamatan Cipanengah juga melayani masyarakat Kabupaten Sukabumi bagian Selatan. Kegiatan/pembangunan yang dapat dikembangkan adalah terutama **sarana kesehatan** (yaitu penambahan balai

pengobatan dan BKIA untuk melayani masyarakat di P14 maupun masyarakat Kabupaten Sukabumi bagian Selatan) sebagai **fungsi dominan** dan kegiatan-kegiatan **penunjang** lainnya adalah **sarana pendidikan** (yaitu berupa penambahan taman kanak-kanak) dan **sarana perdagangan** (yaitu penambahan jumlah warung dan kios).

- o). P16 (Kelurahan Dayeuh Luhur) kegiatan/pembangunan yang dapat dikembangkan di wilayah P16 (Kelurahan Dayeuh Luhur) ini terutama adalah kegiatan/pembangunan **sarana pendidikan** (yaitu berupa penambahan TK dan SLTP) sebagai **fungsi dominan** dan kegiatan-kegiatan **penunjang** lainnya adalah **sarana kesehatan** (yaitu berupa penambahan balai pengobatan), **sarana rekreasi** (yaitu berupa penambahan taman bermain di pusat-pusat lingkungan kegiatan masyarakat) dan **sarana perdagangan** (yaitu pasar lingkungan untuk jangka panjang).
- p). P17 (Kelurahan Sukakarya) kegiatan/pembangunan yang dapat dikembangkan di wilayah P17 (Kelurahan Sukakarya) berdasarkan nilai indeks sentralitas, **berpotensi juga sebagai pusat pelayanan masyarakat**. Kegiatan/pembangunan yang layak adalah terutama **sarana kesehatan** (yaitu balai pengobatan dan BKIA untuk jangka panjang untuk melayani masyarakat di P16 dan kelurahan lain sekitar serta masyarakat Kabupaten Sukabumi wilayah Barat) dan **sarana rekreasi** (yaitu berupa penambahan taman bermain di pusat-pusat lingkungan kegiatan masyarakat) sebagai **fungsi dominan** dan kegiatan-kegiatan **penunjang** lainnya adalah **sarana pendidikan** (yaitu berupa penambahan taman kanak-kanak dan sekolah dasar) dan **sarana perdagangan** (yaitu penambahan warung dan pembangunan sub terminal/terminal utama tipe A sebagai alternatif relokasi terminal Kota Sukabumi pada saat ini).

4.9.4.2 Pilihan Strategis untuk Wilayah Mandiri (*independent*)

Pada wilayah keputusan ini yang masuk dalam wilayah keputusan mandiri (*independent*) adalah P18 untuk Kelurahan Karang Tengah dan P12 untuk Kelurahan Cikundul. Kegiatan/pembangunan yang layak untuk dikembangkan dikedua wilayah mandiri tersebut antara lain adalah :

- a) P12 (Kelurahan Cikundul) kegiatan/pembangunan yang layak dikembangkan adalah terutama **sarana pendidikan** (yaitu berupa penambahan taman kanak-kanak) dan **sarana rekreasi** (yaitu berupa perbaikan pemandian air panas cikundul sebagai alternatif tempat rekreasi serta penambahan taman bermain di pusat-pusat lingkungan kegiatan masyarakat) sebagai **fungsi dominan** dan kegiatan-kegiatan **penunjang** lainnya adalah **sarana kesehatan** (yaitu berupa penambahan balai pengobatan) dan **sarana perdagangan** (yaitu berupa penambahan jumlah toko).
- b) P18 (Kelurahan Karang Tengah) kegiatan/pembangunan yang layak dikembangkan adalah terutama **sarana pendidikan** (yaitu berupa penambahan TK dan SLTP) dan **sarana rekreasi** (yaitu berupa penambahan taman di pusat-pusat lingkungan kegiatan masyarakat dan perumahan) sebagai **fungsi dominan** dan kegiatan-kegiatan **penunjang** lainnya adalah **sarana kesehatan** (yaitu berupa penambahan balai pengobatan).

Untuk lebih jelasnya mengenai pilihan strategis pembangunan sarana pelayanan masyarakat di wilayah perluasan Kota Sukabumi, dapat dilihat pada Gambar Peta IV.06 di bawah ini.



TESIS

**EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN SARANA
PELAYANAN MASYARAKAT DI WILAYAH PERLUASAN**

GAMBAR

**STRATEGI PEMBANGUNAN
SARANA PELAYANAN MASYARAKAT
BERDASARKAN AWKB**

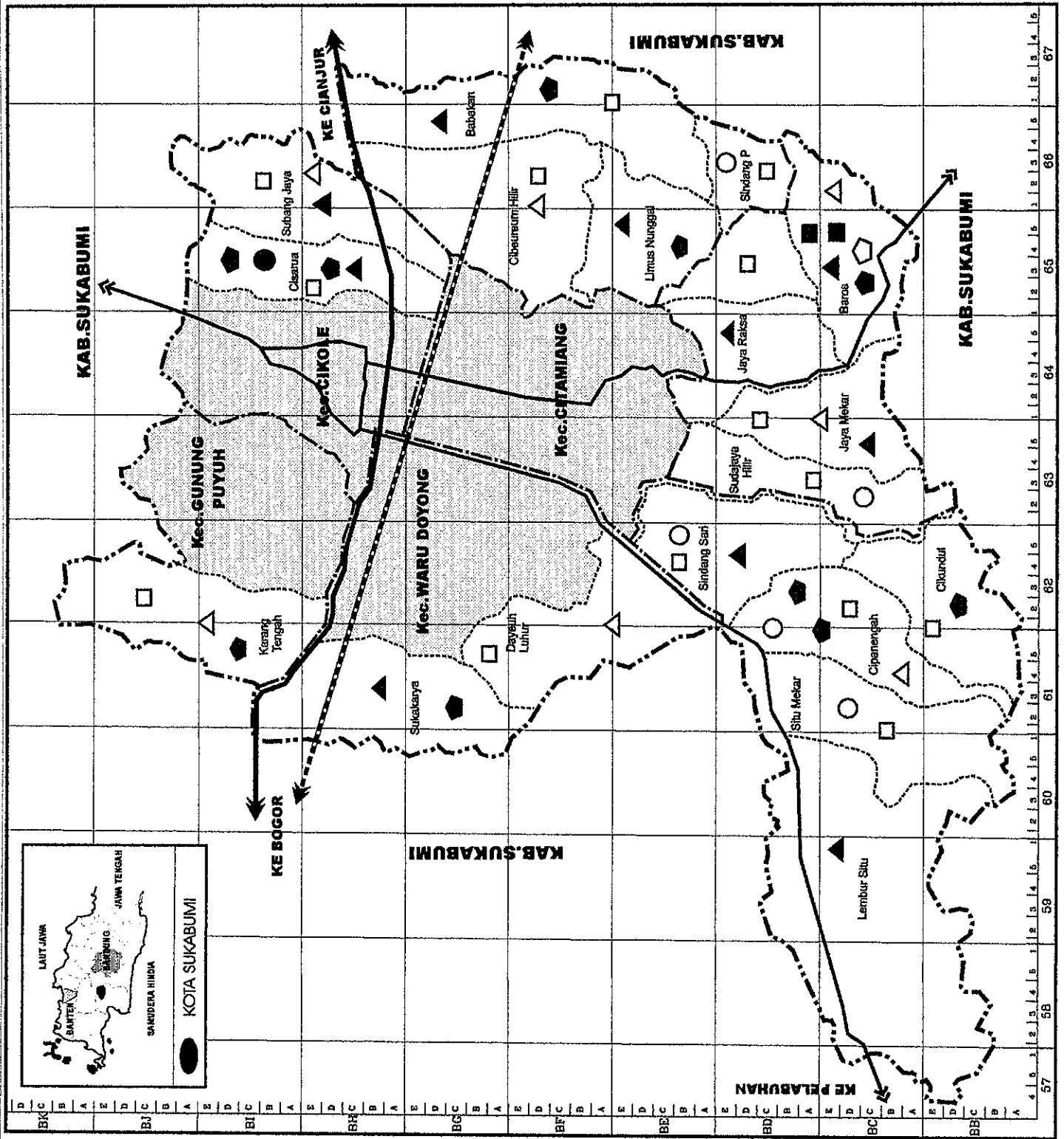
- | | | | |
|--|--------------------|--|-----------|
| | Batas Administrasi | | BKIA |
| | Batas Kecamatan | | BP |
| | Taman Bermain | | Puskesmas |
| | Lap. Olah Raga | | SLTA |
| | Pasar Lingkungan | | SLTP |
| | Sub Terminal | | TK |
| | Warung | | SD |
| | Toko | | |



SKALA	NO. GAMBAR
1:55.000	IV.06

SUMBER

HASIL ANALISA DATA 2002



KOTA SUKABUMI

BAB V

KESIMPULAN HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN SARANA PELAYANAN MASYARAKAT

5.1. Kesimpulan dan Temuan Studi

Dari hasil evaluasi kinerja pembangunan sarana pelayanan masyarakat di wilayah perluasan Kota Sukabumi, dikaitkan dengan tujuan diundangkannya PP. No.3 Tahun 1995 serta visi Kota Sukabumi sebagai pusat pelayanan jasa terpadu di bidang perdagangan, pendidikan dan kesehatan. Secara garis besar dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa untuk kinerja pembangunan sarana pelayanan masyarakat di wilayah perluasan Kota Sukabumi, dalam hal ini adalah sarana perdagangan, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana rekreasi dan sarana peribadatan dinilai secara *komprensif* (penilaian data primer dan data sekunder) **belum tercapai (35,8%)** artinya bahwa pembangunan sarana pelayanan masyarakat selama tujuh tahun pasca diundangkannya PP. No.3 Tahun 1995 tentang Perluasan Kota Sukabumi belum dapat memenuhi dan melayani kebutuhan dasar (*basic needs*) masyarakat kota di 18 kelurahan di wilayah perluasan Kota Sukabumi, hal ini memperlihatkan kurangnya kesungguhan dan konsistennya Pemerintah Kota Sukabumi untuk mengarahkan pembangunan sarana pelayanan masyarakat dengan skala yang lebih besar ke wilayah perluasan Kota Sukabumi untuk memanfaatkan sumber daya yang ada dibandingkan dengan wilayah Kota Sukabumi lama dan pusat kota.

Hal tersebut di atas didukung dengan temuan hasil evaluasi kinerja pembangunan sarana pelayanan masyarakat berdasarkan pada aspek-aspek penelitian, antara lain aspek ketersediaan sarana pelayanan masyarakat, aspek kondisi sarana pelayanan masyarakat, aspek lokasi dan sebaran sarana pelayanan masyarakat, aspek arah dan frekuensi

pergerakan masyarakat dan aspek pelaku pembangunan di wilayah perluasan Kota Sukabumi, antara lain adalah :

- 1) Untuk tingkat ketersediaan sarana pelayanan masyarakat di wilayah perluasan Kota Sukabumi yang dinilai sudah **memadai** adalah sarana peribadatan (masjid dan musholla), sarana perdagangan (warung/kios dan toko), sarana kesehatan (puskesmas) dan sarana rekreasi dan hiburan (tempat olah raga).
- 2) Kondisi sarana pelayanan masyarakat berdasarkan preferensi masyarakat di wilayah perluasan Kota Sukabumi dinilai **cukup** artinya masih **memerlukan penambahan** jumlah sarana pelayanan masyarakat akan tetapi untuk kondisi sarana tidak perlu perbaikan serta lokasinya rata-rata sudah sesuai/tepat dengan keinginan masyarakat.
- 3) Untuk lokasi dan sebaran sarana pelayanan masyarakat di wilayah perluasan Kota Sukabumi yang dinilai sebarannya **merata** adalah sarana peribadatan (masjid dan musholla), sedangkan lokasi (jarak rata-rata) ke sarana pelayanan masyarakat dinilai berjarak **sedang/cukup jauh** (600 meter sampai dengan 1.200 meter, dengan waktu tempuh 11-20 menit berjalan kaki) dari tempat tinggal ke sarana pelayanan masyarakat yang ada.
- 4) Dengan adanya perluasan Kota Sukabumi dan pembangunan sarana pelayanan masyarakat di wilayah perluasan Kota Sukabumi secara nyata telah dapat **menurunkan** angka pergerakan masyarakat ke pusat kota dan wilayah Kota Sukabumi lama yaitu sebesar 29,75% (tempat bekerja), 27,08% (pendidikan), 35,49% (perdagangan), 48% (kesehatan) dan 27,2% (rekreasi). Dengan frekuensi pergerakan ke pusat kota dan wilayah Kota Sukabumi lama dalam kategori **sangat sering** (20,04%), **sering** (37,65%) dan **cukup sering** (32,44%).

- 5) Dari tiga pusat pelayanan kecamatan di wilayah perluasan Kota Sukabumi yang telah ditetapkan dalam RUTRK Sukabumi Tahun 1994-2006, berdasarkan nilai indeks sentralitas ternyata hanya Kelurahan Cipanengah di Kecamatan Cipanengah yang secara nyata dapat berkembang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di sekitarnya. Untuk Kelurahan Baros di Kecamatan Baros dan Kelurahan Limus Nunggal di Kecamatan Cibeureum Hilir di lihat dari nilai indeks sentralitas perkembangannya masih kurang.

5.2. Rekomendasi

Berdasarkan temuan studi di atas dilihat dari ketersediaan sarana pelayanan, kondisi sarana pelayanan, lokasi dan sebaran sarana pelayanan, arah dan frekuensi pergerakan masyarakat keberbagai sarana pelayanan masyarakat, maka ada beberapa rekomendasi yang berupa tindakan (*action*) sebagai upaya peningkatan kinerja pembangunan sarana pelayanan masyarakat di wilayah perluasan Kota Sukabumi, antara lain adalah :

- 1) Peningkatan kinerja pembangunan sarana pelayanan masyarakat di wilayah perluasan Kota Sukabumi melalui pemerataan pembangunan sarana pelayanan masyarakat di wilayah perluasan Kota Sukabumi (prioritas pada pusat-pusat pelayanan kecamatan berdasarkan pada nilai indeks sentralitas antara lain yaitu Kelurahan Baros, Kelurahan Cipanengah, Kelurahan Limus Nunggal, Kelurahan Cisarua dan Kelurahan Sukakarya) dengan menggunakan pilihan strategis pembangunan dari hasil **Analisis Wilayah Keputusan Berkaitan (AWKB)** yang telah diuraikan lebih jelas pada Bab IV.

- 2) Perlu adanya kebijakan dari Pemerintah Kota Sukabumi yang dapat mendorong terjadinya **percepatan pembangunan** berbagai jenis sarana pelayanan masyarakat di wilayah perluasan Kota Sukabumi, terutama sekali di beberapa lokasi kelurahan sebagai pusat pelayanan kecamatan dan lingkungan antara lain yaitu di Kelurahan Baros, Kelurahan Limus Nunggal, Kelurahan Cisarua serta Kelurahan Sukakarya.
- 3) Untuk meningkatkan potensi tata ruang di wilayah perluasan Kota Sukabumi dengan tujuan meminimalkan arah pergerakan penduduk ke sarana yang ada di wilayah Kota Sukabumi lama dan pusat kota, ada beberapa kegiatan dan rencana tata guna lahan yang perlu ditingkatkan penggunaannya, antara lain :
 - Untuk kegiatan **perkantoran** dan **perdagangan**, maka sepanjang Jalan Didi Sukardi, Jalan Pelabuhan II dan Jalan Merdeka perlu ditingkatkan penggunaannya.
 - Untuk kegiatan **perdagangan** dan **jasa**, maka ada empat lokasi pusat pelayanan yang dapat dikembangkan yaitu Kelurahan Cisarua, Kelurahan Limus Nunggal, Kelurahan Baros dan Kelurahan Cipanengah.
 - Untuk kegiatan **industri** yang perlu ditingkatkan adalah di Kelurahan Babakan dan Kelurahan Sukakarya, hal ini di maksud untuk mengurangi arah pergerakan penduduk ke wilayah Kota Sukabumi lama untuk keperluan bekerja.
- 4) Menata struktur tata ruang di kawasan pusat kota (CBD) dan wilayah Kota Sukabumi lama sesuai dan konsisten dengan hasil revisi RTRW Kota Sukabumi Tahun 2002-2011. Diusahakan agar tidak terjadi kegiatan dan fungsi kota yang saling tumpang tindih dan berbaur satu dengan yang lainnya (pencegahan *mix land use planning*).

5.3. Saran untuk Studi Lebih Lanjut

- 1) Perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk menentukan lokasi sarana pelayanan masyarakat dari hasil Analisis Wilayah Keputusan Berkaitan (AWKB), sehingga lokasi sarana pelayanan masyarakat merupakan jarak yang paling minimum dari tempat tinggal dan dapat melayani yang paling maksimum. Dalam hal ini dimungkinkan dengan menggunakan analisis **P-Median** untuk menentukan lokasi sarana pelayanan masyarakat.
- 2) Untuk pelaku pembangunan di wilayah perluasan Kota Sukabumi kiranya perlu diadakan penelitian lebih lanjut terutama dilihat dari peran pihak swasta yang **sangat kecil** dalam penyediaan sarana pelayanan masyarakat di wilayah perluasan Kota Sukabumi, yang nantinya akan berguna bagi pemerintah Kota Sukabumi sebagai bahan masukan dalam pembuatan kebijakan dimasa yang akan datang, sebagai strategi menarik pihak swasta untuk menanamkan modalnya (*investasi*) di wilayah perluasan Kota Sukabumi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Bintarto.1997a. *Pengantar Geografi Baru*, Yogyakarta : U.P.Spring.
- _____, 1989b. *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*. Bandung : Ghalia Indonesia.
- _____, 1982c. *Metode Analisa Geografi*, Jakarta : LP3S.
- Branch, Malville. 1996. *Perencanaan Kota komprehensif : Pengantar dan Penjelasan*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Bryant, Carollie. 1987. *Manajemen Pembangunan untuk Negara Berkembang*. Jakarta : LP3-ES.
- Budihardjo, Eko. 1997.*Tata Ruang Kota*. Bandung : Alumni.
- Budiharsono.2001. *Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan*. Jakarta : PT. Pradnya Paramita.
- Catanes Anthony dan Snyder James.1996. *Perencanaan Kota*. Jakarta : Erlangga
- CrI.V.Patton danDavid.S.Sawicki. 1986. *Basic Methods of Policy Analysis and Planning*. New York : Prenticew Hall, Englewood,.
- Daldjoeni.1997. *Geografi Baru, Organisasi Keruangan dalam Teori dan Praktek*. Bandung : Alumni.
- Danim, Sudarwan. 1997. *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Djayadinata, Johara. 1999. *Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Pedesaan Perkotaan dan Wilayah*. Bandung : ITB
- Dunn, William. 1999. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Gollany, Gedion. 1976. *New Town Planning : Principle and Practice*. New York : John Willey and Sons
- Jones, Bernie. 1990. *Neighborhood Planning*, Chicago : Planner Pers.

- Kairuddin. 1992. *Pembangunan Masyarakat Tinjauan Aspek Sosiologi Ekonomi dan Perencanaan*. Yogyakarta : Liberty
- Marzuki. 2000. *Metodologi Riset*. Yogyakarta : BPFU-UII.
- Rankin. 1983. *Scaling Methods*, London : Lawrence Erlbaum Associates
- Rohe, William. 1985. *Planning With Neighborhood*. University of North Carolina Press Chapes Hill.
- Singarimbun, Masri. 1989. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta : LP3S.
- Soesilo, Nining. 2000a. *Ekonomi Perencanaan Manajemen Kota*. Jakarta : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia
- _____, 2000b. *Reformasi Pembangunan dengan Langkah-Langkah Manajemen Strategik*. Jakarta : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia.
- Sujarto, Djoko. 2001. *Pilihan Strategis untuk Perencanaan Kota dan Wilayah*. Bandung : Alumni ITB.
- Sugiyono. 1999. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung : CV Alfabeta
- Tjahyati, Budhi (ed). 1997. *Bunga Rampai Perencanaan Pembangunan di Indonesia*, Jakarta : Grasindo.
- Willian, Claire. 1973. *Hand Book an Urban Planning*. New York : Van Nostrand Reinhold.
- Yeates, Maurice. 1980. *North American City*. New York : Harper and Raw
- Yunus, Sabari. 2000. *Struktur Tata Ruang Kota*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Jurnal Penelitian

- Sujarto Djoko. 1997. "Pendekatan Pembangunan Perkotaan ditinjau dari segi Perencanaan Lokal". Bulletin No.12 BPA UGM Yogyakarta.

Buku Data

- Kota Sukabumi dalam Angka Tahun 2001*. Kantor Statistik Kota Sukabumi, 2002
- Rencana Umum Tata Ruang Kota Sukabumi 1994-2006*. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sukabumi, 1996.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sukabumi 2002-2011. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sukabumi, 2002.

Peraturan Perundang-undangan :

Direktorat Cipta Karya, Kamus Tata Ruang IAP 1998

Pedoman Teknik Pembangunan Perumahan Sederhana Tidak Bersusun. 1996. Dirjend Cipta Karya Jakarta : Departemen Pekerjaan Umum.

Petunjuk Perencanaan Kawasan Perumahan Kota. 1987. Jakarta : Yayasan Badan Penerbit PU.

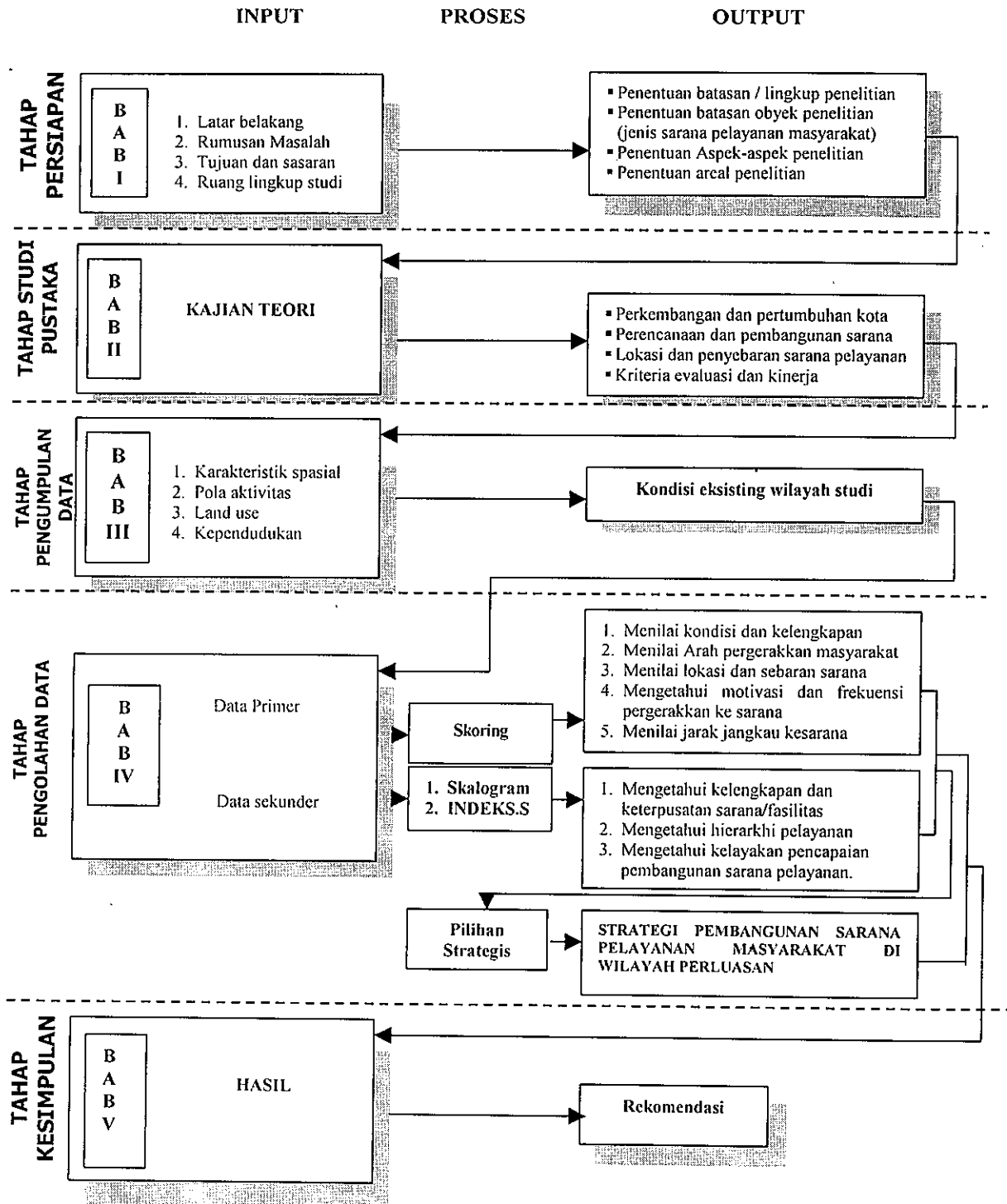
Pedoman Perencanaan Lingkungan Pemukiman. 1988. Puslitbangkim. Bandung : Departemen Pekerjaan Umum

Undang-Undang Permukiman dan Perumahan No.4 tahun 1994.

LAMPIRAN A

DESAIN PENELITIAN

**TAHAPAN PELAKSANAAN
EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN SARANA
PELAYANAN MASYARAKAT DI WILAYAH PERLUASAN**



KEBUTUHAN DATA

NO	KELOMPOK DATA	JENIS DATA	SUMBER	
1.	Gambaran Umum Kota Sukabumi			
	a. Kondisi fisik wilayah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Luas wilayah ▪ Kondisi geografis dan topografis 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bappeda ▪ BPS 	
	b. Kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah dan sebaran penduduk ▪ Mata pencaharian penduduk 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ BPS ▪ BPS 	
	c. Pertanahan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tata guna lahan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bappeda 	
2.	Gambaran Umum wilayah perluasan			
	a. Kondisi wilayah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Luas wilayah 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bappeda 	
	b. Kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah dan sebaran penduduk ▪ Mata pencaharian penduduk 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ BPS ▪ BPS 	
		c. Sarana pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah TK ▪ Sebaran SD 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas Pendidikan ▪ Dinas Pendidikan
	d. Sarana Perdagangan		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah SLTP ▪ Jumlah SLTA 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas Pendidikan ▪ Dinas Pendidikan
			e. Sarana Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah Kios/warung ▪ Jumlah Toko ▪ Jumlah Pasar Lokal
		f. Sarana Peribadatan		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah Puskesmas ▪ Jumlah Balai pengobatan
	g. Sarana Rekreasi			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah BKIA ▪ Jumlah Masjid ▪ Jumlah Mushola/langgar ▪ Jumlah tempat rekreasi
		3.	Data Primer	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Data Jumlah dan kondisi sarana
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Arah Pergerakan Penduduk ▪ Lokasi dan sebaran sarana ▪ Motivasi ▪ Jarak Jangkau ke sarana. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepala Keluarga ▪ Kepala Keluarga ▪ Kepala Keluarga ▪ Kepala Keluarga

Sumber : Analisis Data, 2002

**SEBARAN SAMPEL UNTUK SETIAP KELURAHAN
DI WILAYAH PERLUASAN KOTA SUKABUMI**

NO	KELURAHAN	JUMLAH KK	RASIO	JUMLAH SAMPEL
1	Sudajaya Hilir	1.181	0,03	3
2	Jaya Mekar	943	0,03	3
3	Jaya Raksa	1.630	0,05	5
4	Baros	2.796	0,08	8
5	Dayeuh Luhur	2.922	0,08	8
6	Sukakarya	2.644	0,07	8
7	Karang Tgh	2.712	0,08	8
8	Cisarua	3.624	0,10	10
9	Subang Jaya	2.673	0,08	8
10	Lembur Situ	2.559	0,07	7
11	Situ Mekar	1.301	0,04	4
12	Cipanengah	1.451	0,04	4
13	Cikundul	1.250	0,04	4
14	Sindang Sari	1.306	0,04	4
15	Sindang Palay	977	0,03	3
16	Limus Nunggal	2.028	0,06	6
17	Cibeureum Hilir	1.996	0,06	6
18	Babakan	1.455	0,04	4
	JUMLAH	35.448	1,00	103

Sumber : Analisis data, 2002

**KLASIFIKASI RENTANG NILAI
UNTUK DATA PRIMER**

NO	VARIABEL	PARAMETER	RENTANG NILAI
1.	Arah pergerakan sebelum perluasan	Di pusat Kota Sukabumi	435 – 515
		Di wilayah Kota Sukabumi lama	352 – 434
		Di wilayah perluasan Kota Sukabumi	269 – 351
		Di luar Kota Sukabumi termasuk dalam Kab.Sukabumi	186 – 268
		Di luar Kota dan Kabupaten Sukabumi	103 - 185
2.	Arah pergerakan sesudah perluasan	Di pusat Kota Sukabumi	352 – 434
		Di wilayah Kota Sukabumi lama	269 – 351
		Di wilayah perluasan Kota Sukabumi	435 – 515
		Di luar Kota Sukabumi termasuk dalam Kab.Sukabumi	186 – 268
		Di luar Kota dan Kabupaten Sukabumi	103 - 185
3.	Jarak Jangkau ke Sarana	Dekat sekali (< 300 m, < 5 menit)	435 – 515
		Dekat (300-600 m, 5 – 10 menit)	352 – 434
		Sedang (601-1500 m, 11 – 20 menit)	269 – 351
		Jauh (1,5 km –3 km, 21 – 40 menit)	186 – 268
		Jauh sekali (>3 km, > 40 menit)	103 - 185
4.	Lokasi sarana sebelum perluasan	Di lingkungan sekitar tempat tinggal (RT/RW)	435 – 515
		Di lingkungan kelurahan setempat	352 – 434
		Di luar lingkungan tempat tinggal di kecamatan yang sama	269 – 351
		Di wilayah kota sukabumi lama	186 – 268
		Di pusat kota sukabumi	103 - 185
5.	Lokasi sarana sesudah perluasan	Di lingkungan sekitar tempat tinggal (RT/RW)	435 – 515
		Di lingkungan kelurahan setempat	352 – 434
		Di luar lingkungan tempat tinggal di kecamatan yang sama	269 – 351
		Di wilayah kota sukabumi lama	186 – 268
		Di pusat kota sukabumi	103 - 185
6.	Frekuensi ke pusat kota	Sangat sering (1-3 kali sehari)	435 – 515
		Sering (1 kali sehari)	352 – 434
		Cukup sering (2-3 kali seminggu)	269 – 351
		Kurang (1 kali seminggu)	186 – 268
		Jarang (2-3 kali sebulan)	103 - 185
7.	Kondisi sarana pelayanan masyarakat	Baik sekali	435 – 515
		Baik	352 – 434
		Sedang/cukup baik	269 – 351
		Buruk	186 – 268
		Sangat buruk	103 - 185

KLASIFIKASI RENTANG NILAI UNTUK DATA SEKUNDER

NO	VARIABEL	PARAMETER	RENTANG NILAI
1.	Ketersediaan sarana pelayanan	Sangat memadai, apabila rasio permintaan terhadap kondisi eksisting bernilai > 1	78 – 90
		Memadai, apabila rasio permintaan terhadap kondisi eksisting bernilai $0,76 - 1$	63 – 77
		Cukup, apabila rasio permintaan terhadap kondisi eksisting bernilai $0,51 - 0,75$	48 – 62
		Kurang, apabila rasio permintaan terhadap kondisi eksisting bernilai $0,25 - 0,50$	33 – 47
		Sangat kurang, apabila rasio permintaan terhadap kondisi eksisting bernilai $< 0,25$	18 – 32
2.	Lokasi sarana pelayanan masyarakat	Sangat Dekat, apabila letaknya masih dalam lingkungan permukiman (RT/RW) dan kelurahan.	435 – 515
		Dekat, apabila letaknya masih dalam lingkungan satu kecamatan.	352 – 434
		sedang, apabila letaknya masih dalam lingkungan satu kecamatan yang sama..	269 – 351
		Jauh, apabila letaknya diluar kecamatan masih dalam wilayah perluasan	186 – 268
		Sangat Jauh, apabila letaknya di wilayah kota Sukabumi lama	103 -185